



BANDING ATAS PUTUSAN ARBITRASE DI INDONESIA

T E S I S

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum**

**Oleh :
JUSRIDA TARA, SH
N I M : B 4 A 099088**

**PEMBIMBING :
PROF. DR. ERMAN RADJAGUKGUK, SH,LLM.**

**PROGRAM PASCA SARJANA ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2003**

BANDING ATAS PUTUSAN ARBITRASE DI INDONESIA

Disusun oleh :

JUSRIDA TARA, SH
NIM. B 4 A. 099088

Dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal : 29 Agustus 2003

Tesis ini telah diterima
sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Ilmu Hukum.

Pembimbing



(Prof. DR. Erman Radjagukguk, SH. LLM)
NIP. 130608480

Mengetahui

Ketua Program Magister Ilmu Hukum



(Prof. DR. H. Barda Nawawi Arief, SH)
NIP. 130350519

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah S.W.T karena berkat rahmat dan karunia-Nya, akhirnya penulisan tesis dengan judul **"Einding Atas Putusan Arbitrase di Indonesia"** dapat diselesaikan, walaupun telah mengalami penundaan selama kurang lebih 1 tahun.

Dalam penulisan tesis ini, penulis menyadari keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki, oleh karena itu selesainya penulisan ini tidak terlepas dari bantuan maupun sumbangan pikiran dan bimbingan dari berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu .

Sangat tepat kiranya ucapan terimakasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada Bapak Prof. DR. Erman Radjagukguk, SH. LLM yang telah menyediakan waktunya untuk membimbing dan memberikan pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Ucapan terima kasih yang sama juga penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Ir. Eko Budihardjo, MSC, Rektor Universitas Diponegoro Semarang;
2. Bapak Prof. Dr. H. Barda Nawawi Arief, SH, Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
3. Bapak Prof. Dr. H. Muladi, SH, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah mendorong usaha peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) di Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI;
4. Bapak Prof. Dr. Romli Atmasasmita, SH, LLM, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI (waktu itu menjabat Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum Departemen

Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI) yang telah memberikan fasilitas untuk menyelesaikan Program Magister Ilmu Hukum;

5. Bapak Zulkarnain Junus, SH, MH, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI yang telah memberikan kesempatan dan mendorong penulis untuk menyelesaikan Program Magister Ilmu Hukum;
6. Dosen beserta staf pengajar Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro;
7. Karyawan dan Staf Administrasi Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro;
8. Rekan-rekan di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, terutama Staf Direktorat Pidana yang memberikan bantuan dan semangat kepada penulis;
9. Semua Pihak dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Jakarta Barat, BANI, yang semuanya membantu penulis dalam mendapat data-data penelitian dan penulisan tesis.
10. Akhirnya kepada suami tersayang ERWIN MANSOER, SH, anak-anak tersayang (Jerry, Justicia, Fatma Anggrainy dan Rahmat Abdillah) yang memberikan semangat, dorongan dan motivasi hingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini;

Akhir kata semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis dan yang memerlukannya.

Jakarta,

2003

Penulis

RINGKASAN

Arbitrase merupakan salah satu lembaga penyelesaian sengketa perdata diluar Pengadilan Negeri yang sangat diharapkan pelaku bisnis dewasa ini. Penyelesaian sengketa perdata melalui lembaga arbitrase selain proses dan prosedurnya tidak memakan waktu yang lama dan tidak berbelit-belit, juga karena dijaminnya kerahasiaan para pihak yang bersengketa dan berdasarkan perjanjian arbitrase yang dibuat atas kesepakatan para pihak

Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang diundangkan pada tanggal 12 Agustus 1999, mengatur proses, prosedur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antara para pihak yang telah mengadakan perjanjian arbitrase melalui prosedur arbitrase. Dengan adanya klausula arbitrase dalam suatu perjanjian , Pengadilan Negeri tidak diperkenankan untuk mengadili sengketa para pihak yang terikat dalam perjanjian Arbitrase.

Dalam melaksanakan putusan arbitrase terlebih dahulu harus didaftarkan atau dideponir di Pengadilan Negeri untuk mendapatkan fiat eksekusi. Namun terhadap putusan Arbitrase para pihak dapat pula mengajukan permohonan pembatalan, apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur: surat atau dokumen yang diajukan dinyatakan palsu atau diakui palsu; dokumen yang bersifat menentukan disembunyikan pihak lawan atau putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak.

Permohonan pembatalan perkara arbitrase harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut dapat diajukan banding ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir.

Dari uraian kajian terhadap kasus-kasus putusan arbitrase yang diajukan ke pengadilan, adanya klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian menjadi dasar pertimbangan bagi pengadilan dalam putusannya menyatakan permohonan pembatalan tidak dapat diterima.

Appeal on Arbitration Decision in Indonesia

Arbitration is one of resolutions for dispute in private matters, exclude the district court and its applied by many entrepreneurs in recently. Process and procedures in arbitration are simpler and easier than the district ones, and itu protects parties more confidential as well as based on arbitration agreement was made by them.

Act No.30/1999 concerning Arbitration and alternative dispute resolution, acted in August 12, 1999, regulates process and procedures to get resolutions for parties in Arbitration. By added clause of arbitration in a contract, the district court no longer competence to process the case before the court.

In order to applied an arbitration decree, at first, it must registered in distric court to get the execution order. But its also possible for parties to apply an annulment, in case the sentence supposed has faked documents or a meanness made by a party.

An annulment application in arbitration should apply to the chief of district court. And the sentence was made by district court can be appealed to the supreme court.

According to previous cases in arbitration, the clause of arbitration that added in contract, were becoming a consideration for the court to make a decision that an annulment application can not be accepted.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
RINGKASAN.....	v
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Rumusan Masalah.....	16
C. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	17
D. Metode Penelitian	20
E. Kegunaan Penelitian.....	22
F. Sistematika Pembahasan.....	23
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA BANDING ATAS PUTUSAN ARBITRASE DI INDONESIA.....	 24
A. UMUM.....	24
1. Ruang Lingkup Arbitrase	29
2. Perjanjian Arbitrase bersifat asesor.....	33
3. Klausula Arbitrase merupakan "Pacta Sunt Servanda"	36
B. LANDASAN HUKUM ARBITRASE DI INDONESIA.....	39
C. PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA ARBITRASE.....	44

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN BANDING ATAS	
PUTUSAN ARBITRASE	75
A. Hasil Penelitian Terhadap Banding Atas Putusan Arbitrase...	75
B. Hasil Pembahasan	123
1. Apakah Putusan Arbitrase Dapat Dimintakan	
Pembatalan ke Pengadilan Negeri ?.....	123
2. Apakah Putusan Pengadilan Negeri terhadap Pembatalan	
Perkara Arbitrase Bisa Dimintakan Banding ?.....	137
3. Bagaimana Peran Peradilan Terhadap Pelaksanaan	
Putusan Arbitrase ?.....	146
BAB IV. PENUTUP.....	156
1. Simpulan	156
2. Saran.....	164
DAFTAR PUSTAKA.....	168
LAMPIRAN	175

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar belakang Permasalahan.

Perkembangan dunia usaha dan perkembangan lalu lintas di bidang perdagangan baik nasional maupun internasional masih menunjukkan intensitasnya sekalipun di beberapa belahan bumi ini sedang dilanda berbagai krisis, utamanya krisis moneter.

Kegiatan perdagangan yang semakin pesat, tidak menutup kemungkinan timbulnya konflik diantara beberapa pelaku usaha yang memerlukan penyelesaian dengan cepat. Sengketa diantara beberapa pelaku usaha atau diantara pihak-pihak yang ingin segera mendapatkan penyelesaian, perlu dibuka kemungkinan adanya lembaga diluar pengadilan yang dapat memberikan jasa sebagai media dalam penyelesaian sengketa. Oleh karena itu perlu di lembagakan cara penyelesaian di luar pengadilan yakni melalui Arbitrase dan Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa.¹

Dalam Undang Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang tercatat dalam Lembaran Berita Negara R.I Tahun 1999 Nomor 138 berikut Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 3872 yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Arbitrase, disebutkan bahwa Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa

¹ Keterangan Pemerintah dihadapan Rapat Paripurna DPR-RI mengenai Rancangan Undang-undang tentang *Arbitrase Alternatif, Penyelesaian sengketa* tanggal 24 Maret 1999, hal. 2-3

perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

T.L.T. Longdong menyebutkan, bahwa arbitrase adalah suatu cara penyelesaian sengketa dengan suatu putusan yang mempunyai keputusan pasti dan tetap, berdasarkan hukum atau dengan persetujuan para pihak berdasarkan keadilan dan kepatutan.²

Sedangkan Erman Radjagukguk menyebutkan bahwa Arbitrase adalah institusi hukum alternatif bagi penyelesaian sengketa di luar pengadilan.³

Arbitrase menurut definisi yang diberikan oleh Frank Elkouri dan Edna Elkouri tercantum dalam bukunya yang berjudul : *"How Arbitration Works"* adalah : *Arbitration is a simple proceeding chosen by parties who want a dispute determined by an impartial judge of their own mutual selection, whose decision on the merits of the case, they agreed in advance to accept as final and binding"*⁴

H.M. Abdurrahman mengatakan bahwa arbitrase adalah penyelesaian suatu sengketa perdata secara sederhana di luar pengadilan umum oleh arbiter (wasit) atau team arbiter (majelis wasit) yang dipilih atau ditunjuk oleh kedua pihak yang bersengketa dengan persetujuan bahwa

² Tineke Louise Teugeh Longdong, *Azas Keterlibatan Umum dan Konvensi New York*, 1998, Citra Aditya Bakti Bandung 1998, hal. 26

³ Erman Radjagukguk, *Arbitrase dalam Putusan Pengadilan*, 2000, hal.. Candra Pratama, Jakarta.

⁴ H.M. Abdurrahman, SH. Pidato Dies Natalis Ke XIX Universitas Trisakti Jakarta pada tanggal 1 Desember 1981.

mereka akan tunduk dan mentaati putusan arbiter tersebut sebagai putusan yang final dan mengikat.⁵

Makin maju usaha perindustrian dan perdagangan, makin luas hubungan hukum yang diadakan oleh para pengusaha, dan tentu saja tidak dapat dipungkiri kemungkinan terjadi sengketa dalam pemenuhan kewajiban dan hak mereka. Sudah menjadi suatu ciri profesi pengusaha bahwa setiap sengketa ingin diselesaikan dengan baik dan dalam waktu yang relatif singkat oleh badan yang terdiri dari para ahli yang menguasai betul bidang usaha yang disengketakan itu, badan yang dimaksud adalah Badan Arbitrase:

Kemungkinan bagi para pihak yang bersengketa untuk menyerahkan penyelesaian perselisihannya pada arbitrase sudah diatur jauh sebelum berlakunya HIR. Oleh *Reglement op de Rechtsvordering* (S. 1847 No. 50 jo 1849 No. 63), yang biasa dikenal sebagai Rv. Secara umum dapat dikatakan bahwa Rv, kini sudah tidak berlaku lagi.⁶

Namun demikian, Pasal 377 HIR menyebutkan apabila orang-orang yang tidak tunduk pada Hukum Perdata Barat hendak menyelesaikan sengketanya melalui seorang arbiter, maka dalam hal ini mereka wajib mengikuti peraturan mengadili perkara yang berlaku bagi orang-orang Eropa,

⁵ Ibid, hal. 54-55

⁶ *Masalah-masalah Hukum dalam Arbitrase*. Diterbitkan oleh Tim Pengkajian MA-R I 1990, hal. 1; Jakarta.

yakni *Reglement op de Rechtsvordering* itu sebagaimana tersebut dalam Pasal 615 sampai dengan Pasal 651.⁷

Dengan telah diundangkannya UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka secara umum R V dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.

Berkembangnya Badan Arbitrase banyak bergantung kepada itikad baik pihak yang memilih arbitrase sebagai tempat penyelesaian sengketa dan sikap pengadilan terhadap pelaksanaan arbitrase tersebut.

Pertama, jika para pihak telah memilih arbitrase sebagai tempat penyelesaian sengketa, semestinya kedua belah pihak tunduk kepada ketentuan yang telah mereka setuju tersebut. Namun apabila salah satu pihak dengan berbagai alasan akhirnya membawa sengketanya ke Pengadilan atau tidak mentaati keputusan arbitrase, maka terbuka kemungkinan penyelesaian sengketa yang berlarut-larut.

Kedua, apabila salah satu pihak mengajukan sengketa ke Pengadilan, padahal sejak semula sudah memilih arbitrase sebagai tempat penyelesaian sengketa, maka berhasil tidaknya langkah itu banyak tergantung kepada sikap pengadilan terhadap pilihan yurisdiksi tersebut atau terhadap putusan arbitrase yang bersangkutan.

Pengadilan tetap mempunyai peranan penting dalam menyelesaikan sengketa-sengketa bisnis, walaupun para pihak telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang bersangkutan melalui Badan Arbitrase.

⁷ Erman Radjagukguk, op cit, hal. 2

Walaupun para pihak semula sudah sepakat menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul diantara mereka melalui badan arbitrase, namun ada kalanya salah satu pihak tetap mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dengan berbagai alasan.

Salah satu perkara yang sebelumnya telah sepakat antara para pihak yang diselesaikan lewat Pengadilan Negeri adalah perkara perdata No.454/Pdt.G/1999/PN. Jak-Sel, sengketa antara PT. Perusahaan Dagang Tempo (PT.TEMPO) dengan PT. Roche Indonesia, adalah salah satu kasus dimana kedua belah pihak sebelumnya telah sepakat untuk memilih arbitrase sebagai badan yang memutus apabila terjadi sengketa antara para pihak. Sedangkan dalam kenyataannya salah satu pihak telah melakukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan Pengadilan telah memeriksa dan memutuskan perkara tersebut.

Perlu juga diperhatikan bahwa tidak semua sengketa perdata dapat diselesaikan melalui arbitrase. Jika demikian sengketa perdata yang mana yang dapat diselesaikan melalui arbitrase.

Dalam hal ini perlu dibedakan 2 jenis sengketa perdata yaitu :

- a. Sengketa perdata dalam hubungan hukum harta kekayaan.
- b. Sengketa perdata dalam hubungan hukum keluarga.⁸

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia Bandung*, PT Citra Aditya Bakti, 1999, hal. 409

Sengketa perdata dalam hubungan harta kekayaan adalah sepenuhnya dikuasai oleh pihak-pihak karena penegakan hukumnya tidak bersangkut paut dengan seperti yang umum (masyarakat, negara) melainkan melulu kepentingan pribadi pihak-pihak.⁹ Sengketa perdata semacam ini dapat diselesaikan melalui arbitrase berdasarkan kesepakatan pihak-pihak sebagai pengusaha, yang menjalankan perusahaan.

Sedangkan sengketa perdata dalam hubungan hukum keluarga adalah sengketa perdata yang tidak sepenuhnya dikuasai oleh pihak-pihak karena penegakan hukumnya bersangkut paut dengan kepentingan umum (masyarakat, negara) ketertiban umum, kesusilaan dalam masyarakat.

Tidak hanya menyangkut kepentingan pihak-pihak yang bersengketa, melainkan juga kepentingan pihak lain dalam masyarakat, atau menyangkut juga kepentingan negara.

Sengketa-sengketa tersebut menyangkut kepentingan umum, ketertiban umum dan kesusilaan. Oleh karena itu sengketa perdata semacam ini tidak dapat diselesaikan oleh arbitrase melainkan oleh peradilan negara (Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama).

Sebagian besar pengusaha lebih suka menyelesaikan sengketa yang timbul diantara mereka melalui arbitrase daripada pengadilan karena beberapa alasan.¹⁰

⁹ Soekardono; *Hukum dagang Indonesia*, jilid I bag. Pertama 1977, hal. 205-206.

¹⁰ Erman Radjagukguk; *op cit*, hal 1-3

Pertama, pengusaha asing lebih suka menyelesaikan sengketa melalui arbitrase di luar negeri karena menganggap sistem hukum dan pengadilan setempat asing bagi mereka. Sebenarnya pun alasan ini tidak selalu benar karena mereka bisa menunjuk pengacara setempat untuk mewakili mereka di depan pengadilan.

Kedua, pengusaha-pengusaha negara maju beranggapan hakim-hakim negara berkembang tidak menguasai sengketa-sengketa dagang yang melibatkan hubungan-hubungan niaga dan keuangan internasional yang rumit. Alasan ini juga sepenuhnya tidak benar karena para hakim dapat memanggil saksi ahli. Sistem pengadilan tertentu, seperti Pengadilan Niaga di Indonesia memungkinkan pengangkatan hakim ad-hoc atau hakim yang diangkat karena keahliannya.

Ketiga, pengusaha negara maju beranggapan penyelesaian sengketa melalui pengadilan akan memakan waktu yang lama dan biaya yang besar, karena proses pengadilan yang panjang dari tingkat pertama sampai dengan tingkat Mahkamah Agung. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase untuk beberapa kasus ternyata juga memakan waktu yang lama.

Keempat, keengganan pengusaha asing untuk menyelesaikan sengketa didepan pengadilan bertolak dari anggapan bahwa Pengadilan akan bersikap subjektif kepada mereka, karena sengketa diperiksa dan diadili dan berdasarkan bukan hukum negara mereka, oleh hakim bukan dari negara mereka.

Kelima, penyelesaian sengketa di pengadilan akan mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, dan hasilnya akan dapat merenggangkan hubungan dagang diantara mereka.

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dianggap dapat melahirkan putusan kompromis, yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Keenam, penyelesaian sengketa melalui arbitrase tertutup sifatnya, sehingga tidak ada publikasi mengenai sengketa yang timbul. Publikasi mengenai sengketa suatu yang tidak disukai oleh para pengusaha. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dilakukan melalui sidang terbuka, dapat disiarkan oleh media massa yang mungkin bisa melahirkan penilaian yang tidak baik bagi kedua belah pihak yang bersengketa.

Sedangkan Abdulkadir Muhammad mengemukakan, ada beberapa alasan pihak bersengketa itu memilih penyelesaian melalui arbitrase yaitu ¹¹:

- a. Orang-orang yang ditunjuk oleh pihak-pihak menjadi arbiter adalah ahli (pakar), dan berpengalaman dalam hal yang menjadi pokok sengketa. Dengan demikian, putusan arbitrase diharapkan obyektif dan diterima oleh kedua belah pihak.
- b. Proses penyelesaian sengketa melalui arbiter relatif lebih cepat karena merupakan peradilan tingkat pertama dan terakhir sehingga kepastian hukum mengenai pokok-pokok sengketa cepat diperoleh pihak-pihak.

¹¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1999, Hal. 411-412.

- c. Pemeriksaan sengketa melalui arbitrase dilakukan secara tertutup, sehingga kepentingan pihak-pihak yang bersengketa dijamin kerahasiaannya karena tidak dipublikasikan.
- d. Setiap putusan Arbitrase memuat pertimbangan hukum dan amar putusan (dictum) serta ditandatangani oleh para arbiter. Terhadap putusan arbitrase tidak diadakan perlawanan.
- e. Setiap Putusan Arbitrase dimintakan fiat eksekusi dari Pengadilan Negeri setempat, sehingga memperoleh kekuatan eksekutorial sama dengan putusan Pengadilan. Dengan Demikian, pelaksanaan putusan dapat dipaksakan.

Namun dalam penjelasan Pasal 3 (1) Undang-undang No.14 Tahun 1970 disebutkan antara lain bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap diperbolehkan, akan tetapi Putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk dieksekusi (execution) dari pengadilan.

Dalam Undang Undang No.30 Tahun 1999 penggunaan sarana lembaga arbitrase umumnya mempunyai kelebihan dibandingkan dengan lembaga peradilan. Kelebihan tersebut antara lain :

- a. dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, karena majelis arbitrase selalu bersidang dengan pintu tertutup (Pasal 27);

- b. dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif (Pasal 36);
- c. para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil;
- d. para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase (Pasal 56);
- f. putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan (Pasal 52).

Walaupun pada kenyataannya apa yang disebutkan diatas tidak semuanya benar, sebab di negara-negara tertentu proses peradilan dapat lebih cepat dari pada proses arbitrase, namun demikian penyelesaian sengketa melalui arbitrase masih lebih diminati daripada litigasi dimuka pengadilan terutama untuk kontrak bisnis yang bersifat internasional.

Dengan perkembangan dunia usaha dan perkembangan lalu lintas di bidang perdagangan baik nasional maupun internasional serta perkembangan hukum pada umumnya, maka peraturan yang terdapat dalam Reglement Acara Perdata Barat (*Reglement op de Rechtsvordering*) yang dipakai sebagai pedoman arbitrase sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dirubah sesuai dengan kebutuhan karena pengaturan perdagangan yang

bersifat internasional sudah merupakan kebutuhan *conditio sine qua non* sedangkan hal-hal tersebut tidak diatur dalam Hukum Acara Perdata Barat (*Reglement op de Rechtsvordering*) yang mendasari arbitrase tersebut.

Arbitrase lebih disukai usahawan asing hal ini dikemukakan oleh Sudargo Gautama¹² dalam Undang-undang Arbitrase yang baru UU No.30 Tahun 1999, dinyatakan antara lain bahwa dibandingkan dengan perkara biasa melalui Pengadilan Negeri, arbitrase lebih diutamakan oleh pelaku bisnis Internasional. Salah satu sebab karena "lebih cepat, murah dan sederhana". Cepat karena dalam rangka arbitrase ditentukan; baik dalam peraturan RV (*Reglement op de Rechtsvordering*), Hukum Acara Perdata yang lama (Pasal 620) maupun yang baru, ditentukan pada prinsipnya putusan arbitrase ini harus dijatuhkan dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pengangkatan arbiter. Jika hal ini tidak dilakukan atau putusan terlambat, maka para arbiter ini dapat dihukum membayar kerugian yang diakibatkan karena kelambatan tersebut kepada para pihak. Ratio adanya sanksi dan membayar kerugian ini, adalah bahwa arbiter-arbiter ini telah dibayar untuk membuat keputusan ini. Maka harus dilakukan seperti mereka ini telah berjanji "me-lever barang yang telah dibeli". Memang para arbiter ini menerima bayaran untuk "memproduksi" suatu putusan, untuk mana mereka telah dibayar.

¹² Sudargo Gautama ; *Undang-undang Arbitrase Baru*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1998 Hal. 7-10.

Kadang-kadang kedengarannya agak "aneh", bagaimana orang yang mengadili suatu perkara harus dibayar untuk itu. Para arbiter memang dapat dipandang sebagai hakim partikelir. Orang-orang dari dunia swasta, kadang-kadang professional, praktisi hukum, konsultan hukum, Pengacara tetapi tidak boleh menjabat sebagai Hakim, Jaksa, Panitera Pengadilan atau Penyidik lain dalam dunia peradilan. Jalan perkiraan pembuat Undang-undang ialah agar mereka sebagai arbiter dapat memelihara obyektivitas mereka.

Pernah dipertanyakan, Mengapa orang-orang mau membayar sendiri untuk para hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara mereka, sedangkan sudah tersedia Hakim-hakim oleh negara secara gratis. Hakim-hakim yang karena jabatan harus memutus perkara, dan tidak perlu dibayar oleh para pihak yang sedang berperkara. Tetapi para pihak memilih para hakim partikelir (arbiter) sendiri, walau harus membayar mereka menganggap arbiter yang mereka pilih ini, akan bertindak lebih jujur, adil, dan obyektif, serta lebih menguasai permasalahannya, karena mereka expertise atau pengalaman mereka ini, dibandingkan hakim pengadilan biasa. Para usahawan, apalagi yang bertindak melalui "Internasional" lebih mempercayai penyelesaian secara arbitrase karena cepatnya pemeriksaan dari keputusan sengketa dibandingkan dengan peradilan biasa, yang memakan waktu bertahun-tahun lamanya.

Maka dalam teks Undang-undang Arbiter baru ini dinyatakan secara tegas, bahwa arbitrase oleh para pedagang lebih disukai, antara lain karena "cepat dan adilnya, jujurnya" putusan arbitrase. Mereka yang memeriksa perkara ini adalah yang telah dipilih sendiri dan dipercayai oleh para pihak yang berperkara, maka sebagai salah satu "kelebihan" dari arbitrase dalam teks Memori Penjelasan (bagian Umum) dinyatakan pada umumnya lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dari lembaga peradilan, kelebihan tersebut antara lain :

- Dapat dihindari keterlambatan yang diakibatkan hal prosedural dan administrative.
- Putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja atau langsung dapat dilaksanakan. (Memori Penjelasan Bagian Umum).

Tetapi syukur pembuat Undang-undang Arbitrase baru ini tidak tutup mata untuk kenyataan, bahwa kadang-kadang dalam praktek , arbitrase ini tidak begitu cepat, murah dan sederhana. Teringat kami pada kenyataan dalam praktek, bahwa pernah suatu perkara arbitrase, yang diajukan dihadapan Pusat Arbitrase Bank Dunia, *Internasional Centre for the Settlement of Investment Disputes* (ICSID), justru berlangsung tidak cepat, tidak murah. Yakni tidak kurang dari total 12 (dua belas) Tahun, sebelum final yaitu dalam perkara AMCO lawan Republik Indonesia, perkara tentang

investasi modal asing dalam "Hotel Kartika Plaza" di Jakarta (case No. ARB/81/I).

Bahwa Arbitrase bersifat konfindensial sebagai salah satu kelebihan arbitrase terhadap pengadilan adalah sifatnya yang konfindensial, oleh karena keputusan yang dijatuhkan oleh Majelis Arbiter tidak dipublikasikan dan itupun kalau tidak ada perlawanan. Ditambahkan dalam Memori Penjelasan : " namun demikian penjelasan itu sengketa melalui arbitrase masih diminati daripada litigasi terutama untuk kontrak bisnis bersifat Internasional".

Dalam hubungan ini, jangan dilupakan bahwa pelaku bisnis Internasional umumnya sangat takut terhadap pemeriksaan perkara melalui pengadilan karena anggapan bahwa pengadilan domestik lebih memperhatikan kepentingan dirisendiri saja. Karena mereka takut adanya factor X, yang merupakan dikenal sebagai mafia peradilan. Tetapi juga karena pada umumnya para investor asing kurang mengenal sistem hukum domestik ini, dengan segala seluk-beluknya. Sistem hukum peninggalan zaman kolonial dipandang sebagai kurang pasti, oleh para pedagang Jerman, diibaratkan seperti orang melompat ke luar dalam kegelapan (een sprong in het duister) atau seperti masuk dalam gua singa.

Para investor luar negeri takut sekali persoalan mereka dibawa ke hadapan pengadilan-pengadilan domestik. karena integritas badan

peradilan-peradilan ini, dianggap terlalu biased, condong selalu memenangkan pihak pengusaha nasional, atau pemerintah nasional sendiri.

Badan Arbiter Nasional Indonesia (BANI) telah didirikan oleh Kamar Dagang Indonesia (KADIN) pada tanggal 3 Desember 1977. Pada umumnya disemua negara yang memprakarsai berdirinya Badan Arbitrase, adalah Kamar Dagang Indonesia, karena memang para pedaganglah yang berkepentingan dalam lembaga arbitrase.

Setelah lahirnya Bani, Arbitrase di Indonesia dilakukan secara tidak terkoordinir yang dinamakan Arbitrase ad hoc, sedangkan arbitrase yang diadakan setelah lahirnya BANI dinamakan suatu arbitrase yang dikoordinasikan oleh suatu lembaga.

Adapun tujuan pendirian BANI adalah memberikan penyelesaian yang adil dan tepat dalam sengketa-sengketa perdata yang timbul mengenai soal-soal perdagangan, industri dan keuangan, baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional (Pasal 1 Anggaran Dasar BANI).

Adapun susunan kelembagaan Badan Arbitrase Nasional Indonesia terdiri atas seorang Ketua, Wakil Ketua, beberapa anggota tidak tetap dan sebuah Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris. Ketua, wakil ketua dan para anggota tetap merupakan pengurus badan tersebut, sedangkan para anggota tidak tetap merupakan arbiter yang dapat

ditunjuk atau dipilih oleh para pihak untuk menjadi ketua team abiter yang akan memeriksa dan memutus sengketa mereka.

Pasal 1 (2) Anggaran Dasar BANI dinyatakan bahwa dalam melakukan tugasnya BANI adalah bebas (otonomi) dan tidak boleh dicampuri oleh sesuatu kekuasaan lain. Antara BANI dan KADIN telah dicapai suatu pengertian, bahwa apabila seorang anggota KADIN terlibat dalam suatu sengketa yang diselesaikan lewat arbitrase BANI dan anggota itu dikalahkan oleh mejelis arbitrase, maka KADIN akan menggunakan pengaruhnya agar anggota tersebut mentaati keputusan arbitrase yang telah dijatuhkan itu untuk mengulangi kemungkinan bahwa pelaksanaan keputusan itu harus dimintakan kepada pengadilan.

Dengan telah berdirinya BANI tersebut diatas, diharapkan sengketa yang diajukan pada lembaga Arbiter/BANI, putusannya dapat diterima oleh para pihak, sebagai putusan yang "*Final and binding*" sehingga tidak melakukan banding ke pengadilan negeri.

II. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dapat ditarik pokok permasalahan yang akan diteliti antara lain :

1. Apakah putusan arbitrase dapat dimintakan pembatalan ke Pengadilan Negeri ?
2. Apakah putusan Pengadilan Negeri atas pembatalan perkara arbitrase bisa dimintakan banding ?

3. Bagaimana peran Peradilan terhadap pelaksanaan putusan arbitrase ?

III. Kerangka Teoritis dan Konseptual.

Kerangka teoritis ini meliputi landasan teori yang mendasari persoalan-persoalan yang dapat dihubungkan dengan banding atas putusan arbitrase di Indonesia. Pelaku bisnis menghendaki penyelesaian sengketa yang cepat oleh karena itu mereka pada waktu membuat kontrak mencantumkan klausula arbitrase yang dibuat pada akhir perjanjian atau dalam perjanjian tersendiri.

Dalam Pasal 1338 KUH Perdata sebagai suatu terjemahan dari Burgerlijk Wetboek (B.W) Stb.1847-23 selanjutnya disebut dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dikatakan bahwa "semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Azas ini dikenal sebagai *Pacta Sunt Servanda*.

Hal ini tidak berarti bahwa kebebasan para pihak ini tanpa batas. Adanya pembatasan terhadap kebebasan berkontrak ini diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang mensyaratkan bagi sahnya suatu perjanjian ada 4 (empat) syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; (Persetujuan para pihak);
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Dalam Pasal 5 (1) Undang Undang No.30 Tahun 1999 dinyatakan bahwa sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa dibidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang - undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa apa yang diserahkan kepada arbiter atau majelis arbitrase untuk diputus haruslah mengenai hal-hal yang berada dalam kekuasaan bebas para pihak.

Demikian halnya Pasal 5 (2) Undang Undang No.30 Tahun 1999 dinyatakan bahwa sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian. Dengan dibuatnya perjanjian berarti para pihak setuju untuk memilih yuridiksi arbitrase dengan mengenyampingkan peradilan umum, hal ini dilakukan dalam bentuk tertulis untuk menyadarkan para pihak tentang pilihan para pihak tentang forum yang telah mereka sepakati.

Berikut akan dikemukakan pengertian-pengertian dari istilah-istilah yang akan digunakan dalam penulisan ini menurut Undang Undang Arbitrase (UU No.30 Tahun 1999) :

1. Sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan, pertikaian dan perselisihan;

2. Arbitrase adalah suatu cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa [Pasal 1 (1)];
3. Para pihak adalah subjek hukum, baik menurut hukum perdata maupun hukum publik [Pasal 1 (2)];
4. Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa [Pasal 1(3)]
5. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pemohon;
6. Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa melalui arbitrase;
7. Termohon adalah pihak lawan dari pemohon dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase [Pasal 1 (6)];
8. Arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh pengadilan Negeri atau oleh lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase [Pasal 1 (7)];
9. Lembaga arbitrase adalah badan yang dipilih oleh pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu,

lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan tertentu dalam hal belum timbul sengketa [Pasal 9 (8)];

10. **Alternatif Penyelesaian Sengketa** adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi atau penilalan ahli;
11. *Ex aequo et bono*, adalah berupa kewenangan yang diberikan kepada para arbiter untuk memberikan putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan [Pasal 56]
12. *Execuator* adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Mahkamah Agung RI yang menyatakan bahwa suatu putusan arbitrase dapat dilaksanakan;
13. *Public Policy* adalah alasan yang dapat dipakai untuk diajukannya suatu sengketa pada peradilan umum, karena klausula yang dibuat para pihak bertentangan dengan public policy, sedangkan menurut ketentuan yang berlaku putusan arbitrase tersebut dapat dilaksanakan.

IV. Metode Penelitian.

Dalam penulisan tesis mengenai "Banding atas Putusan Arbitrase Di Indonesia" dititik beratkan pada data primer dari penelitian lapangan yang didukung dengan data sekunder yang diperoleh dari

penelitian kepustakaan sehingga permasalahan pokok yang diteliti dapat diperoleh kesimpulan umum mengenai arbitrase dan upaya hukum terhadap putusan arbitrase. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

a) Metode Pendekatan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris karena penulisan ini dimaksudkan untuk membahas secara teoritik mengenai arbitrase secara umum dan banding atas putusan Arbitrase. Dalam penelitian normatif ini yang berlaku adalah teori-teori hukum normatif sebagai kerangka konseptualnya. Sedangkan penelitian yuridis empiris atau sosiologis dilakukan dengan cara meneliti data yang langsung diperoleh dari data primer dan dengan melakukan studi lapangan.

b) Sumber Data

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal yang berkaitan dengan judul tesis ini, diperlukan data-data berupa :

1. Penelitian Kepustakaan yang bertujuan untuk mengumpulkan bahan bahan rujukan yang peneliti peroleh dari bahan-bahan kepustakaan meliputi :
 - a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat atau berupa peraturan perundang-undangan dalam

hal ini adalah antara lain Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan peraturan lain yang berkaitan dengan masalah arbitrase. Hukum Acara Perdata Indonesia dan putusan-putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang bisa memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti hasil penelitian hukum, bahan-bahan seminar dan ceramah ilmiah, pendapat para ahli, pendapat beberapa ahli hukum.
 - c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum pelengkap untuk menambah wawasan guna memperluas cakrawala pandang terhadap analisis hasil penelitian. Bahan hukum ini berguna untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, dan bahan-bahan penunjang lainnya.
2. Penelitian lapangan, yaitu pengumpulan informasi yang diperoleh dari instansi terkait seperti Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung dan nara sumber yang terkait.

V. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan selain untuk memenuhi persyaratan memperoleh derajat Magister Ilmu Hukum dari Universitas Diponegoro, juga dimaksudkan agar dapat diketahui gambaran tentang pelaksanaan banding atas putusan arbitrase di Indonesia melalui putusan Pengadilan baik yang

diatur dalam Rv maupun dengan telah berlakunya UJ No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tersebut.

VI. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai isi serta tujuan dari penulisan thesis ini penulis menguraikan secara ringkas tentang sistematika pembahasan yang dibagi dalam empat bab, yaitu sebagai berikut :

BAB I

Menguraikan pendahuluan yang mencakup latar belakang permasalahan perumusan masalah, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian, kegunaan penelitian guna memberi kemudahan pemahaman akan uraian-uraian pada bab-bab selanjutnya.

BAB II

Dalam tinjauan pustaka akan diuraikan ruang lingkup arbitrase, landasan hukum, serta tata cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase (prosedur arbitrase) yang memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak serta bagaimana putusan arbitrase yang harus dilaksanakan oleh para pihak.

BAB III.

Menguraikan hasil-hasil penelitian terhadap kasus-kasus arbitrase yang mengajukan tuntutan pembatalan putusan arbitrase ke Pengadilan dan pembahasan terhadap permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Pada

bab ini diuraikan hasil penelitian mengenai prosedur dan syarat-syarat pengajuan banding atau tuntutan pembatalan putusan arbitrase baik yang diatur dalam Rv maupun dengan berlakunya Undang Undang No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Setelah diuraikan penelitian terhadap kasus-kasus arbitrase, pada bagian pembahasan akan dianalisis masing-masing permasalahan tersebut terhadap permohonan banding putusan arbitrase oleh pihak yang tidak dapat menerima putusan arbitrase, serta peran lembaga Peradilan yang akan diuraikan berdasarkan kasus-kasus yang ada baik ditingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung.

BAB IV

Memuat penutup yang terdiri dari simpulan dan saran-saran.

Dalam bab ini akan diuraikan beberapa simpulan yang diambil dari hasil penelitian terhadap banding atas putusan arbitrase yang terjadi di Indonesia berdasarkan studi kasus yang ada dan memuat saran-saran yang dapat diajukan sebagai tindak lanjut terhadap perkembangan banding atas putusan arbitrase di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

BANDING ATAS PUTUSAN ARBITRASE DI INDONESIA

A. UMUM :

Dalam setiap hubungan hukum (perdata) terbuka kemungkinan terjadi sengketa terutama disebabkan keadaan dimana pihak yang satu mempunyai masalah dengan pihak lainnya dalam hubungan tersebut. Komar Kantaatmadja, SH, LLM (alm)¹³ menyebutkan bahwa sengketa terjadi jika salah satu pihak menghendaki pihak lain untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu tetapi pihak lainnya menolak berlaku demikian. Sengketa tersebut harus diselesaikan untuk menjaga keseimbangan hubungan yang telah terbentuk dan penyelesaian ini harus dilakukan menurut hukum atau berdasarkan kesepakatan awal diantara para pihak.

Asal mula sengketa biasanya bermula pada situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Biasanya diawali oleh perasaan tidak puas, bersifat subjektif dan tertutup. Kejadian ini dapat dialami perorangan maupun kelompok. Jika hal ini berkelanjutan, pihak yang merasa dirugikan akan menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua dan apabila pihak kedua dapat menanggapi dan memuaskan pihak pertama, maka selesailah

¹³ Komar Kantaatmadja, *Beberapa Hal Tentang Arbitrase*, Makalah Pada Penataran Hukum ekonomi Internasional, Fakultas Hukum UNPAD, 1989.

hubungan konflikktual tersebut. Sebaliknya apabila beda pendapat terus berkelanjutan maka terjadi apa yang disebut "**sengketa**".

Dalam situasi sengketa, perbedaan pendapat dan perdebatan yang berkepanjangan biasanya mengakibatkan kegagalan proses mencapai kesepakatan. Keadaan seperti ini biasanya berakhir dengan putusnya jalur komunikasi yang sehat sehingga masing-masing pihak mencari jalan keluar tanpa memikirkan nasib atau kepentingan pihak lainnya. Untuk adanya proses penyelesaian sengketa yang efektif, prasyarat bahwa hak didengar kedua belah pihak sama-sama diperhatikan harus terpenuhi. Dengan begitu baru dapat dimulai proses dialog dan pencarian titik temu (*common ground*) yang akan menjadi panggung dimana proses penyelesaian sengketa dapat berjalan.

Ada 3 (tiga) factor utama yang mempengaruhi dalam proses penyelesaian sengketa :

- Kepentingan (interest)
- Hak-hak (rights)
- Status kekuasaan (power)

Para pihak yang bersengketa ingin kepentingannya tercapai, hak-haknya dipenuhi serta ingin status kekuasaannya diperlihatkan, dimanfaatkan dan dipertahankan. Dalam proses penyelesaian sengketa pihak-pihak yang bersengketa lazimnya akan bersikeras untuk mempertahankan ketiga faktor tersebut diatas.

Dalam kaitan penyelesaian sengketa dilingkup dunia ekonomi, mengenal salah satu bentuk mekanisme penyelesaian sengketa di luar mekanisme penyelesaian melalui badan pengadilan (litigasi) yaitu "**Arbitrase**" dimana mekanisme penyelesaian sengketa tersebut dilakukan dengan bantuan pihak ketiga (arbiter) yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh para pihak. Bahwa mengingat dari seluruh mekanisme penyelesaian sengketa yang ada, ternyata proses litigasi dianggap sebagai paling tidak efisien oleh para pelaku dunia ekonomi komersial berkenaan dengan waktu dan biaya yang dibutuhkan.

Rendahnya kesadaran hukum juga turut mempengaruhi dimana para pihak yang berperkara di pengadilan bukan untuk mencari keadilan melainkan untuk memenangkan perkara, karenanya tidak jarang terdengar ada pihak yang tidak mau melaksanakan putusan pengadilan. **Yahya Harahap**¹⁴ menyebutkan beberapa faktor lain yang mengakibatkan pengadilan bersikap tidak responsive, kurang tanggap dalam merespon tanggapan umum dan kepentingan rakyat biasa serta kalangan miskin (*ordinary citizen*).

Hal yang paling utama adalah kemampuan hakim yang sifatnya generalis, hanya menguasai bidang hukum secara umum tanpa mengetahui secara detail mengenai suatu perkara halmana menjadi pertimbangan bagi tumpulnya badan pengadilan. Selain hal itu rumitnya proses pemeriksaan

¹⁴ **Yahya Harahap**, *Alternatif Dispute Resolution*, BPHN, Jakarta, hal.16

perkara di pengadilan dianggap tidak kondusif bagi kepentingan penyelesaian sengketa sehingga mengakibatkan lambatnya pengambilan keputusan. Atas dasar hal tersebut dalam dunia perdagangan berpaling pada "***Alternatif Dispute Resolution***" (ADR) sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (litigasi) karena keperluan perniagaan menghendaki penyelesaian sengketa yang cepat dan tidak menghambat iklim perniagaan sedangkan jika melalui lembaga peradilan justru dirasakan tidak dapat mengakomodasikannya.

Beberapa alasan tersebut, tampaknya menjadi alasan pembenar bagi terselenggaranya penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Dengan kata lain pengadilan (litigasi) hanya dijadikan sebagai pilihan terakhir (***last resort***) apabila mekanisme *non judikatif* (***first resort***) tidak mampu menyelesaikannya. Pilihan terhadap lembaga alternatif tersebut juga tampaknya didasarkan pada pertimbangan fleksibilitas yaitu tidak diharuskannya para pihak untuk mengikuti prosedur baku dalam ***Alternatif Dispute Resolution*** (ADR). Pihak ketiga yang dimintakan bantuannya untuk menyelesaikan sengketa tersebut tidak harus berpedoman pada prosedur beracara sebagaimana yang terjadi pada lingkup peradilan (litigasi).

1. Ruang Lingkup Arbitrase.

Sebagaimana telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, bahwa saat ini ada tendensi hampir disetiap kontrak dagang mencantumkan klausula penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang merupakan suatu cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dikarenakan bahwa pranata arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan dengan pranata peradilan yakni antara lain :

- a. dijaminnya kerahasiaan sengketa para pihak;
- b. dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif;
- c. para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang sengketakan, jujur dan adil;
- d. para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase; dan
- e. putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana ataupun langsung dapat dilaksanakan.

Gary Goodpaster, Felix O. Soebagjo, dan Fatmah Jatim¹⁵, dalam "Tinjauan terhadap Arbitrase Dagang Secara Umum dan Arbitrase Dagang di

¹⁵ Gary Goodpaster, Felix O. Soebagjo dan Fatimah Jatim, "Arbitrase di Indonesia; Beberapa Contoh Kasus dan Pelaksanaan dalam Praktik". Dalam Arbitrase di Indonesia, Jakarta Ghalia Indonesia, 1995.

Indonesia", didalam buku Arbitrase di Indonesia, disebutkan ada beberapa alasan memilih arbitrase dikarenakan faktor ; Kebebasan, kepercayaan dan keamanan, Keahlian (*expertise*), cepat dan hemat biaya, bersifat rahasia dan non preseden, kepekaan arbiter, pelaksanaan putusan, kecenderungan yang moderen.

Hampir senada, Sudargo Gautama¹⁶ dalam bukunya "Arbitrase Dagang Internasional", juga menyebutkan beberapa alasan yang menjadikan arbitrase demikian populer dalam transaksi-transaksi dagang internasional, antara lain :

- a. dihindarkannya publisitas;
- b. tidak banyak formalitas;
- c. bantuan pengadilan hanya pada taraf eksekusi;
- d. baik untuk pedagang-pedangan bonafide;
- e. ada jaminan dari perkumpulan-perkumpulan pengusaha;
- f. lebih murah dan lebih cepat.

Bahwa sekalipun semua kelebihan tersebut diatas tidak seluruhnya dapat menjamin proses penyelesaian sengketa secara cepat, namun penyelesaian sengketa melalui arbitrase oleh pengusaha masih lebih diminati daripada proses melalui litigasi, terutama untuk kontrak bisnis yang bersifat internasional.

¹⁶ Sudargo Gautama, *Arbitrase Dagang Internasional*, Bandung, Alumni, 1986.

"Arbitrase" yang berasal dari kata *arbitrare* (latin), *arbitrage* (Belanda), *arbitration* (Inggris), *Schiedspruch* (Jerman) dan *arbitrage* (Perancis) yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan atau damai oleh arbiter atau wasit.

Batasan Arbitrase sebagaimana dirumuskan oleh Abdulkadir Muhammad¹⁷ bahwa "Arbitrase adalah badan peradilan swasta di luar lingkungan peradilan umum, yang dikenal khusus dalam dunia perdagangan. Arbitrase adalah peradilan yang dipilih dan ditentukan sendiri secara sukarela oleh pihak-pihak pengusaha yang bersengketa. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan negara merupakan kehendak bebas pihak-pihak. Kehendak bebas ini dapat dituangkan dalam perjanjian tertulis yang mereka buat sebelum atau sesudah terjadi sengketa sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata" (Abdulkadir Muhammad, 1993:276).

Demikian halnya menurut Frank Elkoury dan Edna elkoury¹⁸ dalam bukunya "*How Arbitrase Works*" Woshington D.C. (1974), dikatakan bahwa Arbitrase adalah suatu proses mudah atau simple yang dipilih oleh para pihak secara suka rela yang ingin perkaranya diputus oleh juru pisah yang netral sesuai dengan pilihan mereka dimana keputusan mereka berdasarkan dalil-dalil dalam perkara tersebut.

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 1993.

¹⁸ M.Husseyin Umar dan A.Supriyani Kardono, *Hukum dan Lembaga Arbitrase Di Indonesia*, Komponen Hukum Ekonomi elips Project, 1995.

Merujuk pada pengertian arbitrase yang diberikan dalam pasal 1 angka 1 Undang Undang No.30 Tahun 1999, dapat dikemukakan bahwa :

- a. arbitrase merupakan salah satu bentuk perjanjian;
- b. perjanjian arbitrase harus dibuat dalam bentuk tertulis,
- c. perjanjian arbitrase tersebut merupakan perjanjian untuk menyelesaikan sengketa yang dilaksanakan di luar peradilan umum.

Berkenaan hal tersebut sesungguhnya yang namanya arbitrase itu bermacam ragam pengertian dan pengaturannya di setiap negara, namun dari pengertian arbitrase tersebut dapat ditarik beberapa karakteristik yuridis atas suatu arbitrase yakni :

1. Adanya kontroversi diantara para pihak.
2. Kontroversi tersebut diajukan kepada arbiter.
3. Arbiter diajukan oleh para pihak atau ditunjuk oleh badan tertentu.
4. Arbiter adalah pihak diluar badan peradilan umum.
5. Dasar pengajuan sengketa arbitrase adalah perjanjian.
6. Arbiter melakukan pemeriksaan perkara.
7. Setelah memeriksa perkara, arbiter akan memberikan putusan arbitrase tersebut dan mengikat para pihak.

Berdasarkan karakteristik juridis tersebut diatas jelas bahwa keberadaan arbitrase tidak lain didasarkan pada adanya kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam suatu perjanjian baik sebelum terjadinya

sengketa maupun setelah terjadi sengketa untuk menyelesaikan sengketa diluar peradilan umum. Sehingga atas dasar adanya kesepakatan penunjukkan arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa, maka salah satu pihak yang merasa dirugikan kepentingannya berhak untuk meminta proses penyelesaian sengketa tersebut dilakukan melalui prosedur arbitrase.

2. Perjanjian Arbitrase bersifat Asesor

Perjanjian arbitrase bukanlah perjanjian bersyarat atau *voorwaardelijke verbinten*is dan tidak termasuk pada pengertian ketentuan Pasal 1253-1267 KUHPdt. Oleh karena itu pelaksanaan perjanjian arbitrase tidak digantungkan kepada sesuatu kejadian tertentu dimasa yang akan datang. Perjanjian arbitrase tidak mempersoalkan masalah pelaksanaan perjanjian, tetapi hanya mempersoalkan masalah cara dan lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan (*disputes settlement*) atau *difference* yang terjadi antara pihak yang berjanji.

Fokus perjanjian arbitrase semata-mata ditujukan kepada masalah penyelesaian perselisihan yang timbul dari perjanjian. Disamping itu para pihak dapat menentukan kata sepakat agar penyelesaian perselisihan yang timbul dari perjanjian, tidak diajukan dan diperiksa oleh badan peradilan resmi tetapi akan diselesaikan oleh sebuah badan kuasa swasta yang bersifat netral yang lazim disebut "wasit" atau "arbitrase". Jika pada

perjanjian bersyarat yang lazim disebut *contractsbeding*, maka pelaksanaan dan pemenuhan perjanjiannya digantungkan pada suatu kejadian atau perbuatan di masa yang akan datang (*toekomstig*). Demikian pula syarat yang terdapat pada perjanjian bersyarat merupakan satu kesatuan yang tak terpisah dalam perjanjian, syarat dalam perjanjian bukan merupakan tambahan yang ditempelkan dalam perjanjian tetapi meliputi pokok atau materi perjanjian.

Lain halnya dengan perjanjian arbitrase, yang tidak melekat menjadi satu kesatuan dengan materi pokok perjanjian. Perjanjian arbitrase yang lazim disebut "**klausula arbitrase**" merupakan tambahan yang diletakkan pada perjanjian pokok, itu sebabnya mengapa disebut sebagai perjanjian "**Aesor**". Keberadaannya hanya sebagai tambahan kepada perjanjian pokok dan sama sekali tidak mempengaruhi pelaksanaan pemenuhan perjanjian. Artinya tanpa klausula arbitrase, pemenuhan perjanjian pokoknya tidak terhalang. Batal atau cacatnya perjanjian arbitrase tidak berakibat batal dan cacatnya perjanjian pokok. Sehingga dalam hal lumpuhnya perjanjian pokok ataupun pemenuhan terhadap perjanjian pokok dengan sendirinya klausula arbitrase tersebut akan hilang fungsinya. Dapat dilihat bahwa tanpa perjanjian arbitrase, perjanjian pokok dapat berdiri sendiri dengan sempurna, sebaliknya tanpa adanya perjanjian pokok para pihak tidak mungkin dapat mengadakan ikatan perjanjian arbitrase.

Bahwa sifat perjanjian arbitrase yang merupakan perjanjian *accessoir* dari perjanjian pokoknya, yang berarti perjanjian pokok menjadi dasar lahirnya klausula atau perjanjian arbitrase. Pelaksanaan perjanjian pokok tidak bergantung pada perjanjian arbitrase, sebaliknya pelaksanaan perjanjian arbitrase bergantung pada perjanjian pokoknya. Jika perjanjian pokok tidak sah, maka dengan sendirinya perjanjian arbitrase menjadi batal dan tidak mengikat para pihak. Dengan kata lain perjanjian arbitrase tidak bisa berdiri sendiri dan mengikat para pihak jika perjanjian arbitrase tidak berbarengan dengan perjanjian pokok. Perjanjian arbitrase ini dibuat dengan maksud menentukan cara dan pranata hukum yang akan menyelesaikan sengketa atau perselisihan yang timbul dalam perjanjian pokok.

Atas dasar hal tersebut jelas sudah bahwa perjanjian arbitrase merupakan perjanjian *asesor* yang berisi persyaratan khusus mengenai cara penyelesaian perselisihan yang timbul dari perjanjian pokok. Karena yang akan ditangani oleh perjanjian arbitrase adalah mengenai perselisihan-perselisihan yang timbul dari perjanjian pokok, sehingga bagaimana mungkin mengadakan ikatan perjanjian arbitrase jika perjanjian pokok tidak ada (M.Yahya Harahap, 1991:96)¹⁹. Itulah sebabnya mengapa disebut "**klausula arbitrase**" atau "***arbitration clause***" yang berisi cara penyelesaian sengketa melalui wasit atau arbiter, sehingga klausula arbitrase yang ditambahkan

¹⁹ M.Yahya Harahap, *Arbitrase*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1991, hal.96.

dalam perjanjian pada hakikatnya berada diluar isi atau materi perjanjian pokok.

3. Klausula Arbitrase merupakan "*Pacta Sunt Servanda*".

Bahwa makna *Pacta Sunt Servanda*, dimana kata *pacta* berasal dari kata *pactum* (latin) yang berarti *agreement* atau perjanjian. Sehingga dari perkataan *pactum*, lahir ungkapan *pacta sunt servanda* yang kemudian berkembang dan diangkat menjadi kaidah hukum yang mengandung makna "setiap perjanjian yang sah (*legal agreement*) mengikat kepada para pihak, oleh karena itu para pihak wajib menaatinya". Lebih lanjut makna tersebut dipertegas lagi bahwasanya semua persetujuan yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, oleh karena itu harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Jika makna tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara , serta dikaitkan dengan perjanjian, maka terdapat asas yang yang sangat esensial untuk diterapkan yang menentukan kewenangan yurisdiksi arbitrase yakni :

- setiap perjanjian adalah mengikat kepada para pihak,
- kekuatan mengikatnya serupa dengan kekuatan undang-undang,
- hanya dapat ditarik atas kesepakatan bersama para pihak.

Berkenaan dengan klausula arbitrase yang merupakan persetujuan atau kesepakatan yang dituangkan para pihak dalam perjanjian, maka asas-asas yang terkandung dalam *pacta sunt servanda* dan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata, berlaku sepenuhnya terhadap perjanjian arbitrase.

Acuan penerapannya bahwa:

- persetujuan arbitrase mengikat secara mutlak kepada para pihak,
- oleh karena itu apabila timbul sengketa dari apa yang telah mereka perjanjikan, kewenangan untuk menyelesaikan dan memutus sengketa "mutlak" menjadi kewenangan badan arbitrase,
- dengan demikian, pengadilan tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa secara mutlak, dan
- gugurnya klausula arbitrase hanya terjadi apabila secara tegas ditarik kembali atas kesepakatan para pihak, serta
- tidak dibenarkan hukum, penarikan secara diam-diam apalagi penarikan secara sepihak atau secara unilateral.

Atas dasar hal tersebut sejak para pihak mengadakan perjanjian arbitrase, maka para pihak secara mutlak telah terikat. Kemutlakan keterikatan kepada perjanjian arbitrase ini, dengan sendirinya mewujudkan kewenangan absolut badan arbitrase untuk menyelesaikan atau memutus sengketa yang timbul dari perjanjian. Adapun gugurnya kewenangan mutlak badan arbitrase untuk menyelesaikan dan memutus sengketa arbitrase, hanya dapat dibenarkan apabila para pihak sepakat dan

setuju menarik kembali secara tegas perjanjian arbitrase. Sehingga ada tidaknya eksepsi yang diajukan dalam hal gugat sengketa senyatanya diajukan ke pengadilan, pengadilan harus tunduk menyatakan diri tidak berwenang untuk mengadili.

Bertolak belakang dari aliran *pacta sunt servanda* ini yang justru menganggap bahwa klausula arbitrase bukan publik orde (*niet van openbaar orde*), dimana penarikan klausula arbitrase dapat dibenarkan secara diam-diam, bahkan dapat ditarik secara sepihak dengan jalan mengajukan gugat sengketa ke pengadilan. Sehingga apabila salah satu pihak telah mengajukan gugat sengketa ke pengadilan, dan pihak lawan tidak mengajukan eksepsi, dianggap klausula arbitrase “gugur” dan kewenangan mengadili sengketa yang timbul menjadi kewenangan pengadilan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang Undang No.30 Tahun 1999, yang secara tegas dinyatakan bahwa “Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase”, hal ini membuktikan bahwasanya penerapan klausula arbitrase dalam suatu perjanjian secara juridis adalah merupakan “*Pacta Sunt Servanda*”. Artinya para pihak yang tanpa adanya paksaan sepihak telah sepakat untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dilakukan melalui badan arbitrase. Dengan demikian Pengadilan dalam hal adanya gugat sengketa yang

memuat klausula arbitrase, wajib tanpa harus ada eksepsi menyatakan diri untuk tidak berwenang memeriksa dan memutus sengketa arbitrase.

B. LANDASAN HUKUM ARBITRASE DI INDONESIA

Di Indonesia sebenarnya arbitrase sudah dikenal dalam peraturan perundang-undangan sejak berlakunya hukum acara perdata Belanda, yaitu sejak mulai berlakunya *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv). Sungguhpun begitu secara institusional sejarah perkembangan arbitrase kita mendapatkan momentumnya dengan terbentuknya Badan Arbitrase Nasional pada tanggal 3 Desember 1977 (Munir Fuady, 2000:27)²⁰.

Semula arbitrase diperuntukkan bagi penduduk golongan Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan itu, yang pengaturannya terdapat dapat *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* = B.Rv atau Rv, yang merupakan hukum perdata bagi golongan Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan itu dengan Raad van Justitie dan Residentie-gerecht sebagai badan peradilannya.

Sebagai pedoman aturan umum arbitrase yang dianut dalam Reglement Acara Perdata, meliputi lima bagian pokok :

- Bagian Pertama (615-623) : Persetujuan arbitrase dan pengangkatan arbitor atau arbiter.

²⁰ Munir Fuady, *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal.27.

- Bagian Kedua (624-630) : Pemeriksaan dimuka badan arbitrase.
- Bagian Ketiga (631-640) : Putusan Arbitrase.
- Bagian Keempat (641-647) : Upaya-upaya terhadap putusan arbitrase
- Bagian Kelima (647-651) : Berakhirnya acara acara arbitrase.

Bahwa kemudian hukum acara perdata golongan penduduk Bumiputera dan Timur Asing, lembaga arbitrase ini dapat dipergunakan pula oleh golongan penduduk Bumiputera dan Timur Asing dalam menyelesaikan perselisihannya. Ketentuan Pasal 377 HIR atau Pasal 705 Rbg menentukan bahwa jika orang Bumiputera atau Timur Asing menghendaki perselisihan mereka diputuskan oleh juru pisah atau arbiter, maka mereka wajib menuruti peraturan pengadilan perkara yang berlaku bagi orang Eropa.

Bahwa dalam Rv, antara lain terdapat ketentuan diperkenankan kepada siapa saja yang terlibat dalam suatu sengketa yang mengenai hak-hak yang berada dalam kekuasaannya untuk melepaskan, untuk menyerahkan pemutusan sengketa tersebut kepada seorang atau beberapa orang arbiter. Bahkan diperkenankan mengikatkan diri satu sama lain untuk menyerahkan sengketa-sengketa yang mungkin timbul dikemudian hari kepada pemutusan seorang atau beberapa orang arbiter.

Sejalan dengan isi aturan pada Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, maka ketentuan hukum kolonial masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dan atau belum diatur dalam Undang

Undang Dasar 1945. Dengan belum adanya pengaturan tersendiri terhadap arbitrase tersebut maka hukum acara perdata kitapun dengan sendirinya masih bersumber pada Reglemen Acara Perdata (*Reglement op de Rechtsvordering, Staatblad, 1847:52*), Reglemen Indonesia yang diperbaharui (*Het Herziene Indonesisch Reglement Staatblad, 1941:44*) dan Reglemen Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Rechtsreglement Buitengewesten Staatblad, 1927:227*). Ketentuan dalam Rv tersebut yang dipakai sebagai dasar pemeriksaan arbitrase di Indonesia.

Bahwa dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang diserahkan kepada badan peradilan, berpedoman pada Undang Undang No.14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No.35 Tahun 1999, merupakan induk dan kerangka umum yang meletakkan dasar dan asas peradilan serta pedoman bagi lingkungan peradilan yang masing-masing diatur dalam undang-undang tersendiri. Sebelumnya melalui Undang Undang No.1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, pernah disinggung soal arbitrase atau perwasitan. Pada Pasal 15 dan dihubungkan Pasal 108 ditentukan bahwa Mahkamah Agung juga memutuskan pada tingkat kedua atau putusan wasit yang ternyata mengenai nilai harga dua puluh lima rupiah atau lebih. Demikian halnya menurut Pasal 39 dan penjelasannya dari Undang Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dikatakan bahwa Mahkamah Agung dapat diserahi tugas dan kewenangan lain

berdasarkan undang-undang misalnya arbitrase. Dengan demikian nampak bahwa undang-undang yang mengatur mengenai Mahkamah Agung sudah memberikan dasar hukum arbitrase di Indonesia.

Bahwa sistematika aturan arbitrase yang terdapat dalam Reglement Acara Perdata yang wajib dituruti dan pada saat itu dianggap sudah mencukupi kebutuhan praktek. Akan tetapi memperhatikan laju pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha dan lalu lintas di bidang perdagangan, baik nasional maupun internasional serta perkembangan hukum pada umumnya yang semakin cepat dan beraneka ragam, ketentuan arbitrase tersebut dirasakan sudah tidak mengakomodir lagi, sehingga perlu dipikirkan dan diusahakan pembangunan dan pembaharuan hukum di bidang arbitrase yang lebih utuh dan terpadu, meliputi segala segi yang menyangkut arbitrase asing yang diputus diluar negeri. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa ketentuan tentang arbitrase yang diatur dalam Reglemen Hukum Acara Perdata (Rv), belum meliputi hal-hal yang berkenaan dengan pengakuan dan eksekusi putusan arbitrase asing. Bahkan mengenai masalah upaya banding atas putusan arbitrase yang diatur dalam Pasal 615 Rv bisa menimbulkan ketidak-pastian hukum. Demikian pula mengenai masalah pemeriksaan apakah mesti bersifat audit et alteram partem yang merupakan asas yang bersifat imperatif. Sifat imperatifnya sampai meliputi keharusan para pihak mesti hadir atau diwakili dalam forum arbitrase, sehingga benar-benar tercipta suatu forum yang memberi kesempatan yang pantas dan layak

kepada masing-masing pihak untuk membela dan mempertahankan kepentingannya.

Atas dasar pertimbangan tersebut maka diwujudkan dalam Undang Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang Undang ini selain mengatur mengenai arbitrase, juga mengatur mengenai pilihan penyelesaian sengketa lainnya. Adapun falsafah yang melatar belakangi pengesahan Undang-Undang No.30 Tahun 1999 yakni :

- a. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyelesaian sengketa disamping dapat diajukan ke peradilan umum juga *terbuka kemungkinan* diajukan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa;
- b. Bahwa peraturan perundang-undangan yang kini berlaku untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase sudah *tidak sesuai lagi* dengan perkembangan dunia usaha dan hukum pada umumnya;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan-alasan tersebut, maka perlu membentuk Undang-undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Dengan berlakunya ketentuan Undang Undang No.30 Tahun 1999, maka dengan sendirinya ketentuan-ketentuan yang mengatur arbitrase yang ada dinyatakan tidak berlaku lagi, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 81 yang berbunyi :

"Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, ketentuan mengenai arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 615 sampai Pasal 651 Reglemen Acara Perdata (*Reglement op de Rechtsvordering, Staatblad, 1847:52*) dan Pasal 377 Reglemen Indonesia yang diperbaharui (*Het Herziene Indonesisch Reglement, Staatblad 1941:44*) dan Pasal 705 Reglemen Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Rechtsreglement Buitengewesten, Staatblad, 1927:227*), dinyatakan tidak berlaku"

C. PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA ARBITRASE

Secara umum dapat dikatakan bahwa jalannya pemeriksaan sengketa arbitrase oleh lembaga Arbitrase tidak akan jauh berbeda dengan jalannya proses pemeriksaan perkara dalam pranata peradilan pada umumnya. Proses jalannya pemeriksaan tersebut akan meliputi antara lain acara yang dipergunakan, bahasa yang dipakai, system pembuktian yang diterapkan, hak-hak para pihak dalam proses pemeriksaan, serta alur jalannya pemeriksaan itu sendiri yang dimulai dari sejak permohonan untuk pemeriksaan sengketa diajukan hingga pada akhirnya dijatuhkan suatu putusan pada tingkat akhir yang mengikat para pihak yang meminta penyelesaian perselisihan atau sengketa mereka dilakukan melalui pranata arbitrase tersebut.

Undang-undang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan sendiri acara dan proses arbitrase yang akan digunakan dalam pemeriksaan sengketa. Artinya dalam pelaksanaan prosedur Arbitrase, prinsipnya dapat diatur atau ditentukan sendiri oleh para pihak. Namun dalam hal tidak ditentukan oleh para pihak maka prosedur tersebut akan ditentukan oleh para arbiter apabila para pihak telah setuju untuk mengajukan sengketa kepada Arbiter, BANI atau Badan Klausula Arbitase telah diperjanjikan bahwa sengketa yang timbul akan diselesaikan oleh arbiter menurut prosedur BANI, maka penyelesaian tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Prosedur Arbitrase yang telah ditetapkan BANI, yang mulai berlaku sejak Desember 1977. BANI memiliki kewenangan untuk menyatakan bahwa surat permohonan penyelesaian sengketa dapat diterima atau tidak dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari. Permohonan dinyatakan tidak dapat diterima, apabila perjanjian yang menyerahkan putusan sengketa kepada arbiter/badan arbitrase atau klausula arbitrase tersebut dianggap tidak cukup untuk dijadikan dasar kewenangan BANI untuk memeriksa sengketa yang diajukan itu.

Dalam kerangka pelaksanaan proses pemeriksaan sengketa arbitrase, diawali dengan penyampaian surat tuntutan oleh pemohon. Penegasan ini disebutkan dalam Pasal 38 Undang Undang No.30 Tahun 1999, antara lain menyatakan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh arbiter atau majelis arbitrase, pemohon harus menyampaikan surat

tuntutannya kepada arbiter atau majelis arbitrase. Proses penyampaian surat tuntutan dimaksud sejalan dengan Pasal 1 Peraturan Prosedur Arbitrase pada BANI, menyebutkan bahwa, "Prosedur Arbitrase dimulai dengan didaftarkan surat permohonan untuk mengadakan arbitrase, dalam register BANI, oleh sekretaris".

Selanjutnya dalam Pasal 2 (1) menyebutkan persyaratan surat permohonan harus memuat :

- a. Nama lengkap dan tempat tinggal (tempat kedudukan) kedua belah pihak;
- b. Suatu uraian singkat tentang duduknya sengketa;
- c. Apa yang dituntut.

Segera setelah menerima surat tuntutan dari pemohon, arbiter atau ketua majelis arbitrase akan menyampaikan satu salinan surat tuntutan tersebut kepada termohon. Penyampaian surat tuntutan tadi dengan disertai perintah bahwa termohon harus menanggapi dan memberikan jawabannya secara tertulis dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya salinan tuntutan oleh termohon. Dalam hal pihak termohon tidak menyampaikan jawabannya maka arbiter atau majelis arbiter wajib memanggil termohon hadir dipersidangan arbitrase yang ditetapkan dalam jangka waktu 24 (empat belas) hari terhitung mulai dikeluarkannya surat perintah pemanggilan.

Selanjutnya dalam Pasal 2 (2) dinyatakan bahwa pada surat permohonan harus dilampirkan salinan dari masalah atau akta perjanjian

yang secara khusus menyerahkan pemutusan sengketa kepada Arbitrase atau badan

Arbitrase atau perjanjian yang memuat klausula Arbitrase, yaitu ketentuan-ketentuan yang menetapkan bahwa sengketa yang timbul dari perjanjian tersebut akan diputus oleh arbiter atau badan arbitrase.

Pada prinsipnya acara arbitrase dilakukan secara tertulis, artinya pihak pemohon harus mengajukan surat tuntutan secara tertulis kepada arbiter atau majelis arbitrase, demikian halnya dengan pihak termohon juga akan memberikan jawaban dalam bentuk tertulis. Namun demikian berdasarkan Pasal 36 (2) Undang Undang No.30 Tahun 1999, memberikan kemungkinan pemeriksaan sengketa dalam arbitrase dilakukan secara lisan. Pemeriksaan secara lisan ini dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan, yaitu :

- a. apabila disetujui oleh para pihak yang bersengketa; atau
- b. apabila hal itu dianggap perlu oleh arbiter atau majelis arbitrase.

Selanjutnya dalam hal suatu surat permohonan yang diajukan oleh seorang juru kuasa, maka surat kuasa khusus untuk mengajukan permohonan tersebut harus dilampirkan pula. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 29 (2) Undang Undang No.30 Tahun 1999, kita dapat mengetahui kalau pemberian kuasa tersebut harus dilakukan secara tertulis, bentuknya tertulis yang berisikan pemberian kuasa secara khusus untuk mewakili kepentingan salah satu pihak yang bersengketa. Pemberian kuasa dalam

bentuk tertulis yang dinamakan Surat Kuasa Khusus (*bijzondere schriftelijke machtiging*) ini dianggap paling baik dan sempurna. Walaupun dalam Pasal 123 (1) HIR/Pasal 147 (1) Rbg yang memperkenankan pemberian kuasa untuk mengurus perkara di pengadilan secara lisan, namun khusus untuk arbitrase disyaratkan pemberian kuasa dilakukan secara tertulis (Bandingkan M.Yahya Harahap, 1991:210)²¹.

Tentang syarat-syarat formal yang harus dipenuhi surat kuasa khusus di depan sidang arbitrase, juga mengikuti ketentuan yang berlaku di depan sidang pengadilan. Syarat formal dimaksud adalah hal-hal yang mesti tercantum dalam surat kuasa meliputi mencantumkan identitas para pihak yang berperkara, mencantumkan objek dan kasus yang disengketakan dan menyebut di depan arbitrase mana sengketa yang akan diselesaikan (M.Yahya Harahap, 1991:211)²². Salah satu hal-hal tidak dimuat dalam kuasa khusus tersebut menyebabkan surat kuasa menjadi tidak sah, sehingga berakibat pemegang kuasa tidak sah bertindak sebagai kuasa mewakili kepentingan pemberian kuasa.

Selanjutnya sesuai Pasal 2 (3) dalam surat permohonan tersebut pemohon dapat menunjuk (memilih) seorang arbiter atau menyerahkan penunjukan arbitrase itu kepada Ketua BANI. Demikian halnya dengan yang tersurat dalam Pasal 5 (2) menyebutkan bahwa dalam jawaban tersebut si termohon harus pula menunjukan (memilih)

²¹ M.Yahya Harahap *Op.Cit*, hal.210

²² M.Yahya Harahap *Op.Cit* hal.211

seorang arbiter atau menyerahkan penunjukan arbiter itu kepada ketentuan BANI. Penunjukan arbiter sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan UU No.30 Tahun 1999, dapat dilakukan dengan beberapa cara yakni :

a. Penunjukan oleh para pihak.

Penunjukan cara ini dapat berdasarkan pada akta compromitendo dimana para pihak menunjuk arbiternya dalam kontrak atau perjanjian sebelum terjadinya sengketa, ataupun kedalam suatu akta compromise dimana penunjukan arbiternya ditentukan dalam suatu kontrak khusus untuk itu yang dibuat setelah terjadinya sengketa.

b. Penunjukan oleh hakim.

Cara lain dalam pengangkatan atau penunjukan arbiter adalah dengan meminta bantuan hakim atau Ketua Pengadilan Negeri untuk menunjuk arbiter atau majelis arbitrase, jika para pihak tidak mencapai kesepakatan dalam penunjukan arbiter (vide Pasal 13, 14 (3), Pasal 15 (4) UU No.30 Tahun 1999).

c. Penunjukan oleh Lembaga Arbitrase.

Disamping cara tersebut pada huruf a dan b diatas, maka dalam hal para pihak tidak berhasil menentukan arbiternya, kemungkinan lainnya adalah dengan meminta lembaga arbitrase untuk menyusun suatu majelis arbitrase atau arbiter tunggal. Penunjukan arbiter tunggal harus mendapat

persetujuan kedua belah pihak, sebaliknya untuk penunjukan majelis arbitrase maka jumlah arbiter yang dipilih sebanyak 3 (tiga) orang dimana para pihak terlebih dahulu menunjuk 2 (dua) orang arbiter yang mewakili masing-masing pihak dan selanjutnya para arbiter tersebut berwenang memilih dan menunjuk arbiter ketiga yang diangkat sebagai ketua majelis arbitrase.

Lebih lanjut dalam Pasal 2 (4) dinyatakan bahwa Pendaftaran tidak akan dilakukan oleh sekretaris apabila biaya-biaya pendaftaran dan administrasi/pemeriksaan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan tentang biaya Arbitrase belum dibayar lunas oleh pemohon.

Pasal 3 UU NO. 30 TAHUN 1999, menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.

Berkenaan hal diatas, dalam Pasal 3 (1) disebutkan bahwa, "BANI akan menyatakan permohonan tidak dapat diterima, apabila perjanjian yang menyerahkan keputusan sengketa kepada arbiter/badan arbitrase atau klausula arbitrase tersebut diatas dianggapnya tidak cukup untuk dijadikan dasar kewenangan BANI untuk memeriksa sengketa yang diajukan itu".

Bahwa sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya mengenai hal-hal yang menurut hukum dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Sedangkan terhadap sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah meliputi :

- a. Pemberian dan hibah untuk biaya hidupnya, tempat tinggal dan sandang.
- b. Perceraian.
- c. Status hukum seseorang.
- d. Kepentingan anak dibawah umur dan
- e. Sengketa lainnya yang menurut peratruran perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian.

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (1) tidak terpenuhi maka putusan tentang tidak dapat diterimanya permohonan arbitrase tersebut diberitahukan kepada si pemohon dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari. Bila hal ini terjadi maka, biaya pemeriksaan dikembalikan kepada pemohon Pasal 3 (3).

Sejalan hal tersebut dalam Pasal 4 dinyatakan bahwa :

1. Dalam hal para pihak telah menyetujui bahwa sengketa diantara mereka akan diselesaikan melalui arbitrase dan para pihak telah memberikan wewenang, maka arbiter berwenang menentukan dalam putusannya apa yang merupakan hak dan kewajiban para pihak jika hal ini tidak atau tidak cukup diatur dalam perjanjian mereka.
2. Persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimuat dalam suatu dokumen yang ditanda tangani oleh para pihak.

Ayat ini menentukan syarat arbitrase harus dilaksanakan oleh para pihak secara tertulis dimaksudkan untuk menghindarkan timbulnya persoalan, apakah para pihak memang telah mengadakan persetujuan untuk menyelesaikan persengketaan antara mereka melalui arbitrase atau tidak atau untuk lebih menjamin kepastian.

Dalam Pasal 4 (1) menyebutkan bahwa. "Apabila perjanjian Arbitrase atau klausula arbitrase menunjuk BANI sebagai badan arbitrase yang akan memutus sengketa atau apabila dengan tegas disebutkan bahwa pemutusan akan dilakukan oleh sesuatu badan arbitrase menurut Peraturan Prosedur BANI, maka sengketa akan diperiksa dan diputus menurut ketentuan-ketentuan berikut ".

Adalah diperbolehkan bahwa BANI atas persetujuan kedua belah pihak memeriksa dan memutusi suatu sengketa dengan memakai ketentuan-ketentuan prosedur yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut. Persetujuan yang dimaksud harus diadakan dengan tegas dan tertulis.

Pasal 5 (1) menyebutkan, "Apabila perjanjian yang menyerahkan pemutusan sengketa kepada arbiter atau Badan Arbitrase ataupun klausula arbitrase dianggapnya sudah mencukupi, maka ketua BANI mengeluarkan perintah untuk menyampaikan salinan dari surat permohonan kepada si termohon, disertai perintah untuk menanggapi permohonan

tersebut dan memberikan jawabannya secara tertulis dalam waktu tiga puluh hari. Apabila termohon menjawab surat tuntutan pemohon tersebut, maka arbiter atau ketua majelis arbitrase wajib untuk segera setelah diterimanya jawaban termohon menyerahkan salinan dimaksud kepada pemohon dan bersamaan dengan itu arbiter atau majelis arbitrase akan memerintahkan kepada kedua belah pihak atau kuasanya untuk menghadap di muka sidang arbitrase yang ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung mulai dikeluarkannya perintah pemanggilan itu.

Lebih lanjut sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 13 disebutkan bahwa :

1. Apabila kedua belah pihak datang menghadap, maka terlebih dahulu majelis akan mengusahakan tercapainya suatu perdamaian.
2. Apabila usaha tersebut berhasil, maka majelis akan membuatkan suatu akte perdamaian dan menghukum kedua belah pihak untuk memenuhi perdamaian tersebut.
3. Apabila usaha untuk mencapai perdamaian tidak berhasil, maka BANI akan meneruskan pemeriksaan terhadap pokok sengketa yang dimintakan keputusan itu.

Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 perintah pemanggilan untuk datang menghadap tidak dipenuhi tanpa suatu sebab oleh termohon, maka selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari kepadanya

akan dilakukan panggilan kembali, namun jika panggilan kedua tersebut termohon tetap tidak juga datang tanpa alasan yang sah padahal kepadanya telah dipanggil secara patut, pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya termohon dan tuntutan pemohon akan dikabulkan kecuali tuntutan tersebut oleh majelis arbitrase dianggap tidak berdasarkan hukum atau keadilan.

Selanjutnya jika atas pemanggilan menghadap, kedua belah pihak hadir maka kepadanya dipersilahkan menjelaskan pendirian masing-masing serta mengajukan bukti-bukti yang oleh mereka dianggap perlu untuk menguatkan pendiriannya tersebut.

Sengketa arbitrase hanya dapat diselesaikan bila disertai dengan bukti-bukti, artinya tuntutan hanya akan dikabulkan oleh arbiter atau majelis arbitrase bila para pihak bersengketa dapat membuktikan tuntutannya tersebut dengan cara mengajukan sejumlah alat-alat bukti sebagai pendukungnya. Meskipun dalam Undang Undang No.30 Tahun 1999 tidak mengatur secara khusus alat-alat bukti yang sah yang dipergunakan dalam pemeriksaan arbitrase, akan tetapi dengan perpedoman pada system pemeriksaan arbitrase harus dilakukan secara tertulis, disamping bukti-bukti lainnya yang diatur dalam hukum acara perdata.

Sejalan dengan proses pemeriksaan pembuktian, dalam peraturan prosedur BANI Pasal 14 yang mengatur tentang pembuktian yang dianggap sah digunakan untuk membuktikan *statement of claim* dari *claimant*

atau *statement of defence* dari pihak respondent, hanya mensyaratkan alat buktinya berupa :

- alat bukti keterangan para pihak dalam bentuk pengakuan;
- alat bukti keterangan saksi, dan
- alat bukti keterangan ahli.

Adapun terhadap alat bukti surat atau dokumen tidak disinggung secara tegas-tegas, meskipun demikian dari rumusan keterangan ayat (1) yakni "serta mengajukan bukti-bukti yang oleh mereka dianggap perlu", maka pengertian alat bukti yang dianggap perlu untuk membuktikan dalil atau bantahan yang dibenarkan dalam kehidupan praktek dan perundang-undangan di Indonesia adalah termasuk alat bukti surat, persangkaan (*vermoeden*) dan alat bukti sumpah .

Selain alat bukti dokumentasi, alat bukti lainnya yang ditekankan oleh Undang Undang No.30 Tahun 1999 adalah keterangan yang diperoleh dari saksi dan saksi ahli baik atas prakarsa para pihak maupun oleh arbiter atau majelis arbitrase sendiri, untuk didengar keterangannya. Secara khusus pemeriksaan saksi dan saksi ahli diatur dalam Undang Undang No.30 Tahun 1999, dimana pada prinsipnya dikatakan bahwa pemeriksaan saksi dan saksi ahli di hadapan arbiter atau majelis arbitrase diselenggarakan menurut cara dan ketentuan yang diatur dalam hukum acara perdata. Ini berarti bahwa tata cara pemeriksaan saksi dan saksi ahli dalam arbitrase

mengikuti atau sama dengan tata cara pemeriksaan saksi dan saksi ahli yang diatur dalam hukum acara perdata kita, terkecuali diadakan secara khusus.

Sebelum memberikan keterangan, para saksi maupun ahli dapat disumpah terlebih dahulu, bahwa mereka hanya akan menerangkan apa yang mereka ketahui dengan sungguh-sungguh. Untuk itu keterangan yang diberikan saksi haruslah berisikan keterangan mengenai suatu peristiwa yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri, bukan suatu rekaan dari saksi serta menyebut segala sebab pengetahuan saksi.

Adapun pendapat maupun dugaan khusus yang diperoleh karena berpikir, bukanlah suatu kesaksian. Syarat kesaksian yang demikian itu diatur dalam Pasal 171 HIR/197 Rbg/Pasal 1907 KUHPerdata. Selain hal tersebut kesaksian yang diberikan oleh seorang saksi harus didukung oleh alat bukti lainnya paling tidak suatu kesaksian disampaikan oleh 2 (dua) orang dan satu sama lain saling berhubungan. Ini sejalan dengan isi pasal 169 HIR/306 RBg/177 Rv yang menyatakan bahwa keterangan seorang saksi saja dengan tidak ada bukti lain tidak dapat dipercayai didalam hukum (*unus testis nullus testis*).

Mengenai saksi ahli Pasal 50 Undang-Undang No.30 tahun 199, mengatur mengenai kesaksian saksi ahli untuk dimintakan keterangannya secara tertulis mengenai suatu persoalan khusus yang berhubungan dengan pokok sengketa. Keterangan ahli yang diwujudkan dalam bentuk tertulis isinya bukanlah suatu kesaksian, melainkan berisikan

pendapat atau penilaian tertentu terhadap suatu persoalan khusus yang diminta oleh arbiter atau majelis arbitrase ataupun para pihak yang berhubungan erat dengan pokok sengketa arbitrase. Sifatnya tidak mengikat arbiter atau majelis arbitrase, tetapi hanya sebagai bahan bagi arbiter atau majelis arbitrase untuk memutus sengketa arbitrase yang bersangkutan. Arbiter atau majelis arbitrase bisa sependapat atau juga tidak sependapat dengan keterangan yang diberikan saksi ahli tersebut. Fungsi utama keterangan ahli dimaksud adalah untuk lebih membuat terang atas dasar keahliannya mengenai suatu hal/perkara yang sedang diperiksa di muka pengadilan. Namun demikian pada dasarnya siapa saja mempunyai kewajiban memberikan kesaksian baik diminta maupun tidak diminta oleh forum pengadilan atau arbitrase, asalkan dirinya mampu melakukan perbuatan hukum.

Selanjutnya dalam proses pemeriksaan sengketa arbitrase, pemeriksaan dimuka sidang arbitrase dilakukan dengan "pintu tertutup", berbeda dengan sidang pemeriksaan peradilan perdata yang pada prinsipnya dilakukan secara terbuka untuk umum kecuali dalam hal tertentu. Ini berarti persidangan pemeriksaan pengadilan dilakukan dibawah pengawasan publik, sehingga diharapkan dapat menjamin lahirnya pengadilan yang jujur, adil dan bersih.

Lain halnya dengan proses pemeriksaan arbitrase, semua pemeriksaan yang dilakukan oleh arbiter atau majelis arbitrase dilakukan

secara tertutup tanpa ada kecualinya. Prinsip tertutup ini ditegaskan dalam Pasal 27 Undang Undang No.30 Tahun 1999, bahwa semua pemeriksaan sengketa oleh arbiter atau majelis arbitrase dilakukan secara tertutup. Sifat kerahasiaan ini cenderung menjadi pilihan utama bagi kalangan usahawan yang tidak menginginkan masyarakat umum mengetahui adanya perselisihan, sengketa atau bahkan perkara perdata yang dialami oleh usahanya dengan pihak lain yang juga merupakan mitra usahanya (Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, 2000:79)²³.

Pelaksanaan sidang arbitrase yang dilakukan secara tertutup inilah yang merupakan salah satu "kelebihan" perbedaan dari lembaga arbitrase terhadap lembaga peradilan pada umumnya.

Walaupun secara analogis dibolehkan pemeriksaan secara terbuka untuk umum, asal hal tersebut atas persetujuan kedua belah pihak. Prinsip pemeriksaan dengan pintu tertutup tampaknya bersifat "*imperatif*". Artinya prinsip tersebut tidak boleh dilanggar, akibatnya bisa fatal dimana pemeriksaan dan putusan akan menjadi batal demi hukum atau null and void sehingga sengketa harus diperiksa ulang kembali dengan pintu tertutup. Sekiranya pemeriksaan dilakukan secara terbuka untuk umum namun para pihak diam tidak mengajukan keberatan, maka hal tersebut dapat ditafsir sebagai persetujuan diam-diam. Namun jika salah satu pihak saja yang

²³ Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hal, 79

mengajukan keberatan, tetap mengakibatkan pemeriksaan dan putusan menjadi batal demi hukum.

Selanjutnya dalam proses pemeriksaan selama belum dijatuhkan putusan, pemohon dapat mencabut permohonannya, namun apabila sudah ada jawaban dari si termohon maka pencabutan itu hanya diperbolehkan dengan persetujuan termohon. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan termohon agar tidak dirugikan sebagai akibat dicabutnya surat permohonan arbitrase tersebut.

Adanya perubahan maupun penambahan terhadap tuntutan arbitrase hanya diperbolehkan dengan persetujuan termohon arbitrase. Itupun yang boleh dilakukan adalah sepanjang perubahan atau penambahan yang menyangkut hal-hal yang bersifat fakta saja. Sedangkan yang menyangkut *onderwerp van den eis*, yakni isi tuntutan dan dasar-dasar hukum yang menjadi dasar tuntutan. Dua hal ini yang tidak diperkenankan untuk diubah atau ditambah, berupa isi dan dan dasar hukum tuntutan (vide Pasal 47 (2) Undang Undang No.30 Tahun 1999).

Sekalipun dimungkinkannya melakukan perubahan ataupun penambahan tersebut namun dalam ketentuan Undang Undang Arbitrase tidak diatur lebih lanjut mengenai batas-batas perubahan atau penambahan surat tuntutan arbitrase yang diperbolehkan. Ini berarti bahwa arbiter atau majelis arbitrase yang bersangkutan, yang akan menilai dan menentukan batas-batas

perubahan atau penambahan tuntutan arbitrase yang diperbolehkan dan tidak merugikan kepentingan pihak termohon arbitrase.

Sejalan hal tersebut dalam hal majelis arbitrase menganggap pemeriksaan telah cukup, maka ketua akan menutup pemeriksaan itu dan menetapkan suatu hari sidang untuk mengungkapkan putusan yang akan diambil oleh majelis. Pengucapan putusan arbitrase dilakukan dalam sidang tertutup, 1 (satu) bulan setelah ditutupnya pemeriksaan.

Putusan arbitrase merupakan suatu putusan yang diberikan oleh arbitrase ad hoc maupun lembaga arbitrase atas suatu perbedaan pendapat, perselisihan paham maupun persengketaan mengenai suatu pokok persoalan yang lahir dari suatu perjanjian dasar (yang memuat klausula arbitrase) yang diajukan pada arbitrase ad hoc maupun lembaga arbitrase untuk diputuskan olehnya (Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, 2000:93)²⁴.

Disamping memberikan putusan arbitrase arbiter atau majelis arbitrase dapat pula memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian. Dengan diberikannya pendapat oleh lembaga arbitrase, maka kedua belah pihak terikat padanya sebagaimana halnya suatu perjanjian. Bila diantara para pihak bertindak bertentangan dengan pendapat yang diberikan arbiter atau majelis arbitrase, maka pihak yang bersangkutan dianggap melanggar perjanjian atau wanprestasi (ingkar janji). Atas dasar hal tersebut dapat dikatakan bahwa putusan maupun

²⁴ Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani. *Op.Cit* Hal.93

pendapat arbitrase berisikan pernyataan yang diucapkan arbiter atau majelis arbitrase yang berbentuk tertulis. Pernyataan arbiter atau majelis arbitrase tersebut akan berbentuk putusan arbitrase bila didalamnya terdapat unsur sengketa, sedangkan kalau pernyataan arbiter atau majelis arbitrase tersebut dituangkan dalam bentuk pendapat arbitrase bilamana isinya tidak terdapat unsur sengketa. Dengan kata lain dalam putusan arbitrase terdapat sengketa diantara para pihak terhadap suatu perjanjian (kontrak), sebaliknya dalam pendapat arbitrase tidak terdapat sengketa tadi.

Berkenaan hal-hal diatas, salah satu wujud pelembagaan arbitrase adalah bertujuan untuk dapat menyelesaikan sengketa dalam jangka waktu yang relatif singkat, dan sedapat mungkin dalam tempo singkat perselisihan tersebut sudah dapat diputus oleh arbiter atau majelis arbitrase. Dan dalam rangka mempercepat proses penyelesaian sengketa oleh arbiter diperlukan batasan jangka waktu penyelesaiannya, sehingga dalam batas jangka waktu yang telah ditentukan tersebut, arbitrase mesti sudah menyelesaikan sengketa (M. Yahya Harahap, 1991;225)²⁵.

Penentuan batas jangka waktu sebagaimana dirumuskan pada Pasal 48 dihubungkan dengan Pasal 31 (3) Undang Undang No.30 Tahun 1999, akan ditentukan oleh para pihak dengan tidak boleh melebihi dari 180 (seratus delapan puluh) hari atau 6 (enam) bulan terhitung sejak arbiter atau majelis

²⁵ M. Yahya Harahap. *Op. Cit.*, hal.225

arbitrase terbentuk. Penentuan batas waktu dimaksud adalah untuk menjamin kepastian waktu penyelesaian pemeriksaan arbitrase itu sendiri.

Demikian halnya dalam ketentuan Rv melalui Pasal 620 (1) juga mengatur dua jenis batas waktu pemeriksaan yaitu yang ditentukan oleh para pihak dan batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang yakni 6 (enam) bulan terhitung sejak arbiter atau majelis arbitrase terbentuk.

Sebenarnya penentuan batas waktu yang disebutkan baik dalam ketentuan Undang Undang No.30 Tahun 1999 maupun yang terdapat dalam Rv, merupakan batas waktu pemeriksaan sengketa yang cukup lama. Terkecuali dalam hal tertentu, batas waktu pemeriksaan sengketa melalui arbitrase dapat diperpanjang oleh arbiter atau majelis arbitrase bilamana perpanjangan tersebut diperlukan dan itupun harus dengan persetujuan para pihak yang bersengketa.

Berdasarkan Pasal 33 Undang Undang No.30 Tahun 1999, dalam hal proses pemeriksaan dipandang belumlah cukup, dimungkinkan untuk memperpanjang jangka waktunya dalam hal :

- a. diajukan permohonan perpanjangan pemeriksaan oleh salah satu pihak mengenai hal khusus tertentu, misalnya karena adanya gugatan antara atau gugatan insidentil diluar pokok sengketa seperti permohonan jaminan sebagaimana dimaksud dalam hukum acara perdata;

- b. sebagai akibat ditetapkannya putusan provisional atau putusan sela lainnya; atau
- c. apabila dianggap perlu oleh arbiter atau majelis arbitrase untuk kepentingan pemeriksaan. Perpanjangan pemeriksaan ini dilakukan demi memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Dalam ketentuan Rv, juga diatur kemungkinan penundaan dan perpanjangan batas waktu pemeriksaan arbitrase jika terdapat 2 (dua) hal yang bisa mengakibatkan perpanjangan jangka waktu pemeriksaan yakni karena adanya perkara yang bersifat pidana yang berhubungan dengan sengketa yang sedang diperiksa oleh arbiter atau majelis arbitrase dan karena adanya tindakan sementara yang diambil arbiter atau majelis arbitrase. Adanya tindakan sementara ini bukan hanya menunda batas waktu pemeriksaan sengketa melainkan memberikan hak pula kepada arbiter atau majelis arbitrase untuk memperpanjang batas waktu pemeriksaan yang telah ditetapkan berhubungan dengan putusan akhir yang akan mereka berikan.

Selanjutnya dengan merujuk isi Pasal 56 Undang Undang No.30 Tahun 1999, seorang arbiter atau para arbiter dalam mengambil putusannya harus didasarkan pada :

1. Ketentuan hukum,

Ketentuan hukum yang dimaksud adalah terbatas pada ketentuan dan peraturan hukum yang berhubungan dengan bidang yang

dipersengketakan dengan memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam kehidupan atau kegiatan ekonomi, social politik, agama dan moral. Arbiter atau majelis dalam putusannya sedapat mungkin tidak boleh menyimpang dari dalil dan petitum yang dituntut oleh pemohon. Arbiter tidak dapat memutus se bebas yang dimiliki hakim dalam forum pengadilan, tetapi terikat pada ketentuan hukum yang diatur dalam perundang-undangan kecuali para pihak telah sepakat bahwa putusan boleh didasarkan atas *compositeur atau ex aquo et bono*. Selama tidak ada ditegaskan dalam perjanjian arbitrase, arbitrase tidak memiliki kebebasan untuk memutus berdasarkan *compositeur* (M. Yahya Harahap, 1991;3000)²⁶

Selanjutnya berdasarkan Pasal 56 (2) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, menegaskan bahwa para pihak berhak menentukan pilihan hukum yang akan berlaku terhadap penyelesaian sengketa yang mungkin atau telah timbul diantara para pihak. Ini berarti para pihak yang bersengketa diberi keleluasaan oleh undang-undang menentukan sendiri hukum mana yang akan diterapkan dalam proses arbitrase, dengan syarat tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, ketertiban umum dan kepatutan. Namun apabila para pihak tidak dapat menentukan lain, maka hukum yang diterapkan adalah hukum tempat arbitrase dilakukan.

²⁶ M. Yahya Harahap. *Op. Cit* Hal.3000

2. Atau sesuai dengan keadilan dan kepatutan.

Pada dasarnya arbiter dalam memutus perkara wajib berdasarkan ketentuan hukum. Ini berarti bahwa, arbiter tidak dapat memutus berdasarkan keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*). Suatu putusan yang didasarkan pada keadilan dan kepatutan hanya dapat diambil oleh arbiter bila ada pihak dalam perjanjiannya dengan tegas menyebut bahwa para pihak memberi kuasa atau kewenangan kepada arbiter untuk memberikan putusan yang demikian. Sebaliknya dalam hal arbiter tidak diberi kuasa yang demikian maka arbiter hanya dapat memberi putusan berdasarkan kaidah hukum materiel sebagaimana dilakukan oleh hakim.

Atas dasar pertimbangan dalam penjatuhan putusan tersebut diatas dan sejalan dengan ketentuan pada Pasal 54 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, suatu putusan arbitrase setidaknya-tidaknya berisikan hal-hal sebagai berikut :

a. Kepala putusan,.

Seperti halnya dengan keputusan-keputusan pengadilan, maka dalam putusan arbitrase kepala putusan dibubuhkan irah-irah dengan kata-kata ***"Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"***, yang memberikan kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

b. Identitas para pihak yang bersengketa.

Dalam putusan arbitrase, pihak-pihak yang bersengketa yakni pemohon dan termohon harus disebut secara jelas nama dan alamatnya, termasuk nama lengkap dan kedudukan kuasa hukumnya bila pemohon dan termohon menguasakan pada orang lain untuk menyelesaikan sengketa arbitrasenya.

c. Duduk Sengketa (posita)

Putusan arbitrase harus menguraikan secara singkat dan jelas apa yang menjadi duduk perkara atau pokok sengketa diantara para pihak yang dapat diambil dari surat tuntutan pemohon, jawaban termohon, dan hal-hal lain yang disampaikan dalam sidang pemeriksaan beserta alat-alat bukti yang diajukan kedua belah pihak. Pada bagian ini arbiter belm memberikan pendapat.

d. Pendirian para pihak.

Pada bagian ini berisikan uraian yang lengkap dan jelas mengenai pendirian para pihak.

e. Identitas para arbiter.

Putusan arbitrase harus pula menyebut secara jelas dan lengkap nama dan alamat arbiter, termasuk tempat kedudukan lembaga arbiternya.

f. Pertimbangan dan kesimpulan.

Memuat dasar-dasar pertimbangan yang melahirkan kesimpulan penyelesaian sengketa arbitrase. Arbiter atau majelis arbitrase

mempunyai kewajiban memberikan pertimbangan terhadap semua fakta-fakta hukum yang ada mengenai keseluruhan sengketa, tanpa kecuali.

g. Pendapat arbiter.

Juga dalam putusan arbitrase harus diuraikan secara lengkap dan jelas pendapat tiap-tiap arbiter, jika terdapat perbedaan pendapat dalam majelis arbitrase.

h. Amar putusan

Untuk mengakhiri persengketaan atau perselisihan diantara para pihak, arbiter atau majelis harus membuat pernyataan hukum yang harus dilaksanakan para pihak dalam suatu jangka waktu tertentu, yang merupakan amar atau dictum putusan. Amar putusan ini mesti ada dalam setiap keputusan arbitrase, sifatnya adalah mengikat dan tidak dapat dikesampingkan oleh para pihak dengan suatu perjanjian.

i. Tempat dan tanggal putusan.

Selain adanya amar dictum putusan dalam putusan arbitrase, juga disebutkan tempat putusan ditetapkan oleh arbiter atau majelis arbitrase. Pada umumnya tempat kedudukan arbiter atau majelis arbitrase dianggap sebagai tempat putusan ditetapkan. Selain itu juga dicantumkan hari dan tanggal putusan, karena ini penting berkaitan dengan batas waktu pelaksanaan putusan dan upaya-upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak.

j. Tanda tangan arbiter atau majelis arbitrase.

Setiap putusan arbitrase harus ditanda-tangani oleh arbiter atau majelis arbitrase, sebab putusan arbitrase yang tidak ditanda-tangani akan berakibat hukum putusan menjadi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan berlakunya. Apabila hanya salah seorang arbiter saja tidak menanda-tangani putusan dengan alasan sakit atau meninggal dunia, maka hal itu tidak mempengaruhi kekuatan berlakunya dengan syarat arbiter lainnya menanda-tangani putusan arbitrase yang bersangkutan. Untuk itu dalam putusan arbitrase harus disebut alasan tentang tidak adanya tanda tangan arbiter tersebut.

Sehubungan dengan masalah amar putusan, perlu diperhatikan beberapa asas doktrin yang tidak boleh dilanggar. Pelanggaran terhadapnya dianggap merupakan pelanggaran tertib beracara dan bisa mengakibatkan putusan batal. Asas-asas tersebut antara lain :

a. Amar tidak boleh melampaui apa yang diminta.

Pada prinsipnya, amar putusan menyesuaikan dengan petitum. Dengan kata lain pengabulan atas apa yang diminta dalam gugat tidak boleh melebihi apa yang dimintakan dalam petitum. Dalam hal ini amar terikat pada patokan asas *ultra petitum partum*. Maksudnya apa-apa yang dirinci dan dinyatakan dalam amar paling maksimum sebatas yang diminta dalam petitum. Sekiranya pun dari hasil pemeriksaan terbukti apa yang

disengketakan melebihi petitum, amar putusan tetap membatasi diri hanya sebesar atau sejumlah yang diminta dalam petitum. Demikian halnya terhadap petitum yang hanya berisikan pernyataan hukum yang bersifat *declaratoir*, maka amar putusanpun hanya dirumuskan secara deklaratif, tidak boleh ditambah dengan amar yang bersifat *condemnatoir*.

Berkenaan hal tersebut dalam hal suatu gugatan yang menuntut ganti rugi karena wanprestasi atau ingkar janji, namun dalam petitumnya lupa atau tidak mencantumkan hal yang sifatnya *condemnatoir* yang menuntut agar respondent dihukum membayar ganti rugi dimaksud, maka sebenarnya terlepas dari asas *ultra petitum partium* tersebut perlu diterobos sepanjang mengenai kebolehan menjatuhkan amar putusan yang bersifat *condemnatoir* meskipun hal itu tidak ada dimintakan dalam petitum. Kebolehan semacam itu tidaklah bertentangan dengan hukum, sebab jika memang benar-benar pihak *claimant* hanya menghendaki putusan yang amarnya bersifat *declaratoir*, kemudian dalam amar putusannya bersifat *condemnatoir*, cukup mendiampkannya tak perlu meminta lagi eksekusi.

b. Tidak boleh mencampurkan petitum primair dengan subsidair.

Asas lain yang tidak boleh dilanggar adalah putusan tidak boleh mencampur baurkan petitum primair dengan subsidair dalam amar putusan. Amar putusan tidak boleh mengambil sebagian dari petitum primair dan yang sebagian lagi dari petitum subsidair. Dalam hal gugatan yang diajukan *claimant* mengandung petitum primair dan subsidair dan masing-masing

petitum dirumuskan secara rinci dan jelas, arbiter atau majelis arbitrase boleh memilih dapat mengabulkan petitum primair atau subsidair, tetapi tidak boleh :

- mengabulkan primair dan subsidair sekaligus secara berbarengan, dan
- juga tidak boleh mengabulkan sebagian primair digabung dengan sebagian subsidair.

Pengabulan petitum primair yang berbarengan dengan petitum subsidair maupun mencampur-aduk antara petitum primair dan subsidair dapat menjadi tumpang tindih, bahkan dimungkinkan tidak dapat dilaksanakannya eksekusi. Sebab sekiranya sama-sama dikabulkan, berakibat tidak ada kepastian hukumnya.

c. Dilarang memuat amar berdasar *ex aequo et bono* jika tidak disepakati.

Pada dasarnya Pasal 631 Rv menggariskan putusan harus berdasarkan peraturan hukum positif. Petitum yang tidak berdasar pada hukum positif tidak dapat dijadikan amar putusan. Sekalipun dimungkinkan memutus berdasarkan *ex aequo et bono* atau *compositeur*, namun kebolehan yang demikian itu dimungkinkan apabila para pihak menghendaki, dan kehendak itu mereka cantumkan secara tegas-tegas dalam perjanjian arbitrase. Sehingga meskipun pihak *claimant* mengajukan petitum subsidair yang berbentuk rumusan *ex aequo et bono* sebagai lapis petitum primair, tidak mutlak arbiter atau majelis arbitrase mengabulkan gugat dengan amar

berdasar pada "*ex aequo et bono*", tetapi harus diperiksa terlebih dahulu apakah hal itu ada atau tidak mereka cantumkan secara tegas dalam perjanjian. Jika hal tersebut dicantumkan barulah hal tersebut secara formal bernilai sebagai petitum subsidair dan boleh diajukan sebagai landasar alternatif memutus sengketa, tetapi jika tidak dicantumkan maka tidak diperbolehkan memutus sengketa berdasar pada *ex aequo et bono*.

Agar supaya suatu putusan arbitrase dapat dilaksanakan, maka putusan arbitrase tersebut harus dideponir terlebih dahulu dalam akta pendaftaran dikepaniteraan Pengadilan Negeri. Yang dideponir adalah putusan arbitrase, tujuannya agar terhadap putusan dapat dimintakan eksekusi, apabila para pihak tidak mau melaksanakan putusan arbitrase dimaksud secara suka rela. Selama belum dilakukan deponir eksekusi tidak dapat dimintakan oleh pihak yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri.

Bahwa penentuan batas jangka waktu deponir menurut Rv sebagaimana tersurat dalam Pasal 634 (1) dibedakan berdasarkan factor lingkungan wilayah yakni :

- untuk lingkungan wilayah pulau Jawa-Madura, batas jangka deponir adalah 14 hari, terhitung sejak tanggal putusan;
- sedang untuk lingkungan diluar Jawa-Madura, pendeponiran adalah 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan.

Sedangkan menurut ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Arbitrase, jangka waktu tersebut adalah paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan oleh arbiter atau majelis arbitrase. Pendeponiran putusan arbitrase bersifat "*imperatif*" sekaligus untuk memenuhi syarat formal permintaan eksekusi. Adapun kewajiban pendeponiran putusan dibebankan :

- kepada salah seorang anggota arbiter, atau
- kepada seorang kuasa yang bertindak atas nama para anggota arbitrer.

Dengan demikian maka kewajiban dan tanggung-jawab pendeponiran tersebut bukan dibebankan kepada para pihak atau kepada pihak claimant, tetapi menjadi tugas dan tanggung jawab para anggota arbiter. Seperti yang telah dikemukakan, bahwa pendeponiran merupakan salah satu syarat formal permohonan eksekusi. Jika para arbiter lalai melakukan, sehingga pihak yang berkepentingan tidak dapat meminta permohonan eksekusi, kelalaian tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan kewajiban hukum yang dibebankan kepada para arbiter dan sekaligus kelalaian pendeponiran memberikan hak kepada pihak yang berkepentingan untuk menuntut ganti kerugian berdasarkan alasan perbuatan melawan hukum.

Tanggung-jawab resiko atas adanya tuntutan ganti kerugian tidak dapat dilepaskan kepada salah seorang arbiter atas alasan telah ditunjuk salah

seorang untuk melakukannya tetapi sifat resiko tanggung-renteng tersebut harus ditanggung oleh para arbiter. Bila tindakan deponir terhadap putusan tidak dipenuhi, maka berakibat putusan arbitrase yang bersangkutan tidak dapat dilaksanakan. Tindakan deponir putusan arbitrase bukan hanya merupakan tindakan pendaftaran yang bersifat administrative belaka, tetapi telah bersifat konstitutif dalam arti merupakan satu rangkaian dalam mata rantai proses arbitrase, dengan resiko tidak dapat dieksekusi putusan jika tidak dilakukan pendeponir tersebut (**bandingkan Munir Fuady, 2000;162**)²⁷.

Selain putusan akhir dari suatu arbitrase, *apakah suatu arbitrase dapat memberikan putusan sela (putusan provisi, interim award) ?*.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 32 (1) Undang Undang No.30 Tahun 1999, disebutkan bahwa " Atas permohonan salah satu pihak, arbiter atau majelis arbiterase dapat mengambil putusan provisional atau putusan sela lainnya untuk mengatur ketertiban jalannya pemeriksaan sengketa termasuk penetapan sita jaminan, memerintahkan penitipan barang kepada pihak ketiga, atau menjual barang yang mudah rusak.

Dari rumusan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa apabila ada alasan-alasan untuk itu, maka putusan sela dapat dilakukan. Alasannya misalnya untuk dapat efektif dan efisiennya pelaksanaan suatu putusan

²⁷ Munir Fuady. *Op.Cit*, hal.162

arbitrase atau untuk mengatur ketertiban jalannya acara pemeriksaan, seperti halnya dalam hal :

- a. untuk penetapan sita jaminan,
- b. perintah penitipan barang yang mudah rusak,
- c. perintah penjualan barang yang mudah rusak.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN TERHADAP BANDING ATAS PUTUSAN ARBITRASE

A. Hasil Penelitian

Dari penelitian yang penulis lakukan berdasarkan perolehan data sekunder, bahan hukum primer yakni berupa putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung tertentu, berkenaan dengan permohonan banding atas putusan arbitrase, maka dapat disajikan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Putusan No. 1; Banding/wasit/1981 dalam perkara antara : PT Multi Plaza Properties versus Yahya Widjaja.

- Bahwa pembanding telah mengajukan pemeriksaan ulangan terhadap putusan wasit No. 01/VII/PAR/80 tanggal 15 Desember 1980 pada pokoknya berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut :
- Bahwa pemohon asli adalah pemilik gedung pusat pertokoan/perkantoran (shopping center) yang dikenal dengan nama "Glodok Plaza" terletak di Jalan Pinangsia Raya Jakarta; dan termohon asli Yahya Wijaya adalah penyewa dari sebuah ruangan pertokoan No. 65 Blok. A lantai II di gedung Glodok Plaza tersebut;
- Bahwa termohon asli telah ingkar janji, tidak melakukan pembayaran dan pelunasan angsuran-angsuran uang sewa ke-4,5, dan 6 seperti

[UPT-PUSTAK-UNDIP]

yang telah diperikatkan semula dalam akte pengikatan sebagai suatu perikatan pendahuluan yang kemudian hari akan ditingkatkan menjadi perjanjian sewa-menyewa di hadapan notaris;

- Bahwa sebaliknya dari permohonan asli akan memperoleh tambahan pembayaran uang sewa berikut pembayaran-pembayaran denda ingkar janji dan lain-lain pembayaran sebagai akibat pemutusan hubungan sewa-menyewa, termohon asli dengan sangat ganjil telah mengajukan seorang arbiter Kami Kresno Widagdo, SH. Untuk memeriksa/memutuskan tuntutan pengembalian berupa angsuran uang sewa, berikut ganti rugi.
- Bahwa karena pemohon asli tidak merasa berhutang pada termohon asli, surat pemberitahuan wasit kami Kresno Widagdo, SH tersebut tidak dijawab secara tertulis, tetapi secara lisan;
- Bahwa wasit kami Kresno Widagdo, SH. Terus melakukan sidang arbitrase sebagai wasit tunggal yang memutuskan/mengabulkan tuntutan termohon asli tersebut;
- Bahwa surat keputusan wasit tersebut tidak wajar dan melawan hukum yaitu :
 - a) Pada satu pihak wasit bertindak sebagai "wasit" yang memberitahukan telah dibuatnya Keputusan Wasit tersebut dan telah didaftarkan Keputusan Wasit tersebut pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; dan

b) Pada pihak lain wasit telah bertindak sebagai kuasa atau bertindak untuk mewakili kepentingan dan termohon/pihak kedua;

- Bahwa berdasarkan Pasal 15 dan Pasal 103 s/d III UU. I/1950 pemohon/pihak pertama dalam waktu 1 bulan setelah mendapat pemberitahuan keputusan Wasit PP – 16, berhak mengajukan pemeriksaan ulangan kepada Ketua Mahkamah Agung dalam sengketa perwasitan;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon asli menuntut agar Mahkamah Agung memberikan putusan sebagai berikut :
 1. Membatalkan status Wasit a quo;
 2. Menolak tuntutan/gugatan termohon/pihak kedua, setidaknya menyatakan tuntutan/gugatan termohon/pihak kedua tidak dapat diterima;
 3. Menyatakan termohon/pihak kedua, telah ingkar janji dan melakukan perbuatan melawan hukum;
 4. Menghukum termohon/pihak kedua untuk membayar kepada pemohon/pihak pertama kekurangan atau penggantian biaya-biaya/ongkos-ongkos sewa, pajak penjualan, biaya perawatan, listrik, meterai, denda angsuran, dengan biaya perawatan dan pembatalan dan biaya administrasi sebesar Rp. 2.761.216 (dua juta tujuh ratus enam puluh satu dua ratus enam belas rupiah);

5. Menghukum termohon/pihak kedua untuk membayar ongkos-ongkos perkara;

Menimbang, bahwa menurut surat-surat yang terdapat dalam berkas ini keputusan wasit No. 01/XII/PAR/80 tanggal 15 Desember 1980 telah diletakan di Kepaniteraan Pengadilan Jakarta Pusat pada tanggal 23 Desember 1980 kemudian diberitahukan kepada pembanding/semua pihak pertama pada tanggal 24 Desember 1980. Sedangkan pembanding/semula pihak pertama telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Januari 1981, maka sesuai Pasal 15 jo Pasal 108 UU. No. 1/1950 tentang Susunan, Kekuasaan dan jalan pengadilan Mahkamah Agung RI permohonan banding tersebut harus dinyatakan diterima ;

Memperhatikan jawaban tanggal 26 Juni 1982 atas permohonan banding keputusan wasit No. 01/XII/PAR/80 tanggal 15 Desember 1980 yang diajukan oleh banding/semula pihak kedua;

Menimbang, bahwa kata-kata permohon/pihak pertama dalam permohonan pemeriksaan ulangan tersebut harus dibaca sebagai pembanding semula pihak pertama sedangkan kata-kata termohon/pihak kedua harus dibaca sebagai terbanding/semula pihak kedua;

Bahwa selanjutnya mengenai alasan-alasan banding yang diajukan oleh pembanding/semula pihak pertama, menurut pendapat

Mahkamah Agung alasan-alasan tersebut tidak dapat diperhatikan, karena ternyata menurut Pasal 13 alinea terakhir akte pengikatan tanggal 18 Maret 1977 "Keputusan Panitia Arbitrase merupakan keputusan terakhir yang mengikat untuk semua pihak, demikian juga mengenai biaya-biaya arbitrase itu";

Bahwa hal ini berarti para pihak telah bersepakat terhadap putusan panitia arbitrase tidak dapat diajukan banding (Pasal 461 Rv. yo Pasal 77 R.I.D), oleh karena mana permohonan banding terhadap putusan panitia arbitrase tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka permohonan banding yang diajukan oleh pemohon: PT Multi Plaza Properties tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Memperhatikan UU No. 14 tahun 1970, UU No. 1 tahun 1950 dan UU No. 13 tahun 1965 serta Reglement Indonesia yang dibaharui.

Menyatakan, bahwa permohonan banding dari pemohon banding; PT. MULTI PLAZA PROPERTIES tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum pembanding membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini sebanyak Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);

Komentar Penulis :

Bertolak uraikan kasus diatas dapat penulis kemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa pengajuan banding pada pokoknya dikarenakan putusan arbitrase dianggap telah merugikan kepentingan pemohon, dimana

didalilkan bahwa justru pihak termohon yang telah ingkar janji tidak menyelesaikan kewajibannya selaku penyewa kepada pemohon sebagaimana telah diperjanjian dalam akta pengikatan.

2. Bahwa sebagaimana didalilkan Mahkamah Agung dalam pertimbangannya mendasarkan pendiriannya pada Pasal 13 alinea terakhir yang tersurat dalam Akta Pengikatan tanggal 18 Maret 1977 dimana "Keputusan Panitia Arbitrase merupakan keputusan terakhir yang mengikat untuk semua pihak, demikian juga mengenai biaya-biaya arbitrase itu". Sehingga dengan klausula tersebut yang berarti para pihak telah bersepakat terhadap putusan panitia arbitrase tidak dapat diajukan banding (Pasal 461 Rv yo Pasal 77 RID). Oleh karenanya permohonan banding tersebut oleh Mahkamah Agung harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa terlepas pertimbangan Mahkamah Agung diatas, penulis menilai dan berpendapat apakah telah cukup hanya dengan mendasarkan klausula pada Pasal 13 tersebut sehingga Pengadilan *in casu* Mahkamah Agung serta merta menyatakan bahwa putusan arbitrase dimaksud tidak dapat dibanding, sedangkan berdasar pada ketentuan Pasal 643 Rv yang secara tegas memberikan upaya hukum perlawanan atau tuntutan pembatalan terhadap putusan arbitrase bilamana dalam putusan tersebut terbukti mengandung hal-hal sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 643 Rv.

Sehingga atas dasar adanya upaya hukum yang diberikan oleh undang-undang kepada pihak yang merasa dirugikan berkenaan suatu putusan arbitrase yang tidak dapat dibanding, hal ini sebenarnya justru dapat menjadi dasar pertimbangan bagi Pengadilan in casu Mahkamah Agung guna memeriksa materi putusan arbitrase tersebut apakah terbukti atau tidaknya hal-hal sebagaimana diuraikan dalam permohonan banding yang diajukan oleh pemohon sehingga suatu putusan arbitrase dimaksud berakibat hukum dapat dinyatakan sebagai tidak sah/batal. Hal ini mengingat sebagaimana didalilkan oleh pemohon dalam permohonannya bahwa putusan arbitrase dimaksud hanya diputus oleh seorang arbiter tunggal sehingga tidak menutup kemungkinan dapat saja pemeriksaan arbitrasenya merugikan kepentingan Pemohon banding semula termohon. Disamping itu apakah benar dalam proses pemeriksaan telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku seperti halnya dengan melakukan pemanggilan yang patut dan wajar.

Berkenaan hal diatas, tanpa mengurangi kewenangan lembaga arbitrase sebagai institusi alternatif dalam penyelesaian sengketa diluar pengadilan, hemat penulis sekalipun atas adanya klausula dimaksud hal ini tidaklah serta merta menjadikan alasan bagi pengadilan untuk menyatakan ketidak-berwenangnya pengadilan memeriksa dan memutuskan apakah suatu putusan arbitrase tersebut

benar-benar telah mencerminkan rasa keadilan bagi kedua belah pihak serta telah berdasar pada ketentuan hukum yang berlaku.

2) Putusan Mahkamah Agung tanggal 5 September 1957 dalam perkara antara Indonesia Cotton Trading Co LTD versus Firma Rayun;

- Bahwa dari surat tersebut ternyata bahwa Firma Rayun sebagai pihak penggugat dan Indonesia Cotton Trading Co Ltd, sebagai pihak tergugat telah meminta kepada panitia arbitrase dan organisasi ekportieur hasil bumi Indonesia (OEHI), di Jakarta untuk memberi arbitrase mengenai perselisihan antara kedua belah pihak dan bahwa oleh pihak penggugat dituntut agar supaya pihak tergugat dihukum untuk membayar kepada pihak lawannya uang sejumlah Rp. 124.051,13 ditambah dengan bunga atas biaya-biaya arbitrase ini.
- Bahwa terhadap tuntutan tersebut panitia arbitrase OEHI di Jakarta telah mengambil keputusan pada tanggal 29 April 1959, yang dictumnya berbunyi sebagai berikut :
 - "Menghukum pihak tergugat untuk membayar kepada penggugat dengan menerima bukti pembayaran yang sah, uang sebesar Rp. 121.809,50 (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus sembilan rupiah lima puluh sembilan sen), ditambah dengan

bunga enam persen setahunnya dihitung mulai tanggal 12 Nopember 1958 sampai hari dipenuhi semuanya;

- menolak tuntutan penggugat mengenai selainnya;
- menghukum penggugat dan pihak tergugat untuk membayar biaya-biaya arbitrase ini, sampai serta penyimpanan keputusan ini pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Jakarta seluruhnya berjumlah Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah), yakni penggugat sebesar Rp. 150. (seratus lima puluh rupiah) dan pihak tergugat sebesar Rp. 7350 (tujuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
- Memerintahkan penggugat untuk membayar kepada OEHI seluruh biaya-biaya arbitrase ini, sebesar Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Menghukum pihak tergugat untuk membayar kembali pihak tergugat dengan menerima bukti pembayaran yang syah, bagian dari pada biaya-biaya arbitrase ini yang harus dibayar oleh pihak tergugat sebesar Rp. 7.350 (tujuh ribu tigaratus lima puluh rupiah);
- Bahwa putusan arbitrase ini telah diberitahukan oleh kedua belah pihak yang berperkara pada tanggal 30 April 1959;
- Bahwa sesudah menerima keputusan arbitrase itu terhadapnya oleh tergugat dengan perantaraan kuasanya khusus telah mengajukan permohonan untuk pemeriksaan banding dengan syarat yang diterima

di kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 1 Juni 1959, surat mana sekaligus memuat alasan-alasan permohonannya;

- Bahwa terlebih dahulu harus dipertimbangkan soal apakah permintaan banding ini material dapat diterima atau tidak;
- Bahwa pada umumnya menurut Pasal 108 (2) UU Mahkamah Agung Indonesia terhadap perkara ini dapat dimohonkan banding;
- Bahwa akan tetapi menurut syarat-syarat umum buat penjualan hasil bumi [Pasal 2 (2)] dan Reglement Panitia Arbitrase OEHI [Pasal 8 (3)], yang dipakai oleh dan berlaku antara kedua belah pihak pada waktu persetujuan yang bersangkutan dibuat, keputusan arbitrase tidak akan dapat dibanding;
- Bahwa hal demikian ini tidaklah bertentangan dengan Pasal 108 (2) Undang-undang Mahkamah Agung tersebut atau dengan sesuatu peraturan tentang ketertiban umum;
- Bahwa berdasarkan semua itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- Memperhatikan pasal-pasal UU yang bersangkutan dan Pasal 120 UU Mahkamah Agung RI;
- Menyatakan bahwa banding dari pembanding INDONESIA COTTON TRADING CO LTD tersebut tidak dapat diterima;

Komentar Penulis :

1. Bahwa pertimbangan Mahkamah Agung yang mendasarkan amar putusan menyatakan permohonan banding Indonesia Cotton Trading Co Ltd tidak dapat diterima, dikarenakan sesuai syarat-syarat umum buat penjualan hasil bumi [Pasal 2 (2)] dan Reglement Panitia Arbitrase OEHI [Pasal 8 (3)], yang dipakai oleh dan berlaku antara kedua belah pihak pada waktu persetujuan yang bersangkutan dibuat, keputusan arbitrase tidak akan dapat dibanding.
2. Bahwa sebagaimana telah penulis uraikan pada kasus pertama diatas, tanpa mengurangi pertimbangan Mahkamah Agung yang mendasarkan putusannya dimaksud serta tidak jelasnya bukti-bukti pendukung berkenaan dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon, namun hemat penulis adalah merupakan suatu keputusan yang tidak mencerminkan keadilan dan terciptanya kepastian hukum jika pertimbangan semata-mata didasarkan pada klausula arbitrase dimaksud sehingga mengesampingkan hak para pihak untuk mengajukan perlawanan sekalipun secara tegas telah dinyatakan dalam perjanjian yang disepakati kedua belah pihak. Bukankah oleh undang-undang (Rv) senyatanya telah memberikan upaya hukum bagi para pihak untuk mengajukan perlawanan/tuntutan pembatalan terhadap suatu putusan arbitrase.

3. Berkenaan hal tersebut diatas terlepas adanya klausula dimaksud, adalah wajar dan beralasan hukum bagi pengadilan in casu Mahkamah Agung untuk kemudian menilai dan mempertimbangkan kembali terhadap bukti-bukti yang diajukan berkenaan dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon, mengingat putusan Mahkamah Agung sebagai putusan yang pertama dan terakhir dimana sudah tidak ada upaya hukum apapun lagi yang dapat diajukan atas putusan tersebut.

3. **Putusan Perdata Nomor : 401/Pdt/G/2001/PNUKT.BAR Tentang pembatalan putusan Arbitrase Ad-Hoc Nomor : 01/X/AD-HOC/2001.**

Pihak-pihak yang berperkara :

PT. JAYA NUR SUKSES yang memberikan kuasa kepada Alexius Tantrajaya, SH dan Danny Darmawan, SH yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

1. PT. HUTAMA KARYA (Pesero) yang selanjutnya disebut sebagai TERMOHON I.
2. Tn Mohammad Salim, SH yang selanjutnya disebut sebagai TERMOHON II.
3. Tn. Ir. Harianto Sunidja, Msc. Phd, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON III.
4. Tn Soegiharto, SH yang selanjutnya disebut sebagai TERMOHON IV.

Tentang duduknya perkara adalah sebagai berikut :

Bahwa telah terjadi sengketa antara Pemohon dengan Termohon I mengenai pelaksanaan pekerjaan pembangunan proyek Chrysant Tower Apartemen Rajawali Jakarta Pusat, berdasarkan akta Perjanjian Kerjasama No. 75 tanggal 29 Juli 1996 dihadapan Notaris Sugiri Kadarisman, SH di Jakarta dengan konsep pendanaan pembangunan sistem "*Turn Key Project*" (Pembayaran dilakukan setelah prestasi kerja mencapai 95 % dengan ditandatanganinya berita acara serah terima proyek 1), dengan masa waktu pembangunan selama 15 bulan yakni dimulai dari tanggal 15 Juli 1996 sampai berakhir tanggal 15 Oktober 1997, dan oleh karena sampai batas waktu perjanjian ternyata pembangunan proyek Chrysant Tower tersebut belum selesai, maka terjadilah sengketa antara Pemohon dan Termohon I, dan berdasarkan Pasal 24 (2) Akta No. 75 untuk penyelesaian sengketa tersebut dilakukan Arbitrase Ad-Hoc.

Bahwa tidak selesainya pekerjaan Pemohon (Kami Termohon I) sesuai dengan waktu yang diperjanjikan adalah dikarenakan adanya pengurangan pekerjaan sebanyak 8 Lantai yang semula 47 lantai menjadi 39 lantai dan juga terjadinya krisis Moneter yang dimulai bulan Juli 1997 yang berdampak pada kenaikan harga-harga bangunan yang sangat tinggi dan tertutupnya sumber pembiayaan proyek dari Bank.

Walaupun masa pembangunan telah terlewati namun Pemohon (kini Termohon I) dan Termohon (kini Pemohon) secara bersama-sama membuat persetujuan tambahan secara lisan untuk meneruskan pembangunan yang dilakukan secara bertahap dengan sistem paket-perpaket pekerjaan.

Tuntutan Pemohon (kini Termohon I) pada saat itu adalah menyatakan bahwa Termohon Cidera Janji, penghentian sementara proyek per tanggal 21 Juni 1999 adalah sah menurut hukum, agar Termohon membayar kepada Pemohon sebesar Rp. 211.054.856.754,- membayar denda sebesar suku bunga pinjaman Bank Pemerintah, membayar biaya Arbitrase serta membayar pajak untuk ganti kerugian dan denda suku bunga pinjaman.

Putusan Majelis Hakim Arbitrase Ad-Hoc adalah sebagai berikut :

Dalam Propinsi;

Menyatakan Pemohonan tuntutan provisional Pemohon dalam rekompensi/Termohon dalam kompensi tidak dapat diterima ;

Dalam kompensi :

1. mengabulkan permohonan Pemohon dalam kompensi untuk sebagian ;
2. menyatakan Termohon dalam kompensi telah melakukan wanprestasi ;
3. menyatakan bahwa Akta Perjanjian Nomor 75 tanggal 29 Juli 1996 telah berakhir sejak tanggal 04 Februari 1998 ;

4. menghukum Termohon dalam konpensi untuk membayar kepada Pemohon dalam konpensi sebesar Rp. 64.462.646.865,- ;
5. menghukum Termohon dalam konpensi untuk melaksanakan isi putusan ini selambat-lambatnya 30 hari sejak putusan diucapkan ;
6. menolak permohonan Pemohon dalam konpensi untuk selebihnya.

Dalam Rekonpensi :

1. mengabulkan permohonan Pemohon dalam rekonpesi untuk sebagian;
2. menyatakan Termohon dalam rekonpensi telah melakukan wanprestasi ;
3. menghukum Termohon membayar denda keterlambatan ;
4. menghukum Termohon dalam rekonpensi membayar kerugian ;
5. menghukum Termohon melaksanakan isi putusan selambat-lambatnya 30 hari sejak putusan diucapkan ;
6. menolak permohonan Pemohon dalam rekonpensi untuk selebihnya.

Fakta-fakta Hukum yang mendasari Pemohon mengajukan pembatalan putusan Arbitrase adalah sebagai berikut :

- Termohon I telah telah melakukan wanprestasi kepada Pemohon dengan tidak menyelesaikan pembangunan proyek pada tanggal 15 Oktober 1997.
- Termohon I menyatakan diri dari dalam kesulitan keuangan sehingga minta bantuan kepada Pemohon, sementara sistim pendanaan

adalah pembayaran dilakukan apabila Termohon I telah melaksanakan prestasinya.

- Adanya itikat buruk dan tipu dari Termohon I dengan menyembunyikan dokumen yang bersifat menentukan, yaitu mengenai permohonan bantuan dana.
- Bukti-bukti yang diajukan sebagian besar bermeterai Rp. 2000,- dan karenanya tidak memenuhi ketentuan Pasal 11 (1) Undang-undang No. 13 tahun 1985 jo Peraturan Pemerintah RI No. 24 tahun 2000 yang berlaku efektif 1 Mei 2000 (tidak dibenarkan untuk menerima, mempertimbangkan atau menyimpulkan dokumen yang bea meterainya tidak atau kurang bayar).
- Sebagian besar bukti berupa foto copy dan tidak ada aslinya. Selain itu ada bukti yang menggunakan bahasa Inggris dengan tidak ada terjemahannya ke dalam Bahasa Indonesia.
- Bahwa Pemohon (PT. JAYA NUR SUKSES) tidak pernah mengajukan petitum oleh karenanya putusan Majelis Arbiter telah mengabulkan sesuatu yang tidak dituntut oleh pihak lawan (putusan lebih) dan karenanya bertentangan dengan Pasal 56 (1) jo Pasal 58 Undang-undang No. 30 tahun 1999.
- Berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata, telah ditetapkan bahwa kekuatan pembuktian suatu tulisan adalah terdapat pada akta yang asli, sementara kebanyakan barang bukti berupa foto copy.

Tuntutan Pemohon (PT. JAYA NUR SUKSES)

Dalam Provisi :

Bahwa terbukti itikad buruk Termohon I yang dijustifikasi oleh Termohon II dan Termohon III dengan putusan arbitrase Ad-Hoc yang tidak berdasarkan hukum, maka agar Pemohon tidak terus menjadi korban dan dirugikan terus menerus, mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat berkenan menjatuhkan Putusan Provisi untuk menunda eksekusi Putusan Arbitrase Ad Hoc No. 01/X/AD HOC/2001 tanggal 03 Oktober 2001 dengan permohonan pembatalan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Dalam Provisi :

1. mengabulkan permohonan Provisi dari Pemohon untuk seluruhnya ;
2. menyatakan menunda eksekusi Putusan Arbitrase Ad Hoc No. 01/X/AD HOC/2001 tanggal 03 Oktober 2001 sampai dengan mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
3. menghukum Termohon I, Termohon II, Termohon III, untuk membayar biaya perkara.

Dalam pokok perkara :

1. mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya ;
2. menguatkan putusan provisi untuk seluruhnya ;

3. menyatakan Termohon I telah melakukan tipu muslihat dalam perkara Arbitrase Ad Hoc No. 01/X/AD HOC/2001 ;
4. menyatakan perkara Arbitrase ini batal demi hukum atau setidaknya tidaknya mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
5. menghukum Termohon II, Termohon III dan Termohon IV untuk tunduk dan mematuhi isi keputusan ini ;
6. menyatakan Akta Perjanjian Kerjasama No 75 tanggal 29 Juli 1996 mengenai pembangunan proyek Chrysant Tower Apartemen Rajawali adalah sah menurut hukum ;
7. menyatakan Termohon I telah melakukan wanprestasi yang merugikan Pemohon ;
8. menghukum Termohon I untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 262.686.122.985,- kepada Pemohon secara tunai dan lunas, setelah perkara diputus;
9. menyatakan sengketa atas pekerjaan pembangunan proyek adalah tidak mungkin lagi diselesaikan melalui Arbitrase ;
10. menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dulu meskipun ada verzet, bantahan, banding ataupun kasasi ;
11. menghukum Termohon I, Termohon II, Termohon III, dan Termohon IV secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini.

Mengingat Pasal 70 huruf a, b, c dan Pasal 72 (3) Undang-undang No 30 tahun 1999 beserta penjelasannya dan pasal-pasal lainnya maka Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam putusannya tanggal 5 Desember 2001 akhirnya memutuskan :

1. menolak permohonan Pemohon atas pembatalan Putusan Arbitrase Ad Hoc No. 01/X/AD HOC/2001 tanggal 30 Oktober 2001 untuk seluruhnya;
2. membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara.

Pertimbangan pertimbangan Majelis itu antara lain :

1. bukti-bukti yang ada yang diajukan oleh Pemohon dinilai tidak dapat menguatkan seluruh dalil-dalil posita pemohonannya
 - a) Pendapat Majelis dilandasi logika yuridis bahwa bukti tersebut jika dikaitkan dengan Pasal 70 huruf a, b dan c Undang-undang No. 30 tahun 1999 adalah: a. tidak ada satupun yang diakui palsu atau dinyatakan palsu;
 - b) Pemohon tidak dapat menegaskan/menjelaskan bukti dokumen yang bersifat menentukan, yang manakah yang ditemukan setelah putusan diambil dan disembunyikan oleh lawan, atau
 - c) Tidak terbukti adanya tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon dalam Pemeriksaan sengketa sebelum putusan diambil ;
2. Menimbang bahwa oleh karena atau tidak ada satupun alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut yang diajukan

Pemohon yang memenuhi salah satu criteria yang telah ditentukan secara limitative Pasal 70 huruf a, b dan c Undang-undang No. 30 tahun 1999;

3. Menimbang, bahwa apabila Majelis menunjuk pada penjelasan Pasal 70 Undang-undang tentang Arbitrase dan penyelesaian sengketa alternatif (Undang-undang No. 30 tahun 1999) yang secara eksplisif menyatakan " alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini (Arbitrase) harus dibuktikan dengan putusan pengadilan, maka semua bukti Pemohon yang mempunyai kekuatan pembuktian tersebut dinilai sama sekali tidak ada yang berbentuk atau berkualitas sebagai dalil posita oleh Pemohon dinilai tidak dikuatkan oleh fakta yuridis dan alat-alat bukti Pemohon serta tidak memenuhi kriteria atau unsur yang secara limitif disebut dalam Pasal 70 Undang-undang tersebut;
4. Menimbang bahwa hasil analisa Majelis diatas, dengan demikian telah melumpuhkan alasan tentang *dissenting opinion* dari Arbiter III bahwa putusan tidak berdasar hukum. Sedang mengenai bea meterai Rp. 2000,- dinilai merupakan alasan kebatalan, akan tetapi berdasar Pasal 12 Undang-undang No. 13 tahun 1985 wajib ada pemenuhan bea meterai dan denda administrasi yang terutang sebelum daluwarsa, yaitu 5 (lima) tahun sejak putusan Arbitrase dibuat;

5. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis diatas, maka Majelis harus menyatakan bahwa alasan-alasan seperti termuat dalam posita permohonan pembatalan putusan Arbitrase yang didalilkan Pemohon adalah tidak terbukti sehingga dengan demikian maka petitum permohonan Pemohon tersebut diatas harus ditolak seluruhnya, baik provisi dan pokok perkaranya;
6. Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, berdasar Pasal 181 HIR Pemohon harus dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, sehingga wajib dihukum untuk membayar biaya perkara;
7. Menimbang, bahwa dengan telah diputuskannya perkara pada hari ini Rabu, 5 Desember 2001, maka majelis telah melaksanakan Pasal 72 (3) Undang Undang No.30 Tahun 1999;
8. Menimbang bahwa berdasarkan tinjauan yuridis diatas, maka dalam rangka penegakan supremasi hukum dan terwujudnya azas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, maka perlu konsistensi dalam implementasinya, dan terhadap putusan ini, jika tidak puas dapat diterapkan Pasal 72 (4) Undang Undang No.30 Tahun 1999 yaitu banding ke Mahkamah Agung yang memutus pertama dan terakhir.

Mengingat Pasal 70 huruf a, b dan c dan 72 (3) Undang Undang No.30 Tahun 1999 beserta penjelasannya dan pasal pasal lain dari ketentuan Undang-undang yang berlaku dan bersangkutan :

Mengadili :

1. Menolak permohonan Pemohon atas pembatalan putusan Arbitrase Ad Hoc No.01/X/AD-HOC/2001, tanggal 3 Oktober 2001 untuk seluruhnya;
2. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sebesar Rp.299.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Komentar Penulis :

1. Bahwa pengajuan gugatan pemohon ditujukan terhadap putusan arbitrase yang dilandasi tipu muslihat yang dilakukan termohon I, serta tindakan termohon I menyembunyikan dokumen yang bersifat menentukan berupa dokumen permohonan pinjaman dana kepada pemohon untuk pengerjaan proyek. Dilain pihak pertimbangan majelis bertentangan satu sama lain dengan amar putusan arbitrase.
2. Bahwa dalil gugatan pemohon tersebut diatas didasarkan pada ketentuan Pasal 70 Undang Undang No.30 Tahun 1999, dimana "Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan

putusan Pengadilan, dapat meminta atau mengajukan banding ke Mahkamah Agung dalam tingkat pertama dan terakhir sebagaimana dimungkinkan dalam Pasal 72 (4) Undang-Undang No.30 Tahun 1999.

4. Perkara Perdata No.61/Pdt.G/2002/PN.JKT.PST, tentang pembatalan putusan Arbitrase BANI Nomor :153/II/ARB-BANI/2001.

Pihak-Pihak yang berperkara :

1. PT.TRIDHARMA WAHANA, yang diwakili oleh kuasanya Harry Ponto,SH,LLm, Benny Ponto,SH untuk selanjutnya disebut **Penggugat:**
2. PT.DOC & PERKAPALAN KODJA BAHARI, yang diwakili oleh kuasanya H.Rahmat Effendi,SH.MBA dan M.Masdar Hilmi,SH untuk selanjutnya disebut **Tergugat.**

Tentang Duduknya Perkara :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah mengadakan kontrak pembangunan kapal yakni 1 unit White Oil Tanker 1500 Longton Deadweight No.049/Kontr/DKB/93 tertanggal 10 Juni 1993 dan 1 unit White Oil Tanker 3500 Longton Deadweight No.050/Kontr//DKB/93 tertanggal 10 Juni 1993;

2. Bahwa ternyata Tergugat kemudian mengajukan permohonan arbitrase terhadap Penggugat melalui BANI, sekalipun telah Penggugat dalam eksepsi menyatakan permasalahan yang diajukan oleh tergugat belum waktunya diajukan ke BANI karena antara Penggugat dan Tergugat terlibat dalam sengketa perkara perdata yang masih dalam proses kasasi.
3. Bahwa meskipun telah Penggugat kemukakan majelis arbiter tetap memeriksa dan memutus sengketa tersebut sebagaimana putusannya No.153/VII/ARB-BANI/2001 tertanggal 3 Januari 2002.
4. Bahwa putusan tersebut jelas cacat hukum dan melanggar ketertiban umum karena telah melanggar/mengintervensi kewenangan Pengadilan dan melanggar sendi-sendi asasi dari sistim hukum Indonesia baik Hukum Perdata maupun Hukum Acara Perdata.
5. Bahwa putusan BANI telah bertentangan dengan Pasal 58 Undang Undang No.30 Tahun 1999, dimana dalam kasus ini majelis arbiter sudah melakukan koreksi yang tidak memenuhi kriteria "kehilafan administratif dan atau menambah/mengurangi sesuatu tuntutan putusan" dengan telah menambahkan beberapa pertimbangan baru yang dibuat setelah putusan dibacakan dan juga satu tambahan dictum putusan yang tidak pernah dimintakan oleh pihak manapun.
6. Selanjutnya antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai perhitungan yang berbeda tentang jumlah kewajiban yang harus

UPT-PUSTAK-UNDIP

dibayar tersisa, namun oleh majelis arbiter menetapkan perhitungan kewajiban termohon yang tersisa dengan memperhatikan asas kewajaran dan keadilan. Pertimbangan majelis tersebut jelas bertentangan dengan asas hukum perdata (vide Pasal 1438 KUHPdt).

7. Bahwa majelis arbiter dalam putusannya tidak memberikan pertimbangan hukum apapun terhadap keterangan saksi yang diajukan tentang apakah keterangan para saksi tersebut diterima atau ditolak.

Berdasarkan posita gugatan diatas, Penggugat memohon agar Pengadilan :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan putusan BANI No.153/VII/ARB-BANI/2001 tertanggal 3 Januari 2002 yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 1 Pebruari 2002 sebagai putusan yang bertentangan dengan ketertiban umum;
3. Menyatakan putusan BANI a quo cacat hukum dan karenanya batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Membebaskan seluruh blaya perkara ini kepada Tergugat PT.Dok & Perkapalan Kodja Bahari.

Pertimbangan Pengadilan :

1. Bahwa berdasarkan dalil gugatan dan jawaban para pihak , yang menjadi objek perselisihan dan harus diselesaikan adalah apakah putusan BANI yang telah ada koreksi dan kemudian didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat merupakan putusan yang cacat hukum dan melanggar ketertiban umum.
2. Mengacu pada bukti berupa putusan Arbitrase BANI, majelis arbiter dalam pertimbangannya menyatakan :
 - Menimbang bahwa syarat mutlak bagi kompetensi BANI adalah adanya suatu klausula yang mengikat semua pihak, bahwa para pihak sepakat untuk menyerahkan sengketa kepada BANI seperti yang tercantum dalam Pasal 15;
 - Menimbang bahwa klausula Pasal 15 dalam kontrak pembangunan kapal menyebutkan "apabila tidak tercapat kesepakatan dalam permusyawarahan tersebut, maka perselisihan itu akan diserahkan kepada BANI di Jakarta.

Atas dasar pertimbangan hukum tersebut, majelis berpendapat bahwa pertimbangan majelis arbiter tersebut telah didasarkan pada ketentuan hukum yang bersifat absolut yang menjadi kewenangan arbitrase.

3. Bahwa kemudian walaupun majelis arbiter dalam putusannya tidak pernah menyinggung adanya upaya hukum kasasi oleh Penggugat sebagaimana dalil dan buktinya, akan tetapi karena BANI memeriksa perkaranya telah didasarkan atas adanya klausula penyelesaian sengketa pada kedua kontrak pembangunan kapal diselesaikan melalui BANI di Jakarta, maka dengan kewenangan secara absolut tersebut majelis menilai putusan BANI tidaklah mengintervensi kompetensi pengadilan ataupun melanggar sendi-sendi asasi dari sistem hukum Indonesia baik hukum perdata maupun acara perdata.
4. Selanjutnya menimbang dalil gugatan bahwa putusan BANI telah melanggar Pasal 58 Undang Undang No.30 Tahun 1999, maka perlu dipertimbangkan apakah koreksi putusan dimaksud sebagai suatu pelanggaran dari pasal tersebut.
5. Bahwa setelah memperhatikan secara seksama terhadap koreksi tersebut majelis menilai bahwa adanya penambahan pada dictum pokok perkara , hanyalah sebagai penjelasan ataupun penegasan dari alat-alat bukti yang dijadikan dasar pertimbangan majelis arbiter sehingga tidak mengurangi substansi pertimbangan hukum atau dictum sebelumnya.

6. Bahwa permasalahan besarnya hutang yang oleh Penggugat didalilkan telah bertentangan dengan Pasal 1438 KUHPdt dimana majelis arbiter mendasarkan pada asas kewajaran dan keadilan, oleh majelis menilai bahwa dari uraian pertimbangan majelis arbiter dapat disimpulkan bahwa dalam menentukan besarnya hutang tersebut telah didasarkan kepada surat-surat bukti para pihak yang besarnya kewajiban tersebut telah disebutkan secara pasti. Sedangkan yang digunakan terhadap asas kewajaran dan keadilan hanya terbatas pada pengabulan besarnya *floating rate* dari yang dituntut sebesar bunga pasar dikabulkan 5 % per tahun, demikian juga besarnya ganti rugi yang dituntut sebesar 12 % per tahun dikabulkan sebesar 5 % per tahun.
7. Adapun keberatan Penggugat bahwa majelis arbiter tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa perjanjian itu dibuat proforma saja dan untuk kepentingan pihak ketiga hemat majelis sudah tepat tidak dipertimbangkan, oleh karena pada kenyataannya pemohon telah melaksanakan pekerjaan pembangunan kedua kapal hingga selesai dan telah diserahkan-terimakan kepada termohon masing-masing tanggal 20 April dan 29 Mei 1995 dan atas penyerahan tersebut termohon telah mendaftarkan kapal yang bersangkutan ke kantor pendaftaran kapal. Sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut kedua kontrak pembangunan kapal merupakan

perjanjian yang sah secara hukum dan berlaku mengikat bagi para pihak yang membuatnya (vide Pasal 1338 KUHPdt). Karenanya majelis berpendapat bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan diatas, dapat disimpulkan perjanjian kontrak pembangunan kapal tidak dibuat secara proforma dan untuk kepentingan pihak ketiga.

Komentar Penulis :

1. Bahwa gugatan yang diajukan didasarkan pada putusan arbitrase yang didalilkan telah mengintervensi kewenangan mengadili dan melanggar sendi-sendi sistim hukum Indonesia baik hukum perdata maupun acara perdata.
2. Bahwa pertimbangan Pengadilan yang menolak dalil gugatan diatas hemat penulis sudah tepat dan berdasar pada ketentuan undang undang Arbitrase dimana yang menjadi dasar kewenangan arbitrase dalam memeriksa dan menyelesaikan suatu sengketa, adalah didasarkan pada ada tidaknya klausula yang mengikat para pihak dalam hal terjadi sengketa diselesaikan melalui arbitrase yang tercantum dalam perjanjian/kontrak.

Atas dasar hal tersebut dengan telah dicantumkannya klausula dimaksud sebagaimana tersurat pada Pasal 15 kontrak pembangunan kapal tersebut, hal ini membuktikan bahwa atas

penyerahan atau permohonan salah satu pihak kepada arbitrase, pemeriksaan dan penyelesaian sengketa dimaksud oleh BANI menurut hukum tidak bertentangan dengan kompetensi mengadili ataupun melanggar sendi-sendi asasi dalam sistim hukum Indonesia sebagaimana didalilkan.

3. Selanjutnya pertimbangan pengadilan yang tidak sependapat dengan posita gugatan menilai keputusan BANI telah melanggar ketentuan Pasal 58 UU No.30 Tahun 1999 hemat penulis sudah tepat, mengingat sesuai penjelasan rumusan Pasal 58 tersebut yang dimaksud dengan "koreksi terhadap kekeliruan administrative" adalah koreksi terhadap hal-hal seperti kesalahan pengetikan ataupun kekeliruan dalam penulisan nama, alamat para pihak atau arbiter dan lain-lain yang tidak mengubah substansi putusan.

Adapun yang dimaksud dengan "menambah atau mengurangi tuntutan" adalah salah satu pihak dapat mengemukakan keberatan terhadap putusan apabila putusan, antara lain :

- a. telah mengabulkan sesuatu yang tidak dituntut oleh pihak lawan;
- b. tidak memuat satu atau lebih hal yang diminta untuk diputus, atau;
- c. mengandung ketentuan mengikat yang bertentangan satu sama lainnya.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, adanya penambahan dalam pertimbangan hukum termasuk pula adanya penambahan dictum pokok perkara alinea kedua yaitu kata "terhitung sejak tanggal 16 Januari 1998" sebagaimana didalilkan, hanyalah sebagai penjelasan ataupun penegasan dari alat-alat bukti yang dijadikan dasar pertimbangan majelis arbiter. Sehingga secara juridis adanya koreksi dimaksud tidaklah mengurangi substansi pertimbangan hukum ataupun dictum sebelumnya.

4. Selanjutnya terhadap dalil gugatan yang menilai putusan arbitrase tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan, oleh pengadilan dalil tersebut harus dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan, mengingat berdasarkan bukti-bukti yang diajukan terbukti pemohon telah melaksanakan pengerjaan pembangunan kapal dan telah pula diserahkan dalam berita cara dimana kedua kapal tersebut telah didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Kapal, oleh karenanya pertimbangan Pengadilan yang menilai majelis arbitrase mengesampingkan keterangan saksi-saksi dimaksud sudah tepat dan berdasar hukum.
5. Selanjutnya mengingat ketentuan Pasal 70 Undang Undang No.30 Tahun 1999, yang dalam penjelasannya ditegaskan permohonan

pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan.

Bahwa ternyata dari bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini majelis hakim tidak menemukan adanya suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 70 dimaksud. Oleh karenanya putusan arbitrase tidak terbukti telah melanggar ketertiban umum ataupun cacat hukum.

5. Perkara No.70/Pts.Pdt.G/1982/PN.P.Bun

Pihak-pihak yang berperkara :

- S.M.PARDEDE yang memberikan kuasa kepada Syahril Siregar,SH yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT, melawan;

1. Ir.Syafei Juremi yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I,
2. PT.UNITED TRACTOR yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II,
3. Syarifudin Noor, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III.

Duduknya Perkara :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I dan II pada tanggal 14 Juli 1982 telah mengadakan perjanjian jual-beli 6 (enam) unit traktor merek Komatsu, dimana penggugat berkewajiban membayar uang muka untuk masing-masing unit dan sisanya dibayar setelah barang diterima pada akhir Juli 1982 dan selambatnya permulaan (minggu pertama Agustus 1982).
2. Bahwa ternyata Tergugat I, II baru menyerahkan pada bulan Oktober 1982 yang dibuktikan dari Surat Pemuatan Barang, sehingga akibat dari keterlambatan tersebut Penggugat dirugikan sebesar Rp.144.000.000,-.
3. Bahwa sesudah peralatan tersebut diserahkan pada Penggugat oleh Tergugat I, Tergugat II, tanggal 2 Oktober 1982, Tergugat I dan Tergugat II menagih kepada Penggugat terhadap sisa pembayaran; sementara itu Penggugat telah pula mengajukan permintaan klaim ganti rugi kepada Tergugat I dan Tergugat II, pihak Tergugat I dan Tergugat II telah mengambil secara melawan hukum 2 (dua) traktor dari lokasi Penggugat.

4. Bahwa teguran terhadap klaim Penggugat sudah diberikan namun tidak ada tanggapan positif dari Tergugat I dan II, yang justru hanya menagih sisa pembayaran pembelian tersebut;

Berdasarkan hal tersebut diatas mohon untuk :

- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan;
- Menyatakan sah menurut hukum perjanjian jual beli No.PJB.028, 029,030 yang telah diperbuat oleh Penggugat dan Tergugat I dan II tanggal 14 Juli 1982;
- Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III suatu perbuatan wanprestasi (cidera janji) terhadap Penggugat;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.144.000,000,- dengan perincian 6 (enam) x 60 (hari keterlambatan penyerahan) x 2 (hektar) x

Pertimbangan Pengadilan Negeri :

- a. Menimbang bahwa sebelum Pengadilan meneliti surat-surat termaksud, para pihak ada mengajukan eksepsi yang pada pokoknya antara lain menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut dikarenakan jika timbul perselisihan sebagai akibat dari perjanjian tersebut maka akan diserahkan penyelesaiannya kepada BANI;

- b. Atas dasar eksepsi tersebut Pengugat menjawab bahwa tidak ada kewajiban hukum untuk mengajukan permasalahan sengketa ke BANI dengan alasan peralatan yang sudah diserahkan kepada Penggugat, dirampas kembali oleh Tergugat, sedang BANI tidak dapat mengadili kasus-kasus yang sangat mendesak;
- c. Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, ternyata pihak Tergugat tidak mengadakan bantahan atau perlawanan, kecuali mohon perhatian khusus dari Majelis Hakim akan surat yang dikirim Penggugat yang diterima Tergugat pada tanggal 29 November 1982 (bukti T.I) dimana pada halaman 2 butir 7 Penggugat menyarankan agar persoalan sengketa diserahkan ke BANI sesuai dengan Pasal 21 kontrak;
- d. Menimbang bahwa menurut surat perjanjian tertanggal 14 Juli 1982 (bukti P.I,II,III) tersebut diatas, pada Pasal 21 pada pokoknya menyatakan bahwa setiap sengketa yang timbul harus diselesaikan dengan musyawarah dan apabila gagal, menyerahkan pada Badan Arbitrase, sehingga dengan demikian baik Penggugat maupun Tergugat harus mematuhi isi perjanjian tersebut;
- e. Berdasarkan surat bukti P.IV,P.V dan P.VI, jelas bahwa Tergugat I dan II selaku penjual telah menerima panjar harga pembelian tersebut

sebesar 50% dari seluruh harga yang harus dibayar oleh Penggugat selaku pembeli;

- f. Menimbang bahwa dari bukti P.VII, P.VIIa dan P.VIII, telah jelas pula bahwa Tergugat telah menyerahkan ke-6 unit traktor tersebut kepada Penggugat yang diterima Penggugat tanggal 8 Oktober 1982 dan dengan demikian para Tergugat telah jelas terlambat selama 60 hari dari batas waktu paling lambat yang disepakati bersama didalam perjanjian jual beli yaitu paling lambat harus diserahkan pada minggu pertama bulan Agustus 1982;
- g. Menimbang bahwa ternyata kenyataannya akibat keterlambatan penyerahan tersebut menimbulkan kerugian sehingga karenanya Penggugat ada mengajukan klaim ganti rugi tersebut kepada Tergugat ;
- h. Bahwa atas klaim dimaksud pihak Tergugat tidak juga mematuhi sekalipun telah diusahakan secara baik-baik kepada Tergugat dengan suratnya tertanggal 21 Oktober 1982, akan tetapi tidak mendapat tanggapan yang positif dari Tergugat, bahkan Tergugat mengambil secara paksa ke-3 unit traktor yang sudah diserahkan, sehingga tindakan para Tergugat tersebut jelas telah bertentangan dengan hukum yakni menjadi hakim sendiri didalam menyelesaikan

perselisihan mereka, sehingga dengan demikian maka Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;

i. Menimbang akan kenyataan diatas, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa penyelesaian di BANI sebagaimana dicantumkan dalam klausula perjanjian Pasal 21 hanyalah merupakan formalitas saja dari perjanjian tersebut, sedang dihati para pihak tidak ada niat untuk mempergunakan lembaga Arbitrase BANI tersebut;

j. Menimbang bahwa didalam masyarakat, khususnya dalam dunia perdagangan dewasa ini, telah timbul adagium bahwa penyelesaian sengketa di Lembaga BANI belum dapat memberikan penyelesaian sebagaimana diharapkan dan masyarakat masih enggan untuk menyerahkan persoalan ke Lembaga BANI tersebut sebagaimana telah dilansir pendapat para ahli hukum antara lain Prof.DR.R.Suebeki,SH dan Z.Asikin Kusumah Atmadja,SH sebagai berikut :

".....di Indonesia Arbitrase sudah dikenal sebelum Perang Dunia II dan dijalankan dalam praktek, akan tetapi masih jarang sekali dipergunakan disebabkan kecuali karena kurang pengertian, juga karena tidak ada keyakinan tentang manfaatnya"(lihat H.A..Perdata Indonesia karangan Prof.Dr.Soedikno Mertokusumo,SH;terbitan Liberty Yogyakarta,1981,hal.206);

k. Menimbang, bahwa berdasarkan keyakinan masyarakat umumnya dan pendapat tersebut diatas, Pengadilan Negeri berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

l. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan dipihak Tergugat tidak ada mengajukan bantahan apapun, maka Pengadilan berkesimpulan dan memperoleh keyakinan berdasarkan bukti-bukti yang kuat Penggugat telah lolos dalam membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu patut dikabulkan.

Mengingat akan pasal-pasal dari B.W, U.U No.1/brt/1951, UU No.14/1970, Rbg dan segala peraturan yang bersangkutan dalam perkara ini :

MENGADILI :

1. Menolak eksepsi para Tergugat;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
3. Menyatakan sah menurut hukum perjanjian jual beli No.PJB.028;029;030 yang telah diperbuat oleh Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 14 Juli 1982;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III satu perbuatan wanprestasi (cidera janji) terhadap Penggugat;
5. Menghukum Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.144.000.000,- (seratus empat puluh empat

juta rupiah), dengan perincian 6 x 60 hari keterlambatan penyerahan x 2 ha x Rp.240.000,- (harga borongan yang dibayarkan Pemerintah kepada Penggugat);

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat III sekadar untuk memenuhi bunyi keputusan ini;
7. Menghukum Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai saat ini berjumlah Rp.182.215,-;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dijalankan dalam perkara ini;
9. Menolak gugatan untuk selebihnya.

- **Putusan Pengadilan Tinggi No.31/1983/PT.PR. (banding atas putusan PN.BUN),**

Pertimbangan Pengadilan Tinggi :

1. Menimbang bahwa baik dalam memori banding yang diajukan oleh Kuasa para Tergugat/Pembanding maupun kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa Penggugat/Terbanding, tidak terdapat hal-hal baru yang dapat mengubah putusan hakim pertama oleh sebab itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;
2. Menimbang bahwa setelah memeriksa berkas perkara dan bukti-bukti yang bersangkutan, berkesimpulan bahwa pemeriksaan yang

dilakukan oleh hakim pertama sudah tepat dan benar, karenanya pertimbangan-pertimbangan tersebut oleh Pengadilan Tinggi dijadikan pertimbangan sendiri, maka oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Bun tanggal 14 April 1983 No.70/Pts.Pdt.G/PN.Bun dapat dikuatkan;

Mengingat dari pasal-pasal pada Undang-undang yang bersangkutan:

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari kuasa para Tergugat/Pembanding;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bun tanggal 14 April 1983 No.70/Pts.Pdt.G/1982/PN.P.Bun yang dimohon banding.
 - Putusan Mahkamah Agung R.I No.1851.K/1981 (kasasi atas putusan PT.PR),
- Alasan Kasasi pihak Pemohon, mengenai eksepsi khusus terhadap kewenangan mengadili karena adanya klausula arbitrase:**
1. Bahwa Pengadilan Tinggi Palangkaraya dan Pengadilan Negeri Bun, dalam putusan a quo memutus tanpa dasar hukum karenanya jelas tidak menerapkan hukum dengan benar;

2. Bahwa perjanjian antara Pemohon dan Termohon I,II oleh Pengadilan Negeri sendiri telah dinyatakan sah itu adalah suatu kesatuan yang utuh, terbagi dalam pasal, kemudian rumusan;
3. Bahwa Pasal 21 dari perjanjian tersebut dirumuskan demikian :..... yang pada pokoknya mengandung arti bahwa "setiap sengketa" yang timbul harus diselesaikan dengan musyawarah dan apabila gagal menyerahkan pada Badan Arbitrase;
4. Bahwa dengan menyatakan sahnya perjanjian tersebut oleh Pengadilan Negeri sendiri maka berarti bahwa Pasal 21 dari perjanjian itu adalah sah pula, pengadilan tidak dapat menyatakan bahwa suatu perjanjian secara keseluruhan adalah sah sekaligus menyatakan pula bahwa salah satu bagiannya adalah tidak sah karena berarti bahwa :
Pertama : pernyataan Pengadilan Negeri tersebut mengandung pertentangan dalam isinya (*innerlijke tegenstrijdigheden*) adalah tidak sah;
Kedua : perjanjian itu sendiri adalah tidak sah karena salah satu bagiannya yaitu Pasal 21 dianggap sebagai "formalitas" belaka oleh Pengadilan Negeri
5. Bahwa oleh karena itu Pengadilan Negeri telah menilai bahwa secara keseluruhan perjanjian itu sah maka secara implisit Pengadilan tersebut

telah menyatakan pula bahwa Pasal 21 dari perjanjian adalah sah pula, entah sebagai formalitas akan tetapi mengikat para pihak;

6. Bahwa oleh karena perjanjian tersebut baik secara keseluruhan maupun menurut pasal dan rumusan adalah sah menurut hukum maka sudah menjadi jelas sudah bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri tentang perjanjian itu dengan menyampingkan Pasal 21 adalah tidak sah, karena sengketa yang timbul karena perjanjian tersebut harus diadili oleh Badan Arbitrase menurut kehendak bersama para pihak dan oleh karena itu berlaku sebagai undang-undang, setiap warga mengetahui secara pasti bahwa undang-undang adalah lebih tinggi dari Pengadilan Negeri;
7. Bahwa apakah masih diragukan in casu adalah bukan sengketa, dan bila perkara tersebut adala suatu sengketa maka apakah Pengadilan Negeri berwenang mengadili sengketa tersebut, sedangkan para pihak menghendaki lain yaitu pertama diselesaikan dengan musyawarah dan apabila gagal menyerahkan sengketa tersebut pada Badan Arbitrase;
8. Bahwa penyerahan pada Badan Arbitrase menurut perjanjian tersebut adalah bukan secara langsung akan tetapi bertahap :

- PERTAMA : adanya sengketa.
- KEDUA : adanya musyawarah
- KETIGA : adanya gagal musyawarah, barulah pada tahap
- KEEMPAT : penyerahan pada Badan Arbitrase

9. Namun baru pada tahap pertama yaitu tahap adanya sengketa, Pengadilan Negeri telah menyatakan dirinya berwenang memeriksa suatu hal yang secara tepat oleh Pengadilan Negeri sendiri telah disitir sebagai "karena kurang pengertian" (halaman 206 alinea kedua) dalam hal ini pengertian para Hakim mengenai Badan Arbitrase;

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, jelaslah bahwa Pengadilan Negeri bukan saja telah menyalahi undang-undang tetapi telah nyata-nyata menyalah-gunakan wewenangnya menarik dalam kekuasaannya mengadili hal-hal yang bukan menjadi urusannya dan oleh karena adalah tidak sah, setidaknya-tidaknya batal demi hukum atau dapat dibatalkan.

Pertimbangan Mahkamah Agung :

- Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena *judex factie* tidak salah menerapkan hukum;

- Menimbang bahwa keberatan lainnya pun tidak dapat dibenarkan karena *judex factie* tidak salah menerapkan hukum, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-Undang No.1 Tahun 1950);
- Menimbang berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan *judex factie* dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan pemohon kasasi Ir.Syafei Juremi dan kawan-kawan tersebut harus ditolak.

Komentar Penulis :

1. Bahwa pengajuan perkara diatas, didasarkan adanya keterlambatan pengiriman enam unit traktor kepada Penggugat, sehingga berakibat tertundanya pelaksanaan proyek bahkan pengurangan areal lahan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan keterlambatan tersebut Penggugat mengajukan klaim ganti rugi namun tidak

ditanggapi, bahkan tiga unit traktor yang telah diserahkan diambil secara paksa kembali oleh Tergugat.

2. Sebagaimana dalam pertimbangan putusan Pengadilan bahwa dasar adanya sengketa tersebut didasarkan atas perjanjian jual beli yang didalam pasal-pasal nya ada memuat klausula penyelesaian sengketa melalui Lembaga Arbitrase.
3. Bahwa dikesampingkannya klausula arbitrase tersebut, dikarenakan tindakan pihak Tergugat yang mengambil-alih secara paksa 3 unit traktor yang telah diserahkan kepada pihak Penggugat, sehingga karenanya secara implisit pihak Tergugat sendiri telah mengabaikan klausula arbitrase yang telah disepakati tersebut.
4. Berdasarkan tindakan pihak Tergugat tersebut, Pengadilan menilai bahwa sekalipun adanya klausula arbitrase dimaksud penyelesaian sengketa di BANI hanyalah merupakan formallitas saja dan dihati para pihak sendiri tidak ada niat untuk mempergunakan lembaga arbitrase tersebut, dan dengan mengutip pendapat para ahli hukum yang pada dasarnya menyatakan jarang nya dipergunakan lembaga arbitrase tersebut dikarenakan kurangnya pengertian dan tidak adanya keyakinan masyarakat akan manfaatnya lembaga dimaksud.

5. Bahwa hemat penulis sebenarnya terlepas dari tindakan pengambil-alihan ketiga unit traktor dimaksud, hal tersebut tidaklah cukup menjadikan alasan atau dasar dalam mengesampingkan adanya klausula arbitrase, oleh karena sekalipun atas adanya tindakan Tergugat I,II dimaksud, Penggugat sepatutnya terlebih dahulu menyerahkan sengketa kepada BANI sebagaimana telah disepakati bersama. Jika atas penyerahan ke BANI pihak Tergugat tidak ditanggapi ataupun tidak hadir setelah dipanggil secara patut maka arbiter tetap dapat memproses penyelesaian sengketa dimaksud tanpa hadirnya pihak Tergugat.
6. Bahwa kemudian pertimbangan Pengadilanpun yang menilai penunjukan lembaga arbitrase hanya merupakan formalitas saja dengan terbuktinya tindakan Tergugat yang mengambil-alih secara paksa 3 unit traktor hemat penulis bukan merupakan alasan pembelar dalam mengambil kesimpulan, oleh karena prinsip dasar kewenangan absolut dari Pengadilan dalam memeriksa dan memutus sengketa yang menjadi kewenangannya tersebut adalah ada tidaknya klausula arbitrase yang termuat/tercantum dalam suatu perjanjian yang menjadi obyek sengketa. Sekiranya hal tersebut ada tercantum dalam perjanjian maka hakim sudah sepatutnya karena jabatannya baik ada tidaknya eksepsi yang diajukan menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa dan memutus sengketa dimaksud.

7. Bahwa masalah pendapat para ahli sebagaimana disitir oleh pengadilan hemat penulis tidak cukup arif dan bijaksana oleh karena dengan adanya lembaga arbitrase beserta ketentuan undang-undang yang mengaturnya maka pengadilan sudah sepatutnya untuk menghormati dan menghargai adanya proses penyelesaian sengketa diluar Pengadilan sebagaimana putusan-putusan Mahkamah Agung yang telah menegaskan hal tersebut.
8. Bahwa jika dicermati proses awal pendaftaran perkara ke Pengadilan sampai dengan dijatuhkannya putusan oleh Mahkamah Agung yang justru berjalan kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya, tentunya selain membutuhkan waktu yang cukup lama hal inipun akan menjadikan permasalahan sengketa diketahui khalayak umum, yang mana hal tersebut tidak akan terjadi jika penyelesaian sengketa diserahkan ke lembaga arbitrase.

B. HASIL PEMBAHASAN

Berdasarkan uraian pada bab terdahulu dan dari hasil penelitian penulis terhadap kasus-kasus tersebut diatas, dapat dikaji terhadap pokok permasalahan yakni :

1. *Apakah putusan arbitrase dapat dimintakan pembatalan ke Pengadilan Negeri ?*

Berdasarkan rumusan pengertian arbitrase yang diberikan dalam Pasal 1 angka 1 Undang Undang No.30 Tahun 1999, jelas kiranya bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 3 mengartikan perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa ²⁸. Artinya perjanjian arbitrase timbul karena adanya kesepakatan berupa :

- a. klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau
- b. suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat oleh para pihak setelah timbul sengketa.

Dari rumusan tersebut hal ini mensyaratkan bahwa para pihak dengan sadar dan tanpa adanya sepihak sepakat mengikatkan diri untuk menyelesaikan sengketa yang timbul diantaranya tidak melalui sarana peradilan umum tetapi melalui sarana/lembaga arbitrase.

Dengan adanya klausula arbitrase dalam suatu perjanjian berarti meniadakan hak para pihak untuk untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang dimuat dalam perjanjian pokok ke

²⁸ Rahmad Usman, *Hukum Arbitrase Nasional*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002, hal.19

Pengadilan Negeri²⁹. Dengan demikian berdasarkan ketentuan yang diatur Undang Undang No. 30 tahun 1999 suatu putusan arbitrase adalah bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Hal ini diatur dalam Pasal 60. Putusan Arbitrase bersifat "*Final and binding*", berdasarkan dan kesepakatan para pihak dan perjanjian ini mengikat para pembuatnya sebagai undang-undang.

Sekalipun dalam klausula arbitrase para pihak telah sepakat putusan arbitrase adalah bersifat "final and binding", namun demikian pada kenyataan dibanyak negara, masih terbuka upaya untuk mengajukan pembatalan terhadap suatu putusan arbitrase ke pengadilan.

Bahwa kemungkinan untuk mengajukan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak adalah dengan mengajukan perlawanan ataupun bantahan terhadap putusan arbitrase yang didasarkan pada tuduhan tentang telah terjadinya penyelewengan, kecurangan atau kekhilafan seorang atau beberapa orang arbiter. Kebolehan mengajukan permintaan pembatalan terhadap putusan arbitrase tersebut hanya yang sifatnya sangat "*eksepsional*" sebagaimana dijumpai dalam Pasal 843 Rv, juga dalam Pasal 52 ICSD dan Pasal 16 UNCITRAL serta yang tersurat dalam ketentuan Pasal 70 Undang Undang No.30 Tahun 1999.

Seperti dikatakan dibandingkan dengan ketentuan mengenai pembatalan yang dikenal dalam RV, maka sekarang ini alasan-alasan ini untuk pembatalan adalah lebih sedikit. Dalam RV Pasal 643 dinyatakan bahwa

²⁹ Ibid, hal 19 -20

walaupun tidak dapat dibanding suatu putusan arbitrase, tetapi dapat disanggah karena diminta pembatalan atau dinyatakan batal karena adanya hal-hal sebagai berikut :

1. Apabila putusan telah diberikan di luar batas-batas dari perjanjian arbitrase. Jadi dimintanya hanya misalnya pembayaran 100 juta rupiah dari termohon, tetapi dikabulkan 200 juta rupiah. Dalam hal ini sudah jelas dapat dimintakan pembatalan. Karena para arbiter telah melampaui wewenang yang diberikan kepadanya. Apabila dibandingkan dengan konvensi lain mengenai arbitrase seperti pada ICSID, kita saksikan juga ketentuan yang serupa bahwa apabila para arbiter telah melewati batas wewenang mereka, maka putusan arbitrase ini adalah batal dari semula.
2. Apabila putusan arbitrase ini diberikan berdasarkan suatu perjanjian klausula arbitrase yang batal atau yang telah lampau waktu. Jika putusan diberikan berdasarkan perjanjian oleh arbitrase yang tidak berlaku atau tidak berlaku lagi, maka putusan tersebut juga harus dianggap batal.
3. Apabila putusan telah diberikan oleh atas dasar putusan dari sejumlah arbiter yang sebenarnya tidak berwenang untuk memutuskan dalam hal lain arbiter tidak hadir.
4. Apabila telah diputuskan mengenai hal-hal yang tidak diminta atau putusan ini telah memberikan lebih dari apa yang diminta. Menurut hemat kami nomor 4 ini adalah serupa dengan apa yang ditentukan dalam nomor 1 di atas tadi.

5. Apabila putusan membuat disposisi yang bertentangan satu sama lain (*controversial disposition*) pertimbangan-pertimbangan yang satu dengan lain bertentangan. Atau dictum dari putusan yang bertentangan satu sama lain.
6. Apabila para Arbiter telah lalai untuk memutuskan mengenai subjek yang telah ditentukan dalam agreement ini, dan harus diputuskan para arbiter ini. Jadi para arbiter telah tidak memenuhi secara lengkap apa yang diminta dan dipermasalahkan oleh para pihak. Seperti diketahui hal yang diminta di bawah nomor 6 ini, seperti juga hal yang ditentukan dalam nomor 4, sudah kita saksikan oleh pembuat Undang-undang Arbitrase baru Tahun 1999 ini hendak dimasukan dalam pasal mengenai koreksi, yaitu Pasal 58. Menurut hemat kami tepatnya materi ini jangan dimasukkan dalam pasal mengenai koreksi tetapi sebagai salah satu alasan untuk dapat minta pembatalan sesuai dengan Pasal 70 sekarang ini.
7. Apabila para arbiter telah menyalah gunakan formalitas prosedural yang harus diikuti sesuai dengan sanksi atau batalnya proses ini. Akan tetapi hal ini hanya demikian adanya apabila sesuai dengan ketentuan yang terjadi dalam perjanjian bersangkutan, para arbiter hanya mengikuti Hukum Acara Perdata yang berlaku untuk berperkara di hadapan pengadilan biasa. Dan lazimnya dalam perjanjian arbitase ini tidak ditentukan demikian. Biasanya kepada para arbiter diberikan keleluasaan

- sendiri untuk mengatur formalitas-formalitas dan cara berperkara ini. Jadi tidak terikat kepada Undang-undang Hukum Acara Perdata untuk proses di hadapan Pengadilan Negeri.
8. Apabila telah diberikan keputusan berdasarkan surat-surat, yang setelah keputusan diberikan, diakui sebagai palsu ataupun telah dinyatakan palsu,
 9. Apabila setelah putusan diberikan, surat-surat yang menentukan yang dulu disembunyikan oleh para pihak telah ditemukan kembali,
 10. Apabila putusan didasarkan pada kecurangan atau itikad jahat, selama jalannya pemeriksaan yang kemudian diketahui.

Selanjutnya mengenai batas waktu tuntutan pembatalan diajukan, diatur dalam pasal 644 Rv dimana dinyatakan bahwa :

1. Tuntutan untuk pembatalan putusan wasit tidak akan diterima, kecuali diajukan di dalam jangka waktu enam bulan terhitung semenjak putusan tersebut diberitahukan kepada para pihak sendiri di tempat tinggal mereka.
2. Dalam hal-hal yang disebutkan dalam sub 8, 9, 10, jangka waktu enam bulan itu tidak akan berjalan selain sesudahnya kepalsuan, kecurangan atau itikad yang tidak baik itu telah diketahui, dengan syarat bahwa dalam semua peristiwa itu hanyalah bukti-bukti tertulis saja yang dapat diterima mengenai tanggal diketahuinya peristiwa-peristiwa tersebut.

Jadi khusus terhadap alasan yang disebut pada angka 8 (perihal kepalsuan), 9 (perihal kecurangan) dan angka 10 (perihal itikad tidak baik), perhitungan batas tenggang waktu permohonan tidak berpatokan pada tanggal pemberitahuan putusan, tetapi didasarkan pada tanggal diketahuinya keadaan tersebut yang pengetahuannya hanya dapat dibuktikan dengan alat bukti tertulis.

Selanjutnya syarat lain yang diatur dalam Pasal 645 Rv, bahwa tuntutan atau perlawanan baru terbuka setelah adanya perintah eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri. Selama belum ada penetapan perintah eksekusi, maka permohonan pembatalan belum memenuhi syarat formal. Dengan kata lain menurut Rv. Bahwa upaya perlawanan terhadap pembatalan putusan arbitrase mengandung dua sisi yang diakumulasikan menjadi satu upaya yakni :

- Satu sisi adalah merupakan upaya permintaan pembatalan terhadap putusan,
- Tapi sekaligus pula berbarengan dengan itu, adalah perlawanan terhadap pelaksanaan eksekusi.

Selama belum ada perintah eksekusi, maka belum dapat diajukan upaya pembatalan. Artinya perlawanan pembatalan baru tersebut setelah putusan dideponir di kepaniteraan pengadilan. Dan atas pendeponiran, putusan sudah dapat di exequatur oleh Ketua Pengadilan Negeri, barulah kemudian terbuka upaya pembatalan putusan.

Adapun ketentuan dalam Pasal 646 Rv mengatur kompetensi absolut dan relatif penyelesaian pembatalan putusan arbitrase tentang :

1. Tuntutan pembatalan putusan wasit dilakukan dengan panggilan yang berisi perlawanan terhadap perintah pelaksanaan putusan tersebut.
2. Tuntutan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang ketuanya telah mengeluarkan perintah pelaksanaan putusan wasit tersebut.

Dari rumusan diatas, dapat dilihat bahwa Rv menganut sistem yang sangat terbuka bagi dimungkinkannya dilakukan pembatalan atas suatu keputusan arbitrase yang telah dijatuhkan³⁰. Namun dengan berlakunya ketentuan Undang Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagaimana tersebut dalam Pasal 70, upaya pembatalan putusan arbitrase tersebut hanya mensyaratkan 3 (tiga) hal untuk dimungkinkannya mengajukan tuntutan pembatalan, yakni apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. surat/dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu,
2. setelah putusan diambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan pihak lawan;atau
3. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

³⁰ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *op cit* hal 166

Berdasarkan alasan-alasan pembatalan suatu keputusan arbitrase sebagaimana ditentukan dalam Rv maupun oleh Undang Undang Arbitrase dan dihubungkan dengan kasus-kasus arbitrase yang diajukan ke pengadilan, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa meskipun dalam perjanjian yang menjadi obyek sengketa telah termuat adanya klausula arbitrase dimana para pihak telah sepakat jika terjadi perselisihan yang timbul akan diselesaikan melalui keputusan lembaga arbitrase dan keputusan tersebut berlaku mengikat kepada para pihak, namun pihak yang diwajibkan untuk melaksanakan putusan dimaksud justru merasa kepentingannya dirugikan sehingga menempuh upaya hukum menuntut pembatalan terhadap putusan arbitrase.
2. Bahwa pengajuan tuntutan pembatalan dimaksud bersumber pada pertimbangan hukum pihak arbiter/majelis arbitrase sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan yang justru kemudian dianggap sangat merugikan kepentingan salah satu pihak sebagaimana dari dalil posita gugatan pada kasus-kasus arbitrase antara lain :
 - a. Bahwa arbiter/majelis arbitrase tidak mempertimbangkan bahwa telah terjadi suatu tipu daya menyembunyikan dokumen yang menentukan dalam sengketa para pihak,

- b. majelis tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, dalam artian bahwa arbiter/majelis dalam pemeriksaan telah mengabaikan hukum acara yang berlaku sebagaimana disyaratkan dalam undang undang,
 - c. arbiter/majelis arbitrase telah mengabaikan sesuatu hal yang tidak dituntut,
 - d. bahwa putusan BANI telah bertentangan dengan ketentuan Undang Undang Arbitrase dalam menilai kekhilafan administrative/ menambah atau mengurangi tuntutan.
- 3. Bahwa terlepas adanya klausula arbitrase dalam perjanjian yang menjadi obyek sengketa, namun berdasarkan pada alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase tersebut, maka hal tersebut menurut hukum dapat dibenarkan dan sudah menjadi kewajiban bagi lembaga Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri membuktikan benar tidaknya telah terjadi hal-hal sebagaimana diuraikan atau yang menjadi dasar gugatan pembatalan putusan arbitrase dimaksud.
- 4. Dalam konteks pembatalan terhadap suatu putusan arbitrase, dengan merujuk pada Pasal 70, 71 dan 72 beserta penjelasannya dalam Undang Undang No.30 Tahun 1999, permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan ke Pengadilan Negeri diajukan dalam jangka waktu 30

(tiga puluh) hari terhitung sejak penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitia Pengadilan Negeri.

Apabila permohonan pembatalan dimaksud dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri maka Ketua Pengadilan Negeri menentukan lebih lanjut akibat dari pembatalan³¹ yang dapat berupa :

- a. Batalnya seluruh atau sebagian isi putusan arbitrase tersebut. Hal ini harus ditentukan dengan tegas dalam pembatalan oleh Ketua Pengadilan Negeri,
- b. Ketua Pengadilan Negeri dapat memutuskan bahwa perkara tersebut diperiksa kembali oleh :
 - Arbiter yang sama, atau
 - Arbiter yang lain, ataupun
 - Tidak mungkin lagi diselesaikan melalui arbitrase

Sebaliknya apabila alasan-alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut tidak terbukti maka Ketua Pengadilan Negeri akan menolak permohonan dimaksud dengan disertai alasan-alasannya.

5. Bahwa Undang Undang No.30 Tahun 1999 memang memberikan kemungkinan terhadap diajukannya upaya hukum yang oleh undang undang disebut dengan "**pembatalan**" terhadap putusan arbitrase. Akan tetapi jika dilihat pada alasan pembatalan yang disebutkan

³¹ Munir Fuady, Op.cit hal.111

dalam undang undang tersebut, maka sebenarnya upaya pembatalan tersebut bukanlah upaya hukum yang biasa, tetapi lebih merupakan upaya hukum yang luar biasa. Jadi tidak sama dengan upaya hukum banding dalam sistem peradilan biasa. Karena itu pula sunguhpun tidak dengan tegas tegas disebutkan dalam undang undang, tetapi jika kita melihat kepada alasan alasan pembatalan putusan arbitrase, maka upaya hukum pembatalan tersebut merupakan hukum memaksa yang tidak dapat dikesampingkan oleh kedua belah pihak³².

6. Pembatalan "Putusan Arbitrase; hal ini diatur dalam Pasal 70 yang berbunyi : " Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
 - a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
 - b. Setelah putusan diambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan;
 - c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Dari penjelasan Pasal 70 disebutkan bahwa permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang

³² Munir Fuady, *op cit*, hal 110

sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan.

Berdasarkan Pasal 70 ini maka terdapat 3 (tiga) kemungkinan untuk meminta pembatalan terhadap putusan arbitrase yaitu :

- a. Telah dipergunakan dokumen palsu.
- b. Disembunyikannya dokumen menentukan oleh pihak lawan.
- c. Pihak lawan telah melakukan tipu muslihat.

Dibandingkan dengan RV yang berkaitan dengan arbitrase terdapat lebih banyak kemungkinan untuk mengajukan pembatalan. Hal ini mungkin disebabkan sebagai alasan untuk membatalkan putusan arbitrase, karena terhadap putusan tidak dapat dimintakan banding atau kasasi.

7. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 70 disebutkan bahwa permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di Pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila Pengadilan menyatakan bahwa alasan-

alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan.

8. Dalam penjelasan Pasal 72 menyebutkan bahwa Ketua pengadilan Negeri diberi wewenang untuk memeriksa tuntutan pembatalan jika diminta oleh para pihak, dan mengatur akibat dari pembatalan seluruhnya atau sebagian dari putusan arbitrase bersangkutan. Selain hal tersebut ketentuan Pasal 72 ini mengatur pula syarat permohonan pembatalan terhadap putusan arbitrase dan tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan, yang ditetapkan selama 30 (tiga puluh) hari. Namun demikian dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut, apakah dapat terlaksana dalam praktek sehari-hari, karena menurut pengalaman selama ini, hal tersebut jarang terpenuhi.
9. Mengenai jangka waktu yang diperkenankan oleh Undang Undang Arbitrase No.30 Tahun 1999 guna mengajukan tuntutan pembatalan putusan arbitrase, jangka waktu yang diperkenankan untuk melakukan pembatalan tidak ditentukan sama sekali. Dengan demikian dapat ditafsirkan bahwa jangka waktu tersebut sebenarnya tidak terbatas. Akan tetapi putusan Ketua Pengadilan Negeri untuk pembatalan

tersebut haruslah diputuskan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima ³³.

2. Apakah putusan Pengadilan Negeri terhadap pembatalan putusan arbitrase bisa dimintakan banding ?

Berdasarkan rumusan Undang Undang No.30 Tahun 1999, pada Pasal 72 (4) dinyatakan bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir. Artinya tidak ada upaya hukum lainnya yang bisa ditempuh jika ada pihak yang keberatan. Dengan demikian maka upaya banding atas putusan Ketua Pengadilan Negeri tersebut dapat diajukan, baik jika permohonan pembatalan putusan arbitrase diterima sepenuhnya, diterima sebagian atau ditolak sama sekali. Adapun yang dimaksud "banding" dalam Ayat (4) adalah hanya terhadap pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 (5).

Berbeda halnya dengan putusan arbitrase ala Rv, di mungkinkan untuk dimintakan banding ke Mahkamah Agung, dalam hal ini tidak semua putusan arbitrase dapat dimintakan banding ke Mahkamah Agung sebagaimana tersurat dalam Pasal 641 Rv yang menunjuk pada Pasal 163 RO (*Reglement op de Rechtsvordering Organisatie un het Belerid du justice*) suatu peraturan setelah Perang Dunia Ke II tentang susunan dan

³³ Munir fuady Op.cit.hal 112

kekuasaan Badan-badan Peradilan di Indonesia) terhadap putusan arbitrase mengenai sengketa yang bernilai lebih dari 500 Gulden (lima ratus gulden) dapat dimintakan banding kepada *Hooggerechtshof* (Mahkamah Agung di zaman penjajahan Belanda). Bahwa ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi batasan terhadap putusan arbitrase yang dapat dimintakan permohonan banding. Sehingga tidak semua putusan dapat dibanding, ada pembatas jumlah nilai pokok yang disengketakan, kurang dari nilai pokok sengketa yang ditentukan dalam pasal ini maka putusan tersebut tidak dapat diajukan banding. Adanya pembatasan jumlah nilai pokok sengketa dimaksud pada dasarnya bertujuan membatasi atau mengurangi volume permohonan banding terhadap putusan arbitrase

Ketentuan pembatasan tersebut diatas juga diatur dalam UU M A No. 1 tahun 1950 Pasal 15 yang berbunyi sebagai berikut , "Selain dari pada kekuasaan mengadili dalam tingkatan peradilan kedua sebagai yang timbul dalam konstitusi , maka Mahkamah Agung juga memutuskan pada tingkatan peradilan kedua atas putusan-putusan wasit yang ternyata mengenai nilai harga Rp. 25.000,- atau lebih". Dari rumusan Pasal 15 tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa terhadap semua putusan wasit (arbitrase) yang timbul dengan jumlah atau nilai lebih dari Rp. 25.000,- dapat diajukan banding kepada Mahkamah Agung, kecuali para pihak secara tegas menyatakan melepaskan hak mereka untuk banding.

Selain hal tersebut diatas, dinyatakan pula bahwa putusan arbitrase dapat dimohonkan pemeriksaan pada tingkat peradilan kedua, oleh salah satu dari pihak-pihak yang berkepentingan dapat dimohonkan pemeriksaan ulangan oleh Mahkamah Agung. Sebelum mengambil keputusan Mahkamah Agung dapat mendengar para pihak yang bersengketa dalam sidang pengadilan. Putusan Mahkamah Agung tentang hal ini merupakan putusan tingkat kedua dan terakhir. Ini berarti tiada kasasi maupun peninjauan kembali yang dapat diajukan terhadap suatu putusan arbitrase.

Penegasan ketentuan ini disebutkan dalam Pasal 642 Rv, bahwa walaupun para pihak telah memperjanjikan hal yang demikian dalam perjanjian mereka, namun tiada kasasi maupun peninjauan kembali yang dapat diajukan terhadap putusan arbitrase. Hak banding terhadap putusan arbitrase tersebut bersifat mutlak secara fakultatif, artinya selama perjanjian tidak menghapuskan hak-hak para pihak untuk banding, maka secara mutlak hak itu melekat pada diri para pihak. Sebaliknya apabila mereka sepakat menghapuskan hak itu, undang-undang dapat membenarkan asal hal itu dinyatakan secara tegas dalam perjanjian³⁴. Dari penegasan Pasal 642 Rv tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 641 Rv pada satu segi undang-undang memberi hak upaya banding bagi para pihak terhadap putusan arbitrase, namun dari segi lain, undang-undang sendiri menutup hak para pihak untuk mengajukan kasasi maupun peninjauan kembali. Tegasnya

³⁴ Rachmadi usman, *Op cit*, hal 98

putusan arbitrase tidak bisa dikasasi atau ditinjau kembali. Selesai diputus dalam tingkat banding dengan sendirinya putusan sudah bersifat ***final dan binding***³⁵. Pada pokoknya Pasal 641 Rv dimaksud memberikan kebebasan dan hak opsi kepada para pihak, apakah mereka mempergunakan hak banding atau tidak, sepenuhnya hal itu diserahkan kepada mereka untuk memilih (M.Yahya harahap,1991:338)³⁶. Jika dicermati pada bagian akhir kalimat yang tersurat dalam Pasal 641 Rv dijelaskan bahwa "para pihak secara tegas dapat melepaskan hak mereka untuk naik banding". Dengan demikian para pihak boleh tetap mempertahankan hak banding yang diberikan Pasal 641 Rv, sebaliknya boleh menyampingkan hak itu. Dalam hal mereka hendak menyampingkan hak banding, dapat dilakukan dengan cara mencantumkan pelepasan hak banding didalam perjanjiannya. Pelepasan hak banding dalam perjanjian mereka harus dirumuskan secara tegas-tegas.

Adapun ketentuan Pasal 108 s/d 111 U U MA. No. 1 tahun 1950 mengatur prosedur banding tersebut yang antara lain memuat :

1. Permohonan banding harus disampaikan dengan surat kepada Ketua Mahkamah Agung dalam tempo satu bulan setelah putusan wasit diberlakukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
2. Permohonan pemeriksaan ulang yang dapat diterima dicatat oleh panitera/hakim Mahkamah Agung RI dan diberitahukan kepada pihak lawan.

³⁵ M.Yahya Harahap, Op.cit.hal.256

³⁶ ibid.hal.338

3. Bila dipandang perlu Mahkamah Agung sebelum mengambil keputusan mendengar para pihak yang berperkara dalam sidang pengadilan.

Bahwa Undang Undang No. 1 tahun 1950 ini telah dicabut oleh Undang Undang No. 13 tahun 1965 dan Undang Undang No. 14 tahun 1985 menyatakan tidak ada kewenangan bagi Mahkamah Agung untuk mengadili baik sebagai peradilan banding maupun peradilan kasasi terhadap putusan perwasitan sehingga Mahkamah Agung tidak berwenang untuk memeriksa permohonan kasasi . Namun demikian sejalan dengan berlakunya ketentuan Undang Undang No.30 Tahun 1999 dimana pada Pasal 72 (5) secara tegas dinyatakan bahwa "Mahkamah Agung mempertimbangkan serta memutuskan permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan banding tersebut diterima oleh Mahkamah Agung". Terhadap putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tersebut merupakan putusan dalam tingkat pertama dan terakhir.

Selanjutnya dalam Pasal 72 (5) dinyatakan bahwa Mahkamah Agung akan memutus permohonan banding ini dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan banding diterima oleh Mahkamah Agung. Jadi disini ada jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diputus dalam tingkat pertama dan terakhir oleh mahkamah Agung. Apakah dalam praktek masih bisa dipertahankan tiga puluh hari sesudah putus permohonan

banding ini atau tidak masih harus dijawab menurut realita kemudian hari. Tetapi melihat pengalaman kami dalam praktek hal ini patut disangsikan. Dalam Undang-undang memang bagus sudah harus selesai dan diputus pemeriksaan oleh Mahkamah Agung. Dan prakteknya mungkin bisa berbulan-bulan kalau tidak bertahun-tahun. Akan tetapi dengan adanya keharusan tiga puluh hari ini sudah menjadi petunjuk dan dorongan yang baik, bagi Mahkamah Agung untuk bekerja secepat mungkin, bisa menyelesaikan dalam 30 (tiga puluh) hari.

Mengenai jangka waktu yang diperkenankan oleh Undang Undang Arbitrase No.30 Tahun 1999 untuk mengajukan banding atas putusan pembatalan tersebut ke Mahkamah Agung oleh para pihak yang tidak puas dengan putusan Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan pembatalan tidak ditentukan sama sekali, yang ada justru hanya batasan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari bagi Mahkamah Agung dalam memberikan putusannya. Jangka waktu tersebut dihitung sejak diterimanya permohonan banding tersebut oleh Mahkamah Agung (lihat penjelasan Pasal 72).

Bahwa banding atas putusan Arbitrase yang bersifat final dan mengikat walaupun tidak diperkenankan menurut hemat kami, hal ini hampir sama dengan upaya banding, yang dimaksud "**banding**" adalah hanya terhadap pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, terutama apabila permohonan pembatalan putusan arbitrase

tersebut diterima dan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri, karena dapat dikasasi ke Mahkamah Agung.

Menurut Prof. Erman Radjagukguk,³⁷ Pasal 72 (4) membuka kemungkinan bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir. Mahkamah Agung mempertimbangkan serta memutuskan permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dalam waktu paling lama 30 hari setelah permohonan banding tersebut diterima oleh Mahkamah Agung.

Sebagaimana diketahui bahwa di Nederland permohonan banding terhadap putusan arbitrase harus diajukan kepada Arron Dissements Recht bank atau Pengadilan Tinggi.

Menurut Prof. Subekti hal ini adalah tepat, karena Pengadilan Tinggi merupakan pengadilan banding, yang mengulangi semua segi pemeriksaan, baik yang mengenai fakta maupun yang mengenai hukumnya, sedangkan Mahkamah Agung pada prinsipnya adalah pengadilan kasasi.

Bagaimana menurut UU No 30 tahun 1999 mengatur hal ini ?

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 UU No. 30 tahun 1999 merumuskan sebagai berikut; " Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase". Saat ini Pengadilan di Indonesia menerima klausula arbitrase sebagai sesuatu yang

³⁷ Erman Radjagukguk, *Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan*, Jakarta, Candra Pertama, 2000, hal.13

mengikat dan pengadilan Negeri tidak akan campur tangan mengadili perkara yang sudah dimufakati oleh para pihak untuk dibawa ke arbitrase.

Menurut Prof. M.R Sudargo Gautama; "Ketegasan dalam UU Arbitrase mengenai tidak berwenang Pengadilan Negeri ini merupakan suatu kemajuan."³⁸ Dengan adanya ketegasan yang tersebut dalam pasal 3 UU arbitrase ini maka bisa dikatakan bahwa apabila terdapat sesuatu sengketa dan para pihak membawanya ke Pengadilan Negeri biasa sehari-hari, maka Pengadilan Negeri harus secara karena jabatan (*ambtshalve*) menyatakan dirinya tidak berwenang. Jadi tidak perlu pihak tergugat mengajukan eksepsi mengenai tidak berwenangnya pengadilan. Pengadilan atas inisiatif sendiripun karena jabatan dapat menyatakan tidak berwenang walaupun para pihak tidak mengajukan suatu tangkisan bahwa Pengadilan Negeri biasa tidak berwenang memeriksa perkara ini.

Tidak mungkin untuk mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri bilamana terdapat klausula arbitrase dalam suatu perjanjian. Mahkamah Agung sudah memprakarsai dalam serangkaian putusan bahwa Pengadilan Negeri menyatakan "**NO**" (*Niet on Vankheljk*) perkara yang diajukan kehadapannya, bilamana terdapat klausula arbitrase dalam perjanjian bersangkutan.

³⁸ Prof. Sudargo Gautama dalam "UU Arbitrase baru 1999", hal 15 . penerbit PT Citra Aditya Bakti ,Bandung, 1999.

Beberapa catatan jurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan karena klausula arbitrase pengadilan jadi tidak berwenang antara lain :

1. Perkara Ahyu Forestry ;

Co Ltd lawan PT Balapan Raya, Putusan Mahkamah Agung No. 2924/K/SP/1981 tanggal 8 Februari 1982.

Perkara ini menyangkut sengketa antara suatu perusahaan Korea dan partner Indonesia, berkenaan dengan usaha Joint Ventura. Atas permohonan pihak Indonesia Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan sah peralihan management dari pihak asing kepada pihak Indonesia, walaupun ada "**Arbitration Clause**" dalam perjanjian Joint Ventura ini. Dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Jakarta, telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri tersebut. Akan tetapi dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung tidak membenarkan pendirian Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi ini. Karena adanya klausula arbitrase ini yang menunjuk pada ICC, seharusnya Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini.

2. Perkara PT Metropolitan Timbers lawan PT Gapki Trading Co, Putusan MA No. 2225K/SIP/1976 tanggal 30 September 1983.

Perkara ini berkenaan dengan eksploitasi konsesi kayu.

Namun dalam praktek yang terjadi selama ini dalam beberapa catatan perkara yang akan diungkapkan dalam Bab III dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa yang sudah disepakati melalui lembaga arbitrase, masih terbuka kemungkinan sengketa yang bersengketa sampai juga ke pengadilan. Jika sengketa tidak sampai ke pengadilan, maka salah satu tujuan penyelesaian melalui arbitrase yaitu penyelesaian sengketa yang cepat tidak akan tercapai. Perkara tersebut dapat sampai tingkat kasasi bahkan tingkat "Peninjauan Kembali" yang membutuhkan waktu bertahun-tahun. Oleh karenanya pengadilan berperan penting bagi berkembangnya lembaga arbitrase karena sengketa-sengketa bisnis termasuk yang didalamnya perjanjiannya memuat klausula arbitrase akhirnya dapat bermuara juga ke Pengadilan khususnya mengenai pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase tersebut.

3. *Bagaimana peran Pengadilan terhadap pelaksanaan putusan arbitrase ?*

Undang-undang No. 30 Tahun 1999 mencantumkan peranan pengadilan di Indonesia untuk memperkuat proses arbitrase sejak awal sampai dengan pelaksanaan putusan arbitrase tersebut.³⁹

Pasal 11 (1) menyatakan bahwa dengan adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan

³⁹ Ibidhal.9

penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjian ke Pengadilan Negeri .

Pasal 11 (2) menyatakan Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam UU ini.

Pasal 13 (1) menyebutkan bahwa dalam hal para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai pilihan arbiter atau tidak ada ketentuan yang dibuat mengenai pengangkatan arbiter. Dalam suatu Arbitrase Ad-hoc bagi setiap ketidak-epakatan dalam penunjukkan seorang atau beberapa arbiter, para pihak dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menunjuk seorang arbiter dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah termohon menerima usul pemohon, permohonan dari salah satu pihak. Ketua Pengadilan Negeri dapat mengangkat arbiter tunggal [Pasal 14 (3)].

Ayat (4) pasal ini mengatakan, Ketua Pengadilan Negeri akan mengangkat arbiter tunggal berdasarkan daftar nama yang disampaikan oleh para pihak, atau yang diperoleh dari organisasi atau Lembaga Arbiter sebagaimana dimaksud dalam pasal 34, dengan memperhatikan baik rekomendasi maupun keberatan yang diajukan oleh para pihak terhadap orang yang bersangkutan. Dalam pembentukan Majelis Arbitrase, adakalanya 2 arbiter yang telah ada gagal menunjuk arbiter ketiga sebagaimana telah disepakati.

Pasal 15 (4) menyebutkan dalam hal kedua arbiter yang telah ditunjuk masing-masing pihak tidak berhasil menunjuk arbiter ketiga dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah arbiter terakhir yang ditunjuk, atas permohonan salah satu pihak. Ketua Pengadilan Negeri dapat mengangkat arbiter ketiga. Ayat (5) pasal ini mengatakan, terhadap pengangkatan arbiter yang dilakukan Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Ayat (4), tidak dapat diajukan upaya pembatalan.

Selanjutnya Pengadilan Negeri juga berperan sebagai tempat pendaftaran putusan arbiter dalam rangka pelaksanaan putusan arbitrase Nasional. Pasal 59 (1) menyebutkan bahwa dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri.

Penyerahan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), dilakukan dengan pencatatan dan penanda-tanganan pada bagian akhir atau dipinggir putusan oleh Panitera Pengadilan Negeri dan arbiter atau kuasanya yang menyerahkan, dan catatan tersebut merupakan akta pendaftaran [Pasal 59 (2)].

Arbiter atau kuasanya wajib menyerahkan putusan dan lembar asli pengangkatan sebagai arbiter atau salinan otentiknya kepada Panitera Pengadilan Negeri [Pasal 59 (3)], tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud berakibat putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan [Pasal 59

(4)]. Adakalanya pihak yang harus melaksanakan putusan arbitrase tidak bersedia melaksanakannya. Dalam hal ini menurut Pasal 61, Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan agar pihak yang bersangkutan melaksanakan putusan arbitrase dimaksud. Perintah tersebut berdasarkan permohonan eksekusi yang didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri. Pengadilan tersebut diberikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan didaftarkan [Pasal 62 (1)]. Ketua Pengadilan Negeri sebelum memberikan perintah pelaksanaan, memeriksa terlebih dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5, serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum [Pasal 62 (2)]. Dalam hal putusan arbitrase tidak memenuhi syarat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) Ketua Pengadilan Negeri menolak permohonan pelaksanaan eksekusi dan terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri tersebut tidak terbuka upaya hukum apapun [Pasal 62 (3)]. Menurut Pasal 62 (4), Ketua Pengadilan Negeri tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase.

Selanjutnya Pasal 63 menentukan bahwa perintah Ketua Pengadilan Negeri ditulis pada lembar asli dan salinan otentik putusan arbitrase yang dikeluarkan. Akhirnya, Pasal 64 menyatakan bahwa putusan arbitrase yang telah dibubuhi perintah Ketua Pengadilan negeri, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan putusan dalam perkara perdata yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 69 menyatakan bahwa setelah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan perintah eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, maka pelaksanaan selanjutnya dilimpahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri secara relatif berwenang melaksanakannya.

Jika para pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan putusan arbitrase dengan sukarela, maka Ketua Pengadilan Negeri yang melaksanakannya seperti suatu putusan pengadilan biasa yang sudah merupakan kekuatan pasti. Sikap Pengadilan dimaksud sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 61 yang berbunyi sebagai berikut " Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa". Halmana sesuai pula dengan Pasal 637 RV.

Selanjutnya mengenai perintah eksekusi yang harus dijalankan oleh salah satu pihak dilaksanakan paling lama 30 hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri. Apakah hal ini betul-betul dapat dilaksanakan ? Karena dalam praktek sehari-hari pelaksanaannya tidak demikian walaupun sering tertunda berbulan-bulan maupun sampai tahunan.

Dalam Pasal 62 (2) dinyatakan bahwa "Ketua Pengadilan Negeri sebelum memberikan perintah pelaksanaan, terlebih dahulu memeriksa apakah putusan arbitrase telah memenuhi ketentuan Pasal 41, Pasal 5 Undang-undang Arbitrase serta tidak bertentangan dengan

kesusilaan dan ketertiban umum. Isi putusan Pengadilan Negeri tidak ditinjau kembali dan tidak diperiksa apakah diputus secara benar atau tidak mengenai pertimbangannya.

Dalam Pasal 62 (3) dinyatakan bahwa "Dalam hal putusan Arbitrase tidak memenuhi keputusan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2), Ketua Pengadilan Negeri menolak permohonan pelaksanaan eksekusi dan terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri tersebut tidak terbuka upaya hukum apapun".

Menurut Ayat (3) dapat diketahui bahwa betapa besarnya kekuasaan Ketua Pengadilan Negeri dalam pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase. Justru dalam praktek hal ini sangat berbahaya, karena sangat mudah untuk disalah gunakan yang dapat menimbulkan praktek-praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Ketua Pengadilan Negeri tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan Arbitrase Pasal 62 (4). Tidak diperiksanya alasan atau pertimbangan putusan arbitrase oleh Ketua Pengadilan Negeri agar putusan arbitrase tersebut benar-benar mandiri, final dan mengikat. "Perintah Ketua Pengadilan Negeri ditulis dalam lembar asli dan salinan otentik putusan arbitrase yang dikeluarkan". Mengenai fiat eksekusi diatur dalam Pasal 63.

Eksekusi putusan arbitrase dilaksanakan seperti eksekusi suatu putusan pengadilan, hal ini diatur dalam Pasal 64 yang berbunyi " Putusan arbitrase yang telah dibubuhi perintah Ketua Pengadilan Negeri,

dilaksanakan sesuai ketentuan pelaksanaan putusan dalam perkara perdata yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap”.

Untuk melaksanakan perintah eksekusi dari ketua Pengadilan Negeri berlaku peraturan-peraturan dalam HIR mengenai eksekusi dari putusan-putusan dalam perkara perdata yang sudah memperoleh status dapat dijalankan atau istilah bahasa Belandanya “*Kracht vaneewijsde*.”

Fase pelaksanaan melalui pengadilan inilah yang akan menimbulkan kesulitan dalam praktek dan akan ditakuti oleh para penanam modal dari luar negeri atau pihak-pihak kreditur luar negeri, karena disinilah tampak kelemahan sistem arbitrase ⁴⁰.

Selanjutnya dikemukakan oleh Prof. Mr. Dr Sudargo Gautama bahwa : eksekusi melalui pengadilan Negeri ini seringkali akan terbukti menjadi sesuatu masalah yang menakutkan bagi pihak pemenang. Karena disini akan mulai lagi segala kesulitan dari mengajukan perkara melalui saluran Pengadilan Negeri Biasa. Bukankah untuk dapat memulai eksekusi harus dilakukan peneguran. Dan setelah 8 (delapan) hari peneguran ini seharusnya ditindak lanjuti dengan sitaan dan kemudian lelang dihadapan kantor lelang setempat daripada asset pihak yang dikalahkan. Tapi disini timbul kemungkinan masuknya berbagai pihak, baik pihak yang harus melaksanakan eksekusi maupun pihak ketiga yang mempunyai kepentingan

⁴⁰ Prof. Sudargo Gautama dalam buku *Undang-undang arbitrase baru 1999*, hal 131.

dan dapat menyanggah segala sesuatu yang telah didasarkan atas putusan eksekusi ini. Misalnya barang-barang yang telah disita dan hendak dilelang itu bukan merupakan bahwa barang-barang yang telah disita dan hendak dilelang itu bukan dari pihak yang dieksekusi. Ataupun sitaan yang telah dilakukan dalam rangka eksekusi ini adalah keliru dan diletakan atas barang-barang yang tidak ada hubungannya dengan si pemilik. Jadi ada macam-macam keberatan yang bisa diajukan dari berbagai pihak untuk memperlambat dilaksanakannya eksekusi terhadap pihak yang kalah ini.

Bahwa peran lembaga peradilan nampak pula dalam hal adanya pengajuan permohonan pembatalan, dimana menurut Pasal 71, permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Ketua Panitera Pengadilan Negeri. Permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri [Pasal 72 (1)]. Apabila permohonan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) diterima, Ketua Pengadilan Negeri akan menentukan lebih lanjut akibat dari pembatalan terhadap putusan arbitrase apakah dibatalkan seluruhnya atau sebagian putusan tersebut.

Lebih lanjut peran Peradilan berkenaan putusan arbitrase nampak dalam Pasal 72 (4) dimana terhadap putusan Pengadilan Negeri dapat diajukan banding ke Mahkamah Agung yang memutuskan dalam tingkat pertama dan terakhir. Mahkamah Agung mempertimbangkan serta

memutuskan permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam Ayat (4) dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan banding tersebut diterima oleh Mahkamah Agung [Pasal 72 (5)]. Arbitrase merupakan alternatif dari pengadilan, namun bantuan pengadilan agar institusi arbitrase bisa efektif amat menentukan diakui baik oleh hukum nasional maupun hukum internasional sejak lama, yaitu mulai dari Protocol Geneva 1923 sampai dengan Konvensi New York 1958.⁴¹

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa sekalipun suatu perjanjian yang memuat klausula arbitrase, sehingga pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa/perselisihan yang memuat klausula dimaksud, namun peran dan keterlibatan lembaga/ institusi pengadilan sangat diperlukan sejak awal proses penyerahan penyelesaian perselisihan sengketa arbitrase sampai pada tahap pelaksanaan putusan arbitrase. Demikian halnya dalam hal salah satu pihak yang berkepentingan keberatan atas suatu putusan arbitrase, sehingga pada akhirnya putusan arbitrase dimaksud akan dipertimbangkan kembali dan diputus oleh Pengadilan.

Bahkan sekiranya pun atas putusan Pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara arbitrase masih dirasakan belum memenuhi rasa keadilan/ merugikan kepentingan salah satu pihak, dapat mengajukan upaya banding

⁴¹ Erman Radjagukguk, *ibid*, Halaman 3

ke Mahkamah Agung yang memutus perkara dalam tingkat pertama dan terakhir [vide Pasal 72 (4) Undang Undang No.30 Tahun 1999].

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, tidak dapat dipungkiri keterlibatan ataupun peran yang sangat besar oleh institusi/ lembaga peradilan dalam penanganan masalah arbitrase ataupun dalam memperlancar proses berhasil atau tidaknya sehubungan dengan penolakan salah satu pihak untuk melaksanakan putusan arbitrase itu sendiri baik yang termuat dalam aturan Rv maupun dengan telah berlakunya ketentuan Undang Undang Arbitrase tersebut.

BAB IV

PENUTUP

1. SIMPULAN

Berdasarkan uraian, kajian serta pembahasan pada bab-bab terdahulu dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Sejalan perkembangan dunia usaha dan perkembangan lalu lintas dibidang perdagangan baik nasional maupun internasional, berakibat semakin luas pula hubungan hukum yang diadakan para pengusaha, sehingga tidak dapat dipungkiri kemungkinan akan terjadinya sengketa didalam pemenuhan hak dan kewajiban. Terlebih lagi sudah menjadi ciri profesi pengusaha bahwa setiap sengketa yang timbul ingin diselesaikan dengan baik dan dalam waktu yang relatif singkat oleh suatu badan diluar peradilan umum yang terdiri dari para ahli yang menguasai bidang usaha yang disengketakan.
- b. Bahwa meskipun sengketa dibidang perdagangan yang timbul dapat diselesaikan melalui peradilan negara/peradilan umum, sebagian besar pengusaha lebih cenderung menyukai proses penyelesaian sengketa diantara mereka diselesaikan melalui arbitrase dari pada pengadilan dengan pertimbangan antara lain :

- Jika penyelesaian sengketa dilakukan melalui peradilan umum akan menyita waktu yang lama dan biaya yang besar, meskipun pada kenyataannya dalam beberapa kasus arbitrase juga membutuhkan waktu yang cukup lama;
- Disamping hal diatas, penyelesaian sengketa melalui peradilan umum dapat berakibat merenggangkan hubungan dagang diantara mereka karena akan dicari siapa yang salah dan yang benar, sedangkan jika diselesaikan melalui arbitrase justru akan melahirkan putusan yang kompromis yang dapat diterima oleh kedua belah pihak;
- Melalui sarana arbitrase, penyelesaian sengketa yang dilakukan secara tertutup sehingga tidak ada publikasi yang menjadi momok bagi pengusaha, sedang jika melalui peradilan umum pemeriksaan perkara dilakukan secara terbuka, sehingga dimungkinkan akan berakibat melahirkan penilaian yang tidak baik bagi kedua belah pihak;

c. Bahwa putusan arbitrase dapat dimintakan pembatalan ke Pengadilan Negeri, oleh karena :

1. berdasarkan suatu putusan arbitrase yang telah dijatuhkan, pihak-pihak yang merasa dirugikan kepentingannya terhadap putusan arbitrase, dapat mengajukan perlawanan atau tuntutan

pembatalan dengan alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Rv jika putusan arbitrase dijatuhkan sebelum berlakunya Undang Undang Arbitrase maupun atas dasar hal-hal yang disyaratkan setelah berlakunya Undang Undang No.30 Tahun 1999 tersebut.

2. perlawananan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 643 Rv menganut sistim yang sangat terbuka bagi kemungkinan pembatalan atas suatu keputusan arbitrase yang telah dijatuhkan, sedang dalam Pasal 70 Undang Undang No.30 Tahun 1999, terhadap tuntutan pembatalan putusan arbitrase hanya dapat dimungkinkan dalam hal-hal yang sifatnya luar biasa yakni putusan arbitrase tersebut mengandung unsur-unsur bahwa surat atau dokumen yang diajukan diakui sebagai palsu atau dinyatakan palsu, atau ditemukannya dokumen yang sifatnya menentukan disembunyikan oleh pihak lawan, ataupun jika putusan diambil dari hasil tipu muslihat salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.
3. jika dilihat alasan pembatalan putusan arbitrase yang disebutkan dalam undang undang, maka sebenarnya upaya pembatalan tersebut bukanlah upaya hukum yang biasa, tetapi merupakan upaya hukum yang luar biasa sehingga tidak sama dengan

upaya hukum banding dalam sistim peradilan umum. Karena itu pula sungguhpun tidak dengan tegas-tegas disebutkan dalam undang undang, akan tetapi jika melihat kepada alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase, maka upaya hukum pembatalan merupakan hukum memaksa yang tidak dapat dikesampingkan oleh kedua belah pihak.

4. sekalipun adanya klausula putusan arbitrase sebagai putusan akhir yang mengikat, tidak cukup menjadikan alasan tidak diterimanya permohonan yang diajukan oleh karena Pasal 643 Rv secara tegas dinyatakan terhadap putusan yang tidak bisa dibanding dapat diajukan perlawanan atau bantahan dengan alasan-alasan yang disyaratkan dalam pasal dimaksud. Hal ini penting karena jika alasan permohonan pembatalan didasarkan pada hal-hal yang diberikan oleh undang-undang (Rv/ UU No.30 Tahun 1999) apabila terbukti ditemukan fakta, tentunya dapat menjadikan dasar bagi Pengadilan untuk memeriksa materi/ pokok perkara dari awal sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku maupun menurut yang dikehendaki para pihak dalam perjanjian.
5. konsekuensi hukum terhadap putusan arbitrase yang dibatalkan oleh pengadilan dapat berupa :

a. Batalnya seluruh atau sebagian isi putusan tersebut. Hal ini harus ditentukan dengan tegas dalam pembatalan oleh ketua pengadilan negeri;

b. Ketua Pengadilan Negeri dapat memutuskan bahwa perkara tersebut diperiksa kembali oleh :

- arbiter yang sama, atau;
- arbiter yang lain, ataupun
- tidak mungkin lagi diselesaikan melalui arbitrase

Namun demikian, Ketua Pengadilan Negeri dapat juga menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase dimaksud, apabila alasan alasan pembatalan tersebut tidak sejalan dengan yang disyaratkan dalam Pasal 70 Undang Undang No.30 Tahun 1999.

d. Terhadap putusan Pengadilan Negeri atas pembatalan putusan arbitrase bisa dimintakan banding, dengan alasan :

1. mengacu pada Pasal 72 ayat 4 Undang Undang No.30 Tahun 1999, dapat diketahui bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri (seharusnya putusan Ketua Pengadilan Negeri) dapat diajukan banding ke Mahkamah Agung. Dengan demikian upaya banding atas putusan ketua Pengadilan Negeri tersebut dapat diajukan baik jika permohonan pembatalan putusan arbitrase diterima sepenuhnya, diterima sebagian ataupun ditolak sama

sekali. Permohonan banding tersebut harus dilakukan secara tertulis oleh pihak-pihak yang ingin mengajukan banding atau oleh kuasanya.

2. sejalan dengan kajian terhadap keputusan pengadilan negeri maupun Mahkamah Agung berkenaan permohonan pembatalan putusan arbitrase, dapat diuraikan bahwa layaknya proses dalam hukum acara perdata sebelum pemeriksaan memasuki materi/pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan terhadap pengajuan banding apakah telah sesuai dengan prosedur banding yang telah ditentukan oleh undang undang.
3. Dalam Pasal 72 (5) dinyatakan bahwa Mahkamah Agung akan memutus permohonan banding ini dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan banding diterima oleh Mahkamah Agung. Jadi disini ada jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diputus dalam tingkat pertama dan terakhir oleh mahkamah Agung.
4. Mengenai jangka waktu yang diperkenankan oleh Undang Undang Arbitrase No.30 Tahun 1999 untuk mengajukan banding atas putusan pembatalan tersebut ke Mahkamah Agung oleh para pihak yang tidak puas dengan putusan Ketua Pengadilan

Negeri atas permohonan pembatalan tidak ditentukan sama sekali, yang ada justru hanya batasan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari bagi Mahkamah Agung dalam memberikan putusannya. Jangka waktu tersebut dihitung sejak diterimanya permohonan banding tersebut oleh Mahkamah Agung [lihat penjelasan Pasal 72 (5)].

5. Bahwa banding atas putusan Arbitrase yang bersifat final dan mengikat walaupun tidak diperkenankan, menurut hemat kami hal ini hampir sama dengan upaya banding, yang dimaksud "banding" adalah hanya terhadap pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70.

e. Bahwa lembaga Peradilan sangat berperan dalam melaksanakan putusan arbitrase, mengingat :

1. berdasarkan rumusan baik dalam Rv maupun dengan berlakunya ketentuan UU Arbitrase No.30 tahun 1999, jelas mencantumkan peranan institusi/lembaga peradilan dalam memperkuat proses arbitrase sejak awal sampai dengan pelaksanaan putusan arbitrase tersebut,
2. dalam suatu perjanjian yang memuat klausula arbitrase, hal tersebut meniadakan hak para pihak untuk mengajukan

penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri. Dengan klausula tersebut maka Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan dalam penyelesaian sengketa, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang Undang Arbitrase.

3. Bantuan lembaga/institusi peradilan untuk mengembangkan arbitrase dapat dicermati mulai dari Pasal 13 (1) dimana disebutkan bahwa dalam hal para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai pemilihan arbiter atau tidak ada ketentuan yang dibuat mengenai pengangkatan arbiter, maka Ketua Pengadilan Negeri yang akan menetapkan/menunjuk arbiter atau majelis arbiter.
4. Pengadilan Negeri juga berperan sebagai tempat pendaftaran putusan arbitrase dalam rangka pelaksanaan putusan arbitrase sebagaimana dalam Pasal 59 (1) yang menyebutkan bahwa dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan ke Panitera Pengadilan Negeri. Pentingnya pendaftaran/deponir tersebut dikarenakan hal tersebut merupakan dasar pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase.

5. Lebih lanjut dalam hal para pihak keberatan terhadap putusan arbitrase, maka para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagaimana disebutkan dalam Rv maupun yang setelah berlakunya Undang Undang Arbitrase. Demikian halnya terhadap putusan Pengadilan Negeri yang membatalkan putusan arbitrase masih dimungkinkan untuk dimintakan banding ke Mahkamah Agung.
6. Sebagian besar kasus-kasus putusan arbitrase yang diajukan ke pengadilan tidak menyentuh hal-hal yang disyaratkan Pasal 70 Undang Undang No.30 Tahun 1999 sebagai landasan pengajuan tuntutan pembatalan putusan arbitrase, bahkan terkesan kurang memahami penerapan Pasal 70 dimana didalam penjelasan pasalnya dinyatakan bahwa alasan-alasan permohonan pembatalan putusan yang dimaksudkan dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan.

II. SARAN

- a. Disarankan kepada pemerintah untuk mensosialisasikan ketentuan Undang Undang No.30 Tahun 1999 kepada seluruh pihak yang terkait

terutama para hakim, arbiter dan pelaku dunia usaha, agar proses arbitrase sebagaimana dimaksudkan sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa diluar peradilan umum dapat sejalan dengan prinsip **"cepat, sederhana dan biaya ringan"**.

- b. Disarankan agar Pengadilan Negeri dalam memeriksa permohonan pembatalan putusan arbitrase, benar-benar menerapkan ketentuan Pasal 72 (3), dimana dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sudah dapat memberikan keputusannya.
- c. Selanjutnya disarankan pula agar Mahkamah Agung dalam memutus permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 (5) sudah harus memberikan keputusannya tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh)hari, mengingat penyelesaian sengketa melalui sarana arbitrase justru sangat diharapkan oleh pelaku dunia usaha yang bersengketa.
- d. Disarankan kepada pihak arbiter atau majelis arbiter selain benar-benar menguasai bidang yang menjadi pokok sengketa juga perlu memahami aspek juridis dalam beracara guna menghindari hambatan dalam pelaksanaan eksekusi putusan.

- e. Diharapkan adanya kejelasan terhadap penerapan ketentuan Pasal 70, apakah hal-hal sebagaimana dimaksudkan dalam pasal tersebut harus terlebih dahulu diperoleh putusan pidananya sebagai dasar pertimbangan bagi hakim dalam memeriksa dan memutus permohonan pembatalan suatu putusan arbitrase.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. **Abdurrahman, HM, Pidato Dies Natalis ke XIX, Universitas Trisakti Jakarta Tahun 1981.**
2. **Adolf.Huala, Arbitrase Komersial Internasional, Rajawali Press, Jakarta, 1993.**
3. **Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman R.I Himpunan Bahan Penataran Latihan Tenaga Teknis Peneliti Hukum (Angkatan II) Jakarta,1982**
4. **Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman R.I Himpunan Bahan Penataran Latihan Tenaga Teknis Peneliti Hukum (Angkatan II, 10 s/d 30 Nopember 1981) Jakarta,1982**
5. **Bagian Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Metodologi Penelitian Ilmu Sosial Dengan Orientasi Pada Penelitian Bidang Hukum, Semarang 1994.**
6. **Bond,Stephen R, "How to Draft an Arbitration Clause",Journal of International Arbitration 66 (1989).**
7. **Black Henry Campbell et al, Black Law Dictionary (sixth edition) Weat Publishing Co. St Panb, Minnesofa, Usa 1991.**
8. **Bunga Rampai Hukum Dan Yurisprudensi, Proyek Yurisprudensi,1979.**

9. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Kedua), Balai Pustaka, Jakarta, 1999.
10. De Wetboeken, Wetten En Verordeningen, Benevens De Gorndwet Van De Republick Indonesie, Ichtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta, 1989.
11. Drewit, Brian A, "Drafting Arbitration Clause", Arbitration (February, 1996).
12. Drs.Lili Irahali, BA, "Sengketa Dagang Roche Indonesia dan PD. Tempo Antara Penyelesaian Arbitrase dan Hukum, makalah pada Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia Mengenang alm.Prof.Dr.Komar Kantaatmadja, SH.LLM, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
13. Fuady, Munir, Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis), PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
14. Gautama, Sudargo, Undang Undang Arbitrase Baru, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
15. Harahap. M. Yahya, Arbitrase, Pustaka Kartini, 1991, Jakarta.
16. Harahap. M. Yahya, Arbitrase, Sinar Grafika, Edisi kedua, Jakarta, 2001.
17. Harahap. M. Yahya, Alternatif Dispute Resolution, BPHN, Jakarta, 1996.
18. Harahap. M. Yahya, "Segi-Segi Hukum Perjanjian, Penerbit Alumni Bandung, Cetakan Kedua, 1986.

19. Hartono, CFG Sunaryati, Penelitian Hukum Di Indonesia pada Akhir Abad Ke 20, Alumni Bandung, 1994.
20. Hartono, CFG Sunaryati, Kembali Ke Metode Penelitian Hukum
21. Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, Disusun Menurut Sistem Engelbrecht, Ichtiar Baru, Van Hoeve, Jakarta 1989.
22. Himpunan Putusan Mahkamah Agung, Tentang Arbitrase MARI, Proyek Yurisprudensi, 1990.
23. Hoeve, W. Van Kamus Belanda-Indonesia, Ichtiar Baru, Van Hoeve, Jakarta, 1992
24. Hukum Acara Perdata Barat (Reglement op de Vordering).
25. Huala Adolf,SH.LLM,"Beberapa Catatan Tentang Arbitrase dalam Milenium Baru, makalah pada Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia, Mengenang alm.Prof Dr.Komar Kantaatmadja,SH.LLM, PT.Citra Aditya Bakti,Bandung, 2001.
26. Intermanual Himpunan Putusan Mahkamah Agung;Tentang Arbitrase, Proyek Yurisprudensi, 1990.
27. Kantaatmadja,Komar, Beberapa Hal Tentang Arbitrase, Makalah Pada Penataran Hukum Ekonomi Internasional, Fak.Hukum UNPAD, 1989.
28. Kantaatmadja,Komar, Prospek Dan Pelaksanaan Arbitrase Di Indonesia, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

29. Keraf, Gorys Diksi dan Gaya Bahasa, Sari Retorika, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994.
30. Keraf, Gorys, Eksposisi Komposisi, Gramedia Widiaswara, Indonesia, Jakarta, 1995.
31. Keraf, Gorys, Komposisi, Nusa Indah, 1979.
32. Keraf, Gorys Eksposisi dan Deskripsi, Nusa Indah Flores, 1982.
33. Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Terjemahan Prof. R. Subekti, SH dan R. Tjipto Sudibio, Pradya Paramita, Jakarta 1980.
34. Keraf, Gorys, Komposisi sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa Nusa Indah Flores 1993.
35. Longdong, Tienieke Louise Tuegeh, Asas Ketertiban Umum dan Konvensi New York, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
36. Mahkamah Agung Tim Pengkajian Tahun 1990, UU MA No 85 "Masalah-masalah Hukum Dalam Arbitrase."
37. Muhammad, Abdulkadir, Hukum Perusahaan Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 1999.
38. (Normatif), Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, 1984.
39. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Pedoman Penulisan Tesis , Semarang .2001.
40. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Pedoman Usulan Penulisan Usulan Penelitian untuk tesis, Semarang 2001.

41. Prof.Dr.H.M.Tahir Azhary,SH," Penyelesaian Sengketa Melalui Forum Arbitrase, Makalah pada Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia mengenang Alm.Prof.Dr.Komar Kantaatmadja,SH,LLM, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
42. Prof.Dr.Soedjono Dirdjosisworo,"Yurisprudensi MA dan Penyelesaian Sengketa Perdata lewat Arbitrase (Jawaban Strategis Menghadapi Bisnis Bebas Abad 21), makalah pada Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia mengenang alm,Prof Dr.Komar Kantaatmadja, SH.LLM, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
43. Radjaguguk, Erman, Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan, Chandra Pratama, Jakarta Tahun 2000.
44. Reksodiputro, Marjono, "Catatan Mengenai Beberapa Masalah Arbitrase di Indonesia, Pusat Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1977.
45. Soemitro, Ronny Hanintyo Peran Metodologi Penelitian Hukum Dalam Pengembangan Ilmu Hukum, Dalam Majalah Masalah-masalah Hukum No. 5 tahun 1992, halaman 32-40.
46. Soemitro, Ronny Hanintyo, Perbandingan Antara Penelitian Hukum Normatif dengan Penelitian Hukum Empiris dalam Majalah Masalah-masalah Hukum No. 4 tahun 1991, halaman 44-50.
47. Soekamto, Soerjono, Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris, IND-HIL-CO, Jakarta, 1990.

48. Soekamto, Soerjono dan Sri Pamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat Raja-raja, Grafindo Perkasa, Jakarta, 1994.
49. Soemitro, Ronny Hanintyo, Fungsi Teori Dalam Penelitian Dalam Majalah Masalah-masalah Hukum NO. 7 tahun 1991, halaman 21-26.
50. Soemitro, Ronny Hanintyo, Penelitian Hukum Normatif, dalam majalah Masalah-masalah Hukum No. 5 tahun 1988, halaman 13-23.
51. Soekardono, Hukum Dagang Indonesia, Jilid I Bagian Pertama, 1977, Halaman 205-206.
52. Subekti R, Arbitrase Perdagangan, Bina Cipta 1981.
53. Subekti R, "Pembinaan Hukum Nasional, Penerbit Alumni Bandung, 1975.
54. Suraputra, Sidik, "Beberapa masalah Hambatan Terhadap Pelaksanaan Perwasitan Internasional di Indonesia, Majalah Fakultas Hukum Universitas Indonesia No.4 Tahun VI, Juli 1976.
55. T.M.Radhie, SH, "Konvensi New York, tentang Pengakuan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Luar Negeri, makalah Seminar Penyelesaian Sengketa Dagang melalui Arbitrase, Hotel Kartika Chandra, Jakarta, 11 Agustus 1990.
56. Tim Pengkajian Hukum Mahkamah Agung, "Penemuan Hukum Dan Pemecahan Masalah Hukum Dalam Arbitrase, Untuk Kalangan Sendiri.

57. Ury, William J.M. Brett, Stephen.B. Goldberg, Getting Disputes Resolved, PON Books, 1993.
58. Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Keterangan Pemerintah pada Rapat Paripurna DPR RI mengenai RUU tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa.
59. Undang-undang No 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman.
60. Undang-undang No 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
61. Wilaya, Gunawan dan Ahmad Yani, Hukum Arbitrase, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.

Mahkamah Agung R.I.

Tanggal 10 Juli 1984

No. 1 Banding/Wasit/1981

(Prof. Z. Asikin Kusumah Atmadja, SH., H. Danny, SH., Ny. Poerbowati Djoko Soedomo, SH.).

PT. Multi Plaza Properties.

- Perwasitan/Arbitrase; (01/320)
- Banding terhadap keputusan Wasit/Arbitrase.

Sesuai ketentuan pasal 15 yo pasal 108 U.U. No. 1 tahun 1950 tentang susunan, kekuasaan dan jalan pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia permohonan banding terhadap putusan wasit dapat diterima; Akan tetapi karena para pihak telah sepakat bahwa terhadap putusan wasit/arbitrase in casu tidak dapat diajukan banding (pasal 641 Rv yo pasal 377 R.I.D.), maka permohonan banding terhadap putusan arbitrase tersebut tidak dapat diterima.

(Menurut pendapat Mahkamah Agung bahwa banding terhadap keputusan wasit tidak dapat diperhatikan, karena menurut pasal 13 alinea terakhir Akta Pengikatan tanggal 18 Maret 1977, Keputusan Panitia Arbitrase merupakan keputusan terakhir yang mengikat semua pihak, juga mengenai biaya-biaya Panitia Arbitrase).

Pasal 641 R.V. yo pasal 377 R.I.D.¹

1. Dikutip dari : Pembinaan Wawasan Hukum Indonesia, No. X tahun 1988;

P U T U S A N

Reg. No. 1 BANDING/WASIT/1981

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA**

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara wasit dalam tingkat banding telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

PT. MULTI PLAZA PROPERTIES, berkedudukan di Jalan Pinangsia Raya Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : TALAS SIANTURI, SH. berkantor di Jakarta, Jalan Gajah Mada No. 219 C dan Jalan Hayam Wuruk Glodok Baru, Lantai II Blok D-8-34-35, pembanding/semula pihak pertama;

m e l a w a n :

YAHYA WIJAYA bertempat tinggal di Jalan A-I No. 4 A, Teluk Gong Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : SHINTA ANASTASIA, SH. berkantor di Jalan Pademangan I Gg. IX/23 A — Jakarta Utara, terbanding/semula pihak kedua;

Mahkamah Agung tersebut,

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang pembanding/semula pihak pertama telah mengajukan pemeriksaan ulangan terhadap putusan Wasit No. 01/XII/PAR/80 tanggal 15 Desember 1980 pada pokoknya berdasarkan dalil-dalik sebagai berikut:

bahwa pemohon asli adalah pemilik gedung pusat pertokoan/perkantoran (shopping center) yang dikenal dengan nama "Glodok Plaza" terletak di Jalan Pinangsia Raya Jakarta; dan termohon asli Yahya Wijaya adalah penyewa dari sebuah ruangan pertokoan No. 65 Blok A lantai II di gedung Glodok Plaza tersebut;

bahwa termohon asli telah ingkar janji, tidak melakukan pembayaran dan pelunasan angsuran-angsuran uang sewa ke-4, 5, 6 dan 6

seperti yang telah diperikatkan semula dalam akte pengikatan sebagai suatu perikatan pendahuluan yang kemudian hari akan ditingkatkan menjadi perjanjian sewa-menyewa di hadapan notaris;

bahwa sebaliknya dari pemohon asli akan memperoleh tambahan pembayaran uang sewa berikut pembayaran-pembayaran denda ingkar janji dan lain-lain pembayaran sebagai akibat pemutusan hubungan sewa-menyewa, termohon asli dengan sangat ganjil telah mengajukan seorang arbiter Karni Kresno Widagdo, SH. untuk memeriksa/memutuskan tuntutan pengembalian beberapa angsuran uang sewa, berikut ganti rugi (bukti P.P. - 14),

bahwa karena pemohon asli tidak merasa berhutang pada termohon asli, surat pemberitahuan wasit Karni Kresno Widagdo, SH. tersebut tidak dijawab secara tertulis, tapi secara lisan;

bahwa wasit Karni Kresno Widagdo, SH. terus melakukan sidang arbitrage sebagai wasit tunggal yang memutuskan/mengabulkan tuntutan termohon asli tersebut; (bukti PP - 15);

bahwa surat keputusan wasit tersebut tidak wajar dan melawan hukum yaitu :

- a) pada satu pihak wasit bertindak sebagai "Wasit" yang memberitahukan telah dibuatnya Keputusan Wasit dan telah didaftarkannya Keputusan Wasit tersebut pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan
- b) pada pihak lain Wasit telah bertindak sebagai kuasa atau bertindak untuk mewakili kepentingan dari termohon/pihak kedua;

bahwa berdasarkan pasal 15 dan pasal 103 s/d III UU. 1/1950 pemohon/pihak pertama dalam waktu 1 bulan setelah mendapat pemberitahuan keputusan Wasit PP - 16, berhak mengajukan pemeriksaan ulangan kepada Ketua Mahkamah Agung dalam sengketa perwasitan;

bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon asli menuntut agar Mahkamah Agung memberikan putusan sebagai berikut:

1. Membatalkan keputusan Wasit a quo;
2. Menolak tuntutan/gugatan termohon/pihak kedua, setidaknya menyatakan tuntutan/gugatan termohon/pihak kedua tidak dapat diterima;
3. Menyatakan termohon/pihak kedua telah ingkar janji dan melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum termohon/pihak kedua untuk membayar kepada pemohon/pihak pertama kekurangan atau penggantian biaya-

- biaya/ongkos-ongkos sewa, pajak penjualan, biaya perawatan, listrik, meterai, denda angsuran, denda biaya perawatan dan pembatalan dan biaya administrasi sebesar Rp. 2.761.216,- (dua juta tujuh ratus enam puluh satu ribu dua ratus enam belas rupiah);
5. Menghukum termohon/pihak kedua untuk membayar ongkos-ongkos perkara;

Menimbang, bahwa menurut surat-surat yang terdapat dalam berkas ini Keputusan Wasit No. 01/XII/PAR/80 tanggal 15 Desember 1980 telah diletakkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 Desember 1980 kemudian diberitahukan kepada pembanding/semula pihak pertama pada tanggal 24 Desember 1980. Sedangkan pembanding/semula pihak pertama telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Januari 1981, maka sesuai pasal 15 yo pasal 108 UU. No. 1/1950 tentang Susunan, Kekuasaan dan jalan pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia permohonan banding tersebut harus dinyatakan diterima;

Memperhatikan jawaban tanggal 26 Juni 1982 atas permohonan banding Keputusan Wasit No. 01/XII/PAR/80 tanggal 15 Desember 1980 yang diajukan oleh banding/semula pihak kedua;

Menimbang, bahwa kata-kata pemohon/pihak pertama dalam permohonan pemeriksaan ulangan tersebut harus dibaca sebagai pembanding/semula pihak pertama sedangkan kata-kata termohon/pihak kedua harus dibaca sebagai terbanding/semula pihak kedua;

bahwa selanjutnya mengenai alasan-alasan banding yang diajukan oleh pembanding/semula pihak pertama, menurut pendapat Mahkamah Agung alasan-alasan tersebut tidak dapat diperhatikan, karena ternyata menurut pasal 13 alinea terakhir Akta Pengikatan tanggal 18 Maret 1977 "Keputusan Panitia Arbitrase merupakan keputusan terakhir yang mengikat untuk semua pihak, demikian juga mengenai biaya-biaya Panitia Arbitrase itu";

bahwa hal ini berarti para pihak telah bersepakat terhadap putusan Panitia Arbitrase tidak dapat diajukan banding (pasal 641 RV. yo pasal 377 R.I.D.), oleh karena mana permohonan banding terhadap putusan Panitia Arbitrase tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka permohonan banding yang diajukan oleh pemohon : PT. Multi Plaza Properties tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Memperhatikan Undang-Undang No. 14 tahun 1970, Undang-Undang No. 1 tahun 1950 dan Undang-Undang No. 13 tahun 1965 serta Reglemen Indonesia yang dibaharui

MENGADILI:

Menyatakan, bahwa permohonan banding dari pemohon banding :
PT. MULTI PLAZA PROPERTIES tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum pembanding membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini ditetapkan sebanyak Rp. 10.000,— (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Rabu, tanggal 14 Maret 1984 dengan Prof. Z. Asikin Kusumah Atmadja, SH. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Th. Ketut Suraputra, SH. dan Ny. H. Poerbowati Djoko Soedomo, SH. sebagai Hakim-hakim Anggauta, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari : SELASA, TANGGAL 10 JULI 1984 oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Danny, SH. dan Ny. H. Poerbowati Djoko Soedomo, SH. Hakim-hakim Anggauta, dan Martini, SH. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Mahkamah Agung

Tanggal 5 September 1959

No. 1/1959 Pem. Put. Wst.

(Mr. R. Wiryono Prodjodikoro, Mr. M.H. Tirtamidjaja, Mr. R. Soebekti)

Indonesia Cotton Trading Co. Ltd.

- Perwasitan/Arbitrase; (01/320)
- Banding terhadap Putusan Wasit/Arbitrase

Menurut pasal 108 (2) Undang-Undang Mahkamah Agung dari putusan Panitia Arbitrase dapat dimintakan banding kepada Mahkamah Agung, tetapi kemungkinan minta banding ini dapat ditiadakan oleh kedua belah pihak dalam perjanjian Arbitrase, hal mana in casu terjadi.¹

Pasal 641 Rv yo pasal 377 R.I.D.

1. Dikutip dari : Majalah Hukum dan Masyarakat. No. 1-2-3 tahun 1962 halaman 164;

MAHKAMAH AGUNG Mr. R. Wirjono Prodjodikoro (Ketua), Mr.
M. H. Tirtamidjaja dan Mr. R. Subekti (Ha-
kim-hakim anggauta).
Keputusan t.t. 5 - 9 - 1959.

Panitia Arbitrasi.

Menurut pasal 108 (2) Undang-Undang Mahkamah Agung dari
putusan Panitia Arbitrasi dapat dimintakan banding kepada Mahkamah
Agung, tetapi kemungkinan minta banding ini dapat ditiadakan oleh
kedua belah pihak dalam perjanjian Undang-Undang Arbitrasi, hal mana
in-casu terjadi.

Reg. No. 1/1959 Pem. Put. Wst.

ATAS NAMA KEADILAN !
MAHKAMAH AGUNG

mengadili dalam tingkatan banding telah mengambil putusan sebagai
berikut dalam perkara :

INDONESIA COTTON TRADING CO LTD., berkedudukan di
Jakarta, Pasar Pagi 12 Jakarta Kota, pembanding,

m e l a w a n :

FIRMA RAYUN, berkedudukan di Jakarta, Roa Malaka Selatan
No. 67 Jakarta Kota, terbanding;

Mahkamah Agung tersebut,

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Firma
Rayun sebagai pihak penggugat dan Indonesia Cotton Trading Co Ltd,
sebagai pihak tergugat telah minta kepada Panitia Arbitrasi dari Organi-
sasi Exporteur Hasil Bumi Indonesia, disingkat O.E.H.I., di Jakarta
untuk memberi arbitrase mengenai perselisihan antara kedua belah
pihak dan bahwa oleh pihak penggugat dituntut agar supaya pihak ter-
gugat dihukum untuk membayar kepada pihak lawannya uang sejumlah

Rp. 124.051,43 ditambah dengan bunga atas jumlah itu serta biaya-biaya arbitrase ini,

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Panitia Arbitrase O.E.H.I. di Jakarta telah mengambil putusan pada tanggal 29 April 1959, yang diktumnya berbunyi sebagai berikut :

"menghukum pihak tergugat untuk membayar kepada penggugat, dengan menerima bukti pembayaran yang sah, uang sebesar Rp. 121.809,50 (seratus duapuluh satu ribu delapan ratus sembilan rupiah lima puluh sembilan sen), ditambah dengan bunga 6% setahunnya dihitung mulai tgl. 12 Nopember 1958 sampai hari dipenuhi semuanya;

"menolak tuntutan penggugat mengenai selainnya;

"menghukum penggugat dan pihak tergugat untuk membayar biaya-biaya arbitrase ini, sampai serta penyimpanan keputusan ini pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Jakarta seluruhnya berjumlah Rp. 7.500,— (tujuhribu limaratus rupiah), yakni penggugat sebesar Rp. 150,— (seratus limapuluh rupiah) dan pihak tergugat sebesar Rp. 7.350,— (tujuhribu tigaratus limapuluh rupiah););

"memerintahkan penggugat untuk membayar kepada O.E.H.I. seluruh biaya-biaya arbitrase ini, sebesar Rp. 7.500,—,

"menghukum pihak tergugat untuk membayar kembali kepada penggugat, dengan menerima bukti pembayaran yang sah, bagian dari-pada biaya-biaya arbitrase ini yang harus dibayar oleh pihak tergugat sebesar Rp. 7.350,—";

Menimbang, bahwa putusan arbitrase ini telah diberitahukan kepada kedua belah pihak yang berperkara pada tanggal 30 April 1959;

Bahwa sesudah penerimaan putusan arbitrase itu terhadapnya oleh tergugat dengan perantaraan kuasanya khusus telah diajukan permohonan untuk pemeriksaan banding dengan surat yang diterima di kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 1 Juni 1959, surat mana sekaligus memuat alasan-alasan permohonannya;

bahwa permohonan banding beserta memori alasan-alasan banding telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan sepatutnya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu harus dipertimbangkan soal apakah permintaan banding ini materiel dapat diterima atau tidak;

Menimbang, bahwa pada umumnya menurut pasal 108 (2) Undang Undang Mahkamah Agung Indonesia terhadap perkara ini dapat dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa akan tetapi menurut syarat-syarat umum buat penjualan hasil bumi (pasal 2 ayat 2) dan Reglemen Panitia Arbitrase

O.E.H.I. (Pasal 8 ayat 3), yang dipakai oleh dan berlaku antara kedua belah pihak pada waktu persetujuan yang bersangkutan dibuat, keputusan arbitrase tidak akan dapat dibanding;

Menimbang, bahwa hal demikian ini tidaklah bertentangan dengan pasal 108 (2) Undang-Undang Mahkamah Agung tersebut atau dengan sesuatu peraturan tentang ketertiban umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang yang bersangkutan dan pasal 120 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menyatakan bahwa permohonan banding dari pembanding :
INDONESIA COTTON TRADING CO LTD tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkatan ini yang ditetapkan banyaknya Rp. 38, 75 (tiga puluh delapan rupiah tujuh puluh lima sen).

P U T U S A N.
NOMOR : 401/Pdt.G/2001/PN.JKT.BAR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan pembatalan putusan Arbitrase antara :

PT. JAYA NUR SUKSES, berkantor di Gedung Gapuramas Lt.4
Jl.Let.Jend.S.Parman Kav.91 Jakarta Barat,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29
Oktober 2001, memberi kuasa penuh kepada
ALEXIUS TANTRAJAYA, SH dan **DANNY**
DARMAWAN, SH, Advokat dan Pengacara,
baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri
berkantor di Jl. Raya Perjuangan No.9/1 Kebon
Jeruk Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai
PEMOHON ;

Melawan :

1. **PT. HUTAMA KARYA (Persero)**, berkedudukan di Jakarta Jalan M.T.
Haryono Kav.18 Cawang Jakarta Timur, untuk
selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON I** ;
2. **Tn. MOHAMMAD SALIM, SH**, Arbiter Ad Hoc, beralamat di Jalan
Adhyaksa VI/4 Lebak Bulus Jakarta Selatan,
untuk selanjutnya disebut sebagai
TERMOHON II ;
3. **Tn. Ir. HARIANTO SUNIDJA MSc.Phd**, Arbiter Ad Hoc beralamat di
Jalan Ir.H.Juanda I A/18 Jakarta Pusat, untuk
selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON III** ;
4. **Tn. SOEGIHARTO, SH**, Arbiter Ad Hoc, beralamat di Jl. Pol. Tangan
Kav. I Ujung Pasar Minggu Jakarta Selatan

JBT

untuk selanjutnya disebut sebagai

TERMOHON IV ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat perkara ;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase Ad Hoc No.01/X/AD-HOC/2001 tanggal 03 Oktober 2001, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 05 Nopember 2001 dibawah Register Nomor : 401/Pdt.G/2001/PN.JKT.BAR, telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon I, telah terjadi sengketa mengenai pelaksanaan pekerjaan pembangunan proyek Chrysant Tower, Apartemen Rajawali Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Perjanjian Kerjasama No.75 tanggal 29 Juli 1996, yang dibuat dihadapan Notaris Sugiri Kadarisman, SH di Jakarta dengan konsep pendanaan pembangunan system "Turn Key Project" (pembayaran dilakukan setelah prestasi kerja mencapai 95% dengan ditanda tangannya berita acara serah terima proyek I), dengan masa waktu pembangunan selama 15 bulan, yakni dimulai dari tanggal 15 Juli 1996 sampai berakhir tanggal 15 Oktober 1997, dan oleh karena sampai batas waktu perjanjian ternyata pembangunan proyek Chrysant Tower tersebut belum selesai, maka terjadilah sengketa antara Pemohon dan Termohon I, dan berdasarkan pasal 24 ayat 2 Akta No.75 untuk penyelesaian sengketa tersebut dilakukan melalui Arbitrase Ad-Hoc ;
2. Bahwa untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui Arbitrase Ad-Hoc, maka selanjutnya Termohon I telah mengangkat Termohon III selaku Arbiter Ad Hoc, dan Pemohon telah mengangkat Termohon IV selaku Arbiter Ad Hoc, dimana kemudian Termohon III dan Termohon IV telah mengangkat Termohon II selaku Ketua Majelis Arbiter Ad Hoc, dan kemudian untuk selanjutnya Termohon II dan Termohon III serta Termohon IV memeriksa sengketa tersebut diatas.

3. Bahwa adapun permohonan Arbiter Ad Hoc yang diajukan oleh Termohon I (semula Pemohon) beserta petitumnya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

Antara Pemohon (kini Termohon I) dan Termohon (kini Pemohon) telah menandatangani Perjanjian Pelaksanaan pekerjaan pembangunan proyek Chrysant Tower Condominium dengan ketinggian 45 lantai, dengan masa tenggang waktu pelaksanaan pekerjaan pembangunan selama 15 bulan, yang dimulai dari tanggal 15 Juli 1996 dan berakhir sampai tanggal 15 Oktober 1997, dengan pendanaan pembangunan System Turn Key ;

Pada September 1997 prestasi pekerjaan yang dicapai Pemohon (kini Termohon I) adalah sebesar : 73,5448% ;

Tidak selesainya pekerjaan Pemohon (kini Termohon I) sesuai waktu yang diperjanjikan adalah dikarenakan adanya pengurangan pekerjaan sebanyak 8 lantai, yang semula dari 47 lantai menjadi 39 lantai, dan juga terjadinya krisis moneter yang dimulai bulan Juli 1997 yang berdampak pada kenaikan harga-harga bangunan yang sangat tinggi dan tertutupnya sumber pembiayaan proyek dari Bank ;

Walaupun masa pembangunan telah terlewati, namun Pemohon (kini Termohon I) dan Termohon (kini Pemohon) secara bersama-sama membuat persetujuan tambahan secara lisan untuk meneruskan pembangunan yang dilakukan secara bertahap, dengan sistim paket-perpaket pekerjaan, yang terdiri :

- Paket Finishing lantai dasar pada periode bulan Juli 1998 s/d bulan Agustus 1998 dengan pendanaan Termohon (kini Pemohon) 100% ;
- Paket Finishing lantai 1 sampai lantai 6 pada periode bulan September 1998 sampai bulan Desember 1998 dengan dana Escrow Account ;
- Paket lantai 7 dan lantai 8 sampai lantai 12, pada periode bulan Desember 1998 s/d bulan Juni 1999 dengan sumber dana Escrow Account ;

Dan karena adanya perbedaan yang sangat tajam terhadap harga dan perubahan sistim pendanaan secara paket-perpaket dan belum tercapainya suatu kesepakatan antara Pemohon (kini Termohon I) dan Termohon (kini Pemohon) akan hal tersebut, maka Pemohon (kini Termohon I) terhitung sejak dari tanggal

19 Juni 1999 telah menghentikan sementara pekerjaan pembangunan proyek Chrysant Tower Rajawali tersebut ;

Tuntutan Pemohon (kini Termohon I) yakni :

- a. Menyatakan Termohon cidera janji ;
- b. Menyatakan bahwa penghentian sementara pelaksanaan proyek oleh Pemohon tanggal 21 Juni 1999 adalah sah menurut hukum dan merupakan penghentian tetap yang mengakhiri kegiatan pembangunan proyek menurut perjanjian ;

c. Menghukum Termohon membayar kepada Pemohon :

1. Biaya proyek tahap I	Rp. 71.028.297.351,-
2. Biaya administrasi Nopember 1997 s.d Juli 1999	Rp. 38.962.628.897,-
3. Ganti rugi bunga Bank tahap 1	Rp. 48.121.030.233,-
4. Pekerjaan belum dibayar	Rp. 472.651.000,-
5. Sisa pekerjaan belum dibayar	Rp. 1.574.583.973,-
6. Ganti rugi bunga bank tahap 2	Rp. 895.665.300,-
7. Ganti rugi kehilangan peluang keuntungan usaha	<u>Rp. 50.000.000.000,-</u>
Jumlah	Rp. 211.054.856.754,-

d. Menghukum Termohon membayar denda bunga sebesar suku bunga pinjaman Bank Pemerintah yang berlaku pada tanggal permohonan Arbitrase ini sampai dengan semua ganti kerugian berdasarkan putusan Majelis dibayar lunas oleh Termohon ;

e. Menghukum Termohon membayar biaya untuk Arbitrase ;

f. Menghukum Termohon membayar petitum c dan e beserta pajaknya ;

4. Bahwa atas permohonan Arbitrase Ad Hoc sebagaimana butir 3 diatas, maka Pemohon selaku Termohon telah mengajukan jawaban dalam Konpensasi dan sekaligus mengajukan permohonan rekompensi selaku Pemohon rekompensi yang secara garis besar adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa jangka waktu pelaksanaan pembangunan proyek tersebut adalah 15 bulan, terhitung sejak 15 Juli 1996 s.d. 15 Oktober 1997

JPB

- b. Bahwa konsep pembangunan proyek adalah "Turn Key" dengan pembayaran dilakukan Pemohon bila prestasi proyek telah mencapai 95% (pasal 10 ayat 2 Akta No.75);
 - c. Bahwa pasal 22 Akta No.75 secara tegas mengatur tidak ada penyesuaian harga (eskalasi harga) jika terjadi perubahan kebijakan moneter;
 - d. Bahwa pasal 25 ayat 5 Akta No.75 menyebutkan, jika terjadi perubahan perjanjian, maka harus dibuatkan addendum secara tertulis antara Pemohon (semula Termohon) dan Termohon I (semula Pemohon);
 - e. Bahwa yang melakukan wanprestasi adalah justru Termohon I (semula Pemohon) sendiri, karena prestasi proyek yang dicapai per 38 Februari 1998 adalah baru mencapai 67,3780% dan bukannya 73,5448% menurut dalil Termohon I (semula Pemohon);
 - f. Bahwa lebih tidak bertanggung jawab lagi Termohon I (semula Pemohon) telah menghentikan pekerjaan proyek per tanggal 21 Juni 1999;
 - g. Bahwa selanjutnya Pemohon (semula Termohon) telah mengajukan permohonan rekonpensi terhadap Termohon I (semula Pemohon) untuk membayar biaya ganti rugi, denda dan bunga (kosten, Schaden en Interessen) yang timbul sebagai konsekwensi logis dari wanprestasi Termohon I (semula Pemohon) menurut pasal 1236 dan 1243 KUH Perdata sebesar Rp.262.686.122.985,- (dua ratus enam puluh dua milyar enam ratus delapan puluh enam juta seratus dua puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) perincian terlampir;
 - h. Bahwa kerugian-kerugian (semula Termohon) yang timbul dikarenakan adanya keterlambatan Pembangunan Proyek Chrysant Tower tersebut adalah : berakibat para Pembeli / customer melakukan klaim, pembatalan pembelian, tidak mau membayar angsuran pembelian sehingga terjadi pengebetan dana Escrow Account oleh Bank Dagang Negara selaku pemberi KPR, kehilangan keuntungan yang seharusnya diperoleh, biaya overhead akibat proyek terbengkalai dan kerugian immateriel serta biaya-biaya lain secara terinci terlampir;
5. Bahwa selanjutnya Termohon II dan Termohon III serta Termohon IV (yang telah mengajukan Dissenting Opinion karena banyak pertimbangan putusan

182

yang tidak berdasarkan hukum dan bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, karena pertimbangan tersebut tidak memutuskan/mempertimbangkan akibat cidera janji /wanprestasi yang dituntut para pihak) telah menjatuhkan putusan pada tanggal 03 Oktober 2001 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MEMUTUSKAN

DALAM PROVISI

Menyatakan permohonan (tuntutan) provisionil Pemohon dalam rekompensi/Termohon dalam kompensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSI :


1. Mengabulkan permohonan Pemohon dalam kompensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan Termohon dalam kompensi telah melakukan wanprestasi ;
3. Menyatakan bahwa Akta Perjanjian Nomor 75 tanggal 29 Juli 1996 telah berakhir sejak tanggal 04 Februari 1998 ;
4. Menghukum Termohon dalam kompensi untuk membayar kepada Pemohon dalam Kompensi sebesar Rp.64.462.646.865,- (enam puluh empat milyar empat ratus enam puluh dua juta enam ratus empat puluh enam ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) ;
5. Menghukum Termohon dalam kompensi untuk melaksanakan isi putusan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak putusan diucapkan ;
6. Menolak permohonan Pemohon dalam kompensi untuk selebihnya ;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon dalam rekompensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan Termohon dalam rekompensi telah melakukan wanprestasi ;
3. Menghukum Termohon dalam rekompensi untuk membayar denda keterlambatan sebesar 5% + PPN 10% yaitu sebesar Rp.4.090.971.115,- (empat milyar sembilan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu seratus lima belas rupiah) kepada Pemohon dalam rekompensi ;

4. Menghukum Termohon dalam rekompensi untuk membayar kerugian sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) kepada Pemohon dalam rekompensi ;
5. Menghukum Termohon dalam rekompensi untuk melaksanakan isi putusan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak putusan diucapkan ;
6. Menolak permohonan Pemohon dalam rekompensi untuk selebihnya ;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI :

1. Bila sampai 30 (tiga puluh) hari sejak putusan diucapkan belum dilaksanakan pembayaran yang merupakan hak Pemohon dalam konpensi maka akan dibayar melalui pencairan dana Escrow Account No.R/K 700.144.00255.2.01.8 (rekening rupiah) dan R/K No.3081.411.0003.6 (rekening US Dollar) yang berada di Bank Mandiri (d/h Bank Dagang Negara (persero) cabang Segitiga Senen Jakarta Pusat dan bila dana yang tersedia tidak mencukupi, maka akan dilunasi pelelangan tanah seluas 3.621 M2 yang merupakan sebagian dari tanah Hak Guna Bangunan No.1440/Gunung Sahari Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, Kelurahan Gunung Sahari Utara dan bangunan proyek Cluysant Tower Condominium Rajawali yang didirikan diatasnya ;
2. Menghukum Pemohon dalam konpensi dan Pemohon dalam rekompensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara Arbitrase ini masing-masing seperdua bagian ;
3. Menyatakan putusan Arbitrase Ad Hoc ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat para pihak ;
4. Memerintahkan kepada Sekretaris sidang Arbitrase Ad Hoc selaku Kuasa Majelis Arbiter untuk mendaftarkan turunan resmi putusan Arbitrase Ad Hoc ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan Undang-Undang No.30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ;
6. Bahwa pertimbangan hukum Termohon II, Termohon III dan Termohon IV dalam halaman 50 alinea 3 menyebutkan bahwa 

Menimbang, bahwa sejak bulan Februari 1998 telah terjadi perubahan dari ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian No.75, dimana perubahan-perubahan tersebut tidak pernah dituangkan secara tertulis dalam bentuk-bentuk perjanjian tambahan/kesepakatan tambahan/MOU/Addendum Kontrak oleh kedua belah pihak, sehingga Majelis menilai bahwa sejak pekerjaan tahap II mulai dilaksanakan antara para pihak telah terjadi kesepakatan secara diam-diam diluar perjanjian No.75 ;

7. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Arbitrase Ad Hoc butir 6 diatas adalah sangat keliru karena jelas tidak pernah terjadi kesepakatan apalagi kesepakatan secara diam-diam antara Pemohon dan Termohon I dengan istilah paket-paket pekerjaan ;
8. Bahwa istilah paket-paket pekerjaan yang didalilkan Termohon I (Pemohon) adalah didasarkan atas tipu muslihat yang dilakukan Termohon I dalam pemeriksaan sengketa di Arbitrase Ad Hoc, dengan cara menyembunyikan dokumen yang bersifat menentukan dengan dalil seolah-olah telah terjadi kesepakatan antara Termohon I dengan Pemohon, padahal senyatanya hal tersebut tidak benar ;
9. Bahwa berdasarkan fakta persidangan Arbitrase Ad Hoc terungkap fakta hukum (rechtsfeiten) sebagai berikut :
 - A. Bahwa Termohon I (semula Pemohon) telah melakukan wanprestasi kepada Pemohon (semula Termohon) dengan tidak menyelesaikan pembangunan proyek pada 15 Oktober 1997 sesuai jadwal pembangunan menurut Akta No.75 (vide putusan halaman 48 alinea ke 2 dari bawah), bahkan prestasi per 28 Februari 1998 baru mencapai 67,3780% ;
 - B. Bahwa selanjutnya Termohon I yang secara tegas menyatakan diri dalam kesulitan keuangan lalu mohon bantuan pinjaman dana kepada Pemohon dan Pemohon terdorong atas desakan konsumen dan rasa tanggung jawab serta itikad baik bersedia memenuhi permintaan pinjaman dana tersebut walaupun sesungguhnya konsep pendanaan proyek adalah system turn key, sehingga merugikan Pemohon ;
 - C. Bahwa disinilah terlihat itikad buruk dan tipu muslihat yang dilakukan Termohon I dengan menyembunyikan dokumen yang bersifat menentukan yaitu mengajukan permohonan pinjaman dana kepada Pemohon yang saat

182

itu juga sedang dilanda amok konsumen yang menuntut kepada Pemohon, sehingga tindakan Pemohon untuk memberikan pinjaman dana kepada Termohon I adalah bukan sebagai kesepakatan diam-diam untuk menyampingkan ketentuan Akta No.75 yang berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak (atas pacta sunt servanda), tetapi adalah sebagai emergency action ;

D. Bahwa hal butir C diatas terbukti dari tidak pernah dibuatnya Addendum perjanjian sebagaimana disyaratkan pasal 25 ayat 5 Akta No.75 dan juga diakui oleh Termohon I dalam dalil permohonan Arbitrase Ad Hoc ;

E. Bahwa dengan demikian jelas Akta No.75, masih mempunyai kekuatan mengikat bagi Pemohon dan Termohon I, dan lebih nekad lagi Termohon I menghentikan pekerjaan secara sepihak secara tidak bertanggung jawab yang mengakibatkan terbengkalainya proyek Chrysant Tower per-tanggal 21 Juni 1999 ;

F. Bahwa terbukti Surat Kuasa yang diterima Termohon I dari PT. Utama Karya yang dijadikan sebagai dasar pengajuan Permohonan Arbitrase Ad-Hoc, berikut seluruh bukti-bukti P-1 sampai P-45, dengan Catatan adanya 2 bukti P-44 dengan substansi yang berbeda yang diajukan Termohon I selaku Pemohon dalam persidangan perkara Arbitrase tersebut sebagian besar adalah bernominal Rp.2000,- dan karenanya tidak memenuhi ketentuan pasal 11 ayat 1 Undang-Undang No.13 tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah R.I. No.24 tahun 2000 yang berlaku efektif tanggal 1 Mei 2000 ;

G. Bahwa demikian pula terbukti sebagian besar dari bukti-bukti yang diajukan Termohon I selaku Pemohon Arbitrase Ad-Hoc adalah berupa foto copy yang tidak ada aslinya (Bukti P-2 sampai P-10, dan P-14 sampai P-39, dan P-40, P-41 A serta P-42), dan juga Bukti P-5, P-6, P-9, P-11, P-12, P-13, P-15, P-20, P-21, P-23, P-25, seluruhnya adalah berbahasa Inggris dan tidak disertai terjemahan resmi dalam bahasa Indonesia, karenanya adalah bertentangan dengan pasal 28 UUD No. 30 tahun 1999 ;

H. Bahwa seandainya Termohon II, Termohon III, dan Termohon IV secara cermat memeriksa seluruh bukti-bukti yang diajukan dan tidak ada yang disembunyikan serta tips muslihat dan keterangan saksi-saksi yang terungkap di persidangan, maka tentulah putusan Majelis Arbitrase AD

AB2

HOC akan menjadi lain, tidak seperti putusan aquo yang kini dimohonkan pembatalan :

10. Bahwa dari Putusan Majelis Arbitrase Ad Hoc tersebut, Termohon II, Termohon III, dan Termohon IV di dalam pertimbangan hukumnya halaman 48 alinea ke 2 dari bawah menyatakan " Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dan tidak disangkal oleh Pemohon Dalam Kompensi / Termohon Dalam Rekompensi adalah bahwa ia telah terlambat menyelesaikan pembangunan proyek aquo ", namun dalam amar putusan kompensi butir 2 justru menyatakan Termohon (kini Pemohon) yang telah melakukan wanprestasi, dengan demikian terbukti antara pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Arbiter tersebut saling bertentangan dan tidak didasarkan pada hukum, demikian pula mengenai amar putusan Pemohon (Termohon) melakukan wanprestasi sama sekali tidak di pertimbangkan asal usulnya dari perbuatan apa yang menjadi dasar Majelis Arbiter memutuskan Pemohon dalam keadaan Wanprestasi, untuk itu terbukti jelas Putusan Arbitrase Ad Hoc tersebut tidaklah didasarkan pada ketentuan hukum dan bertentangan dengan pasal 56 ayat (1) UU No.30 tahun 1999 ;
11. Demikian pula amar Putusan Majelis Arbitrase Ad Hoc dalam Kompensi butir 3 yang " menyatakan bahwa Akta Perjanjian Nomor. 75 tanggal 29 Juli 1996 telah berakhir sejak tanggal 04 Februari 1998 " adalah tidak berdasarkan pada ketentuan hukum, dimana Termohon I selaku Pemohon tidak pernah mengajukan petitum demikian, oleh karenanya terbukti Putusan Majelis Arbiter telah mengabulkan sesuatu yang tidak dituntut oleh pihak lawan (putusan lebih), dan karenanya bertentangan dengan pasal 56 ayat (1), jo pasal 58 UU No.30 tahun 1999 ;
12. Bahwa disamping itu pula antara amar putusan dan pertimbangan hukum putusan Majelis Arbiter tersebut saling bertentangan, terbukti dinyatakan Akta Perjanjian Nomor.75 tanggal 29 Juli 1996 telah berakhir sejak tanggal 04 Februari 1998, sedangkan di lain pihak dinyatakan prestasi Termohon I (Pemohon) per 28 Februari 1998 baru sebesar : 67,3780 %, dengan demikian adalah aneh dan tidak berdasar hukum bahwa bagaimana mungkin perjanjian yang sudah berakhir bisa dievaluasi lebih lanjut dikemudian hari oleh Majelis Arbiter ;
13. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat 1 Undang-undang No.13 tahun 1985 tentang Bea Materai, telah ditetapkan " Pejabat Pemerintah, Hakim,

JB2

Panitera, Jurusita, Notaris, dan Pejabat umum lainnya (termasuk Arbiter) masing-masing dalam tugas atau jabatannya tidak dibenarkan untuk : menerima, mempertimbangkan, atau menyimpulkan dokumen yang bea materainya tidak atau kurang bayar ", sedangkan Peraturan Pemerintah R.I. No.24 tahun 2000 yang berlaku efektif tanggal 01 Mei 2000 telah menetapkan bahwa Bea Materai untuk alat pembuktian menjadi Rp.6.000, dengan demikian maka Putusan Arbitrase Ad Hoc No. : 01/X/AD.HOC/2001 tanggal 03 Oktober 2001 tersebut yang terbukti didasarkan pada pertimbangan dari bukti-bukti dan Surat Kuasa bermaterai Rp.2000,- dan kurang bayar adalah jelas bertentangan dengan hukum dan Undang-Undang, yakni UU No.13 tahun 1985 jo. PP No.24 tahun 2000, dan karenanya menurut hukum putusan tersebut haruslah dibatalkan, karena disamping putusan tersebut tidak sah, maka pengajuan permohonan Arbitrase Ad-Hoc yang didasarkan pada Surat Kuasa bermaterai kurang bayar adalah menjadi tidak sah pula, dengan demikian derivative yang ditimbulkan dari permohonan Arbitrase Ad-Hoc tersebut menjadi tidak sah pula ;

14. Bahwa demikian pula berdasarkan pasal 1888 KUH Perdata, telah ditetapkan bahwa kekuatan pembuktian suatu tulisan adalah pada Aktanya asli, berdasarkan atas ketentuan tersebut, maka putusan Ad Hoc No.01/X/AD.HOC/2001 tanggal 03 Oktober 2001 tersebut yang didasarkan pada pertimbangan atas bukti-bukti tertulis berupa foto copy yang tidak ada aslinya, maka terbukti putusan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum, dan karenanya menurut hukum sudah sepatutnya putusan Arbitrase Ad-Hoc tersebut haruslah dibatalkan ;

15. Bahwa sesuai ketentuan pasal 28 UU No.30 tahun 1999 telah ditetapkan bahasa yang dipergunakan dalam semua proses Arbitrase adalah bahasa Indonesia, kecuali atas persetujuan Arbiter atau Majelis Arbiter, para pihak dapat memilih bahasa lain yang akan digunakan, dan oleh karena dalam perkara a quo tidak ada persetujuan/usulan menggunakan bahasa lain, maka sesuai ketentuan hukum bahasa yang dipergunakan adalah bahasa Indonesia, dengan demikian terbukti oleh karena putusan Arbitrase Ad Hoc No.01/X/AD.HOC/2001 tanggal 03 Oktober 2001 didasarkan pada pertimbangan atas bukti-bukti tertulis berbahasa asing, tanpa dilampirkan ; terjemahan resmi bahasa Indonesia sesuai ketentuan hukum, maka menurut

JP2

hukum sudah sepatutnya putusan Arbitrase Ad-Hoc tersebut haruslah dibatalkan, karena bertentangan dengan ketentuan hukum ;

16. Bahwa dari pertimbangan putusan Arbitrase halaman 50 alinea ke 2 dari bawah, terbukti tipu muslihat Termohon I yang mendalilkan seolah-olah ada pekerjaan pertahap diluar perjanjian No.75, sehingga dalil tersebut telah mempengaruhi Majelis Arbitrase Ad-Hoc dalam memutuskan perkara a quo, yang berakibat putusan Majelis Arbiter tidak didasarkan pada hukum, dimana dinyatakan "Menimbang, bahwa Majelis Arbitrase terbentuk berdasarkan perjanjian Nomor 75 pasal 24, sedangkan pekerjaan tahap II dilaksanakan berdasarkan kesepakatan secara diam-diam diluar perjanjian 75, maka Majelis menjadi tidak berwenang untuk memeriksa semua sengketa yang terjadi sejak pekerjaan tahap II mulai dilaksanakan yaitu Pebruari 1998, dengan demikian dari pertimbangan tersebut terbukti Majelis Arbiter tanpa didasarkan pada ketentuan hukum telah membagi perkara aquo menjadi 2 tahap, padahal senyatanya tidak ada pembagian pekerjaan pertahap dalam perjanjian No.75 dengan demikian putusan Majelis Arbitrase tersebut telah menimbulkan ketidak pastian dari sengketa yang timbul dari perjanjian No.75 tersebut, dan karenanya merugikan Pemohon untuk itu berlasarkan ketentuan hukum terhadap putusan yang demikian sudah sewajarnya haruslah dibatalkan, karena tidak didasarkan pada pertimbangan berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana yang diisyaratkan pasal 56 ayat (1) UU No.30 tahun 1999 :

Bahwa lebih aneh lagi Termohon II, III dan IV dalam dietum putusannya dalam konpensi memutuskan : Bila sampai 30 (tiga puluh) hari sejak putusan diucapkan belum dilaksanakan pembayaran yang merupakan hak Pemohon dalam konpensi, maka akan dibayar melalui pencairan dana Escrow Account No.R/K 700 141.00255.2.01.8 (rekening rupiah) dan R/K No.3081.411.0003.6 (rekening US Dollar) yang berada di Bank Mandiri (d/h Bank Dagang Negara (persero) cabang segitiga Senen Jakarta Pusat dan bila dana yang tersedia tidak mencukupi, maka akan dilunasi melalui pelelangan tanah seluas 3.621 M2 yang merupakan sebagian dari tanah Hak Guna Bangunan No.1440/Gunung sahari, Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat, Kelurahan Gunung Sahari Utara dan bangunan proyek Chrysant Tower Kondominium Rajawali yang didirikan diatasnya

Bahwa dictum tersebut adalah jelas bertentangan dengan ketentuan pasal 1 ayat (1) dan ayat 3 jo. Pasal 5 ayat (1) UU No.30 tahun 1999, karena PT. Bank Mandiri adalah bukan pihak dalam perkara aquo dan bertentangan dengan pasal 1917 KUH Perdata yang secara tegas menyebutkan bahwa putusan hanya mengikat para pihak, disamping bahwa :

- a. Escrow Account yang dimaksud adalah merupakan dana penampungan milik ribuan konsumen Crysant Tower Apartemen Rajawali yang dipergunakan untuk penyelesaian proyek tersebut ;
- b. Sertifikat HGB No.1440 / Gunung Sahari, adalah sudah merupakan milik ribuan konsumen Chrysant Tower, untuk dilakukan proses pemecahan ke Sertifikat Hak Milik atas satuan rumah susun ;

Dari uraian diatas, jelas bahwa dictum Putusan tersebut adalah bertentangan dengan hukum dan menjadi bersifat non executable ;

17. Bahwa akhirnya tidak aneh dan terbukti jika Putusan Arbitrase Ad Hoc tersebut tidaklah didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum, keadilan dan keputusan, dimana Termohon IV menyatakan keberatan atas Putusan Arbitrase Ad Hoc yang diambil Termohon II dan Termohon III dengan mengajukan Dissenting Opinion pada halaman 53 alinea ke 1 dari bawah yang mencatat " Menimbang, bahwa Arbiter Soegiharto, SH. telah mengajukan Keberatan atas pertimbangan putusan Majelis Arbitrase Ad-Hoc, karena banyak pertimbangan yang tidak berdasarkan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, karena pertimbangan tersebut tidak memutus / mempertimbangkan akibat cedera janji / wanprestasi yang dituntut para pihak ", dan karenanya adalah sudah sepatutnya menurut hukum Putusan Arbitrase tersebut haruslah dibatalkan, dan karenanya kepada Termohon II, III dan IV haruslah mematuhi Putusan ini ;

18. Bahwa oleh karenanya Putusan Arbitrase Ad Hoc No : 01/X/ AD.HOC/2001 tanggal 03 Oktober 2001 tersebut adalah didasarkan atas tipu muslihat, yang dilakukan oleh Termohon I dengan cara berdalih seolah-olah telah terjadi kesepakatan untuk merubah system pendanaan dari Turn Key ke system paket-perpaket, padahal kenyataannya tidak benar, serta disembunyikannya dokumen yang dapat membuktikan dana-dana yang dikeluarkan oleh Pemohon kepada Termohon I tersebut adalah dana pinjaman, serta terbukti

pertimbangan hukum yang diambil Termohon II dan Termohon III selaku Majelis Arbiter adalah tidak berdasarkan ketentuan hukum, Keadilan dan Keadilan serta bertentangan dengan hukum, kesucilaan dan ketertiban umum adalah sudah sepatutnya menurut pasal 72 UU No.30 tahun 1999, Putusan tersebut haruslah dibatalkan, atau batal demi hukum atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum (buiten effect stellen), dan haruslah dinyatakan sengketa Perjanjian No.75 tersebut sudah tidak mungkin lagi diselesaikan melalui Arbitrase ;

19. Bahwa oleh karena terbukti Putusan Arbitrase Ad Hoc No : 01/X/AD.HOC/2001 tanggal 03 Oktober 2001 tersebut adalah didasarkan atas tipu muslihat Termohon I dengan cara mendalilkan seolah-olah Perjanjian No.75 tersebut diubah menjadi pekerjaan pertahap, dan disembunyikannya dokumen yang membuktikan dana yang dikeluarkan Pemohon adalah merupakan pinjaman Termohon I, dan karenanya kepada Termohon I haruslah dinyatakan terbukti telah melakukan tipu muslihat dalam perkara Arbitrase Ad-Hoc tersebut ;

20. Bahwa demikian pula oleh karena Akta Perjanjian kerjasama No 75 tanggal 29 Juli 1996 tersebut adalah merupakan Akta Authentik dan tidak dibantah kebenarannya oleh Pemohon maupun Termohon I, karenanya menurut hukum adalah Sah, dengan demikian tidak dapat diselesaikannya pekerjaan pembangunan Chrysant Tower Condominium Rajawali Jakarta sesuai waktu yang telah disepakati bersama dalam perjanjian dan balikan oleh Termohon I telah dihentikan pembangunannya dan diterbengkalakan, maka tindakan Termohon I tersebut adalah jelas merupakan perbuatan Wanprestasi yang merugikan Pemohon, dan sudah sewajarnya pula kepada Termohon I untuk dihukum membayar ganti rugi kepada Pemohon sebesar tuntutan Pemohon dalam Permohonan Rekompensi yakni : Rp.262.686.122.985,- (dua ratus enam puluh dua milyar enam ratus delapan puluh enam juta seratus dua puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah), seketika secara tunai dan lunas, setelah perkara ini diputus ;

21. Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tersebut adalah didasarkan pada alasan hukum yang benar disertai bukti-bukti autentik yang kebenarannya tidak dapat disangkal lagi oleh para Termohon, untuk itu menurut hukum adalah sudah sepatutnya Putusannya haruslah dinyatakan dapat dilaksanakan

JB2

lebih dahulu meskipun ada Verset Bantahan, Bantahan, Banding ataupun Kasusi (uit Voerbuar bij voernad 1, dan kepada para Termohon haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung jawab ;

DALAM PROVISI :

Bahwa terbukti dari itikad buruk Termohon I yang di justifikasi oleh Termohon II dan Termohon III dengan putusan Arbitrase Ad Hoc yang tidak berdasarkan ketentuan hukum, maka agar Pemohon tidak terus menjadi korban dan dirugikan terus menerus, mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat berkenan menjatuhkan putusan Provisi untuk menunda eksekusi Putusan Arbitrase Ad Hoc No.01/X/AD HOC / 2001 tanggal 03 Oktober 2001 sampai dengan permohonan pembatalan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Berdasarkan hal-hal terurai diatas maka Pemohon mohon kehadiran yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutus sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan permohonan Provisi dari Pemohon tersebut untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menunda eksekusi Putusan Arbitrase Ad Hoc No.01/X/ADHOC/2001 tanggal 03 Oktober 2001 sampai dengan permohonan pembatalan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
3. Menghukum Termohon I, Termohon II, Termohon III secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya ;
2. menguatkan putusan provisi tersebut untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan Termohon I telah melakukan tipu muslihat dalam perkara Arbitrase Ad Hoc No. : 01/EX/AD.HOC/2001 tanggal 03 Oktober 2001 tersebut



4. Menyatakan putusan Arbitrase Ad Hoc No.01/X/AD-Ho.C/2001 tanggal 03 Oktober 2001 adalah batal atau batal demi hukum atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum (buiten effect stellen) ;
5. Menghukum Termohon II, Termohon III, dan Termohon IV untuk tunduk dan mematuhi isi putusan ini (om te gehangen en te gedogen) ;
6. Menyatakan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor : 75 tanggal 29 Juli 1996, mengenai kerjasama pekerjaan pembangunan proyek Chrysant Tower Apartemen Rajawali Jakarta adalah sah menurut hukum ;
7. Menyatakan Termohon I telah melakukan wanprestasi yang merugikan Pemohon ;
8. Menghukum Termohon I untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.262.686.122.985,- (dua ratus enam puluh dua milyar enam ratus delapan puluh enam juta seratus dua puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) kepada Pemohon, seketika secara tunai dan lunas, setelah perkara ini diputus ;
9. Menyatakan sengketa atas pekerjaan pembangunan proyek Chrysant Tower Apartemen Rajawali Jakarta berdasarkan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor : 75 tanggal 29 Juli 1996 adalah tidak mungkin diselesaikan lagi melalui Arbitrase ;
10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada verzet, bantahan, banding ataupun kasasi (Uit voerbaar bij voerraad) ;
11. Menghukum Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV , secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini ;

Atau :

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk kepentingan Pemohon datang menghadap Kuasanya ALEXIUS TANTRAJAYA, SH dan DANNY DARMAWAN, SH, sedangkan Termohon I datang menghadap kuasanya YULIONO A.SUCHIDI, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Nopember 2001, Termohon II datang menghadap kuasanya SHEIKH H.A.P.

LUBIS, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Nopember 2001, Termohon IV datang menghadap kuasanya H. TEUKU IBRAHIM, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Nopember 2001, adapun Termohon III tidak datang menghadap meskipun menurut Berita Acara Panggilan sidang tanggal 8 dan 15 Nopember 2001 telah dipanggil dengan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, dan ia tidak pula menunjuk orang lain untuk hadir sebagai wakilnya :

Menimbang, bahwa Majelis telah mengusahakan perdamaian kepada kedua belah pihak yang hadir, namun para pihak tetap mengupayakan perdamaian sambil perkara ini berjalan dan memohon persidangan dilanjutkan meskipun tanpa hadirnya Termohon III, tetapi upaya perdamaian ternyata tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Pemohon pembatalan putusan Arbitrase Ad Hoc No.01/X/AD.HOC/2001 tanggal 23 Oktober 2001, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya :

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon I telah mengajukan jawabannya tertanggal 20 Nopember 2001 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon I menolak keras semua dalil yang diajukan Pemohon dalam permohonannya, kecuali yang kebenarannya secara nyata-nyata dan tegas diakui oleh Termohon I ;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon I memang telah pernah terjadi sengketa mengenai pekerjaan pembangunan proyek Chrysant Tower Rajawali Kondominium ("Proyek"), yang terletak di Jakarta Pusat, yang dilaksanakan berdasarkan Akta Nomor 75 tanggal 29 Juli 1996 dari Sugiri Kadarisman, SH Notaris di Jakarta ("Akta Nomor 75") ;
3. Bahwa adalah juga benar sengketa aquo telah diperiksa dan diputus oleh Majelis Arbitrase Ad Hoc dengan putusan Nomor : 01/X/ARB/AdHoc/2001 tanggal 03 Oktober 2001 ("Putusan Arbitrase") yang amar putusannya seperti yang didalilkan Pemohon pada butir (5) permohonan ;
4. Bahwa adalah benar tidak pernah dibuat Adendum terhadap Akta Nomor 75 untuk mengatur kesepakatan Pemohon dan Termohon I mengenai perubahan sistem pengerjaan proyek menjadi sistem paket-paket pekerjaan. Oleh karenanya

benar pula bahwa pengerjaan proyek berdasarkan sistem paket-paket pekerjaan semata-mata hanya didasarkan kesepakatan (baru) yang tidak terkait dengan Akta Nomor 75 ;

5. Bahwa sesuai hukum dan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, In casu UU Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa ("UU Arbitrase 1999") pasal 60 bahwa putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak, yaitu Pemohon dan Termohon. Akan tetapi meskipun telah ditegaskan demikian oleh UU, namun putusan Arbitrase a quo masih dimohonkan oleh Pemohon supaya dibatalkan Pengadilan ;
6. Bahwa setelah dalil-dalil dalam permohonan dari Pemohon dicermati dengan seksama, maka permohonan pembatalan putusan Arbitrase didasarkan Pemohon pada dua (2) alasan yang diatur dalam pasal 70 UU Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa huruf (b) dan huruf (c) yaitu (1) karena tipu muslihat yang dilakukan Termohon I dalam pemeriksaan sengketa di Arbitrase Ad Hoc, dan (2) karena Termohon I menyembunyikan dokumen yang bersifat menentukan berupa dokumen permohonan pinjaman dana kepada Pemohon untuk pengerjaan proyek (vide dalil posita permohonan butir ke-8, ke-16, ke 18 dan ke-19) ;
7. Bahwa Termohon I menolak keras dalil-dalil pembatalan putusan Arbitrase aquo karena tidak benar dan tidak berdasar. Sama sekali tidak ada tipu muslihat apapun yang dilakukan Termohon I sehingga putusan Arbitrase aquo merupakan putusan yang diambil dari tipu muslihat yang dimaksud dalam pasal 70 huruf c UU Arbitrase 1999 ;
8. Bahwa adalah sulit dipahami nalar logis dan dibenarkan secara yuridis perihal dalil Pemohon yang menyatakan bahwa dalil Termohon I ketika pemeriksaan di Arbitrase yaitu tentang perubahan sistem pengerjaan proyek dari sistem turn-key menjadi sistem paket-paket pekerjaan merupakan suatu tipu muslihat. Sebab fakta materiil yang sesungguhnya adalah memang demikian. Setelah pengerjaan proyek terhenti dan masa 60 (enam puluh) hari pengenaan denda keterlambatan (liquidated damages) berakhir, pengerjaan proyek dilakukan dengan sistem yang sama sekali berbeda dari yang diatur dalam Akta Nomor 75 sistem pengerjaan diubah menjadi paket-paket pekerjaan, dan sumber pembiayaan proyek berasal dari Pemohon (selaku pemilik proyek) bersama-sama Termohon I (selaku

kontraktor), maupun dari escrow account yang diperjanjikan dalam Akta Nomor 75 memang untuk membayar prestasi kerja Termohon I serta dari Pemohon sendiri ;

9. Bahwa terjadi perubahan sistem pengerjaan proyek dari Turn-Key menjadi paket-paket pekerjaan, adalah disetujui dan diterima oleh Pemohon tanpa adanya pemaksaan, bujukan atau tekanan dalam bentuk apapun dari Termohon I. Hal ini ternyata dari pengakuan Pemohon sendiri dalam sidang Arbitrase, yang kemudian diulangi dalam permohonan (dalil butir 8 huruf C) dengan menyatakan perubahan sistem pengerjaan proyek aquo sebagai suatu "emergency action". Selain itu bahwa hasil-hasil dari sistem pengerjaan proyek berdasarkan paket-paket pekerjaan a quo juga telah dimanfaatkan Pemohon untuk keuntungannya sendiri ;
10. Bahwa karena telah demikian faktanya, maka patutlah untuk dipertanyakan "apakah perubahan sistem pengerjaan proyek yang didasarkan persetujuan yang didasari kehendak bebas dari kedua belah pihak, dan telah nyata-nyata pula diterima manfaatnya oleh para pihak, dapat dikualifikasi sebagai suatu perbuatan tipu muslihat". Oleh sebab itu, secara yuridis dalil Pemohon yang menyatakan Termohon I telah melakukan tipu muslihat selama dan dalam sidang Arbitrase menjadi tidak dapat dibenarkan karena tidak memenuhi unsur normatif dari ketentuan pasal 70 huruf 2 UU Arbitrase 1999, sehingga karenanya adalah patut dan berdasar untuk dikesampingkan Majelis Hakim;
11. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Termohon I menyembunyikan dokumen yang bersifat menentukan dalam persidangan Arbitrase, juga ditolak keras oleh Termohon I. Sama sekali tidak benar bahwa ada dokumen dan atau pernah dibuat perjanjian pinjaman dana pembiayaan proyek yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon I untuk melanjutkan pengerjaan proyek. Seandainya saja dokumen aquo ada, dan itu disembunyikan Termohon I selama persidangan Arbitrase quod non, maka sudah dapat dipastikan dokumen aquo akan diajukan Pemohon selama persidangan Arbitrase. Sebab seperti didalilkannya bahwa bukanlah kedudukan Pemohon selaku penyanggah dana dalam perjanjian aquo, quod non, yang tentunya juga memegang dokumen aquo ;
12. Bahwa perubahan cara pembiayaan karena adanya kesepakatan baru disebut Majelis Arbiter dengan istilah kesepakatan secara diam-diam yang dibuat Pemohon dan Termohon I untuk melanjutkan pengerjaan proyek, merupakan

konsekuensi logis-praktis dari kesepakatan untuk mengubah sistem pengerjaan proyek menjadi sistem paket-paket pekerjaan. Dalam hal ini tidak pernah dibuat dokumen apapun apalagi dokumen mengenai perjanjian pinjaman dana oleh Termohon I kepada Pemohon. Hal itu terutama karena sumber dana untuk membiayai pengerjaan paket-paket pekerjaan aquo tidak cuma dari Pemohon semata-mata, tetapi juga dari Termohon I maupun Escrow Account ;

13. Bahwa seperti halnya dalil adanya tipu muslihat yang diajukan Pemohon, maka dalil Pemohon tentang adanya dokumen bersifat menentukan yang disembunyikan Termohon I secara yuridis, tidak memenuhi unsur normatif yang diatur dalam ketentuan pasal 70 huruf (b) UU Arbitrase. Oleh sebab itu, adalah sangat tepat, berdasar, dan patut bagi Majelis Hakim untuk menolak dan mengesampingkan dalil-dalil Pemohon aquo;
14. Bahwa selain didasarkan kedua alasan pembatalan tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan pembatalan putusan Arbitrase yang dalam pencermatan Termohon I didasarkan pada 4 (empat) alasan lain yang tidak diatur dalam Undang-Undang Arbitrase 1999 yaitu (a) mengenai materai yang kurang bayar (dalil posita butir ke-13). (b) mengenai bukti-bukti yang sebagian besar dalam bentuk copy surat (dalil posita butir ke-8 huruf G dan butir ke-14). (c) mengenai adanya bukti dalam bahasa asing (dalil posita butir ke-15), serta (d) mengenai pertimbangan hukum dan putusan Majelis Arbiter Ad Hoc yang saling bertentangan, dan telah mengabulkan sesuatu yang tidak dituntut (dalil posita butir ke-10 dengan butir ke-12) :
15. Bahwa dalil-dalil pembatalan putusan Arbitrase yang diajukan Pemohon aquo ditolak keras oleh Termohon I. Perihal dalil materai kurang bayar quod non tidak mengakibatkan batalnya bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan Arbitrase. Konsekuensi yuridisnya hanyalah melekatnya kewajiban bagi Termohon I untuk melunasi bea materai yang berhutang ke kas Negara ;
16. Bahwa perihal dalil sebagian bukti dalam bentuk copy surat, dapat dikemukakan tidak melanggar ketentuan beracara dalam Arbitrase yang diatur dalam UU Arbitrase 1999. Tidak ada satupun ketentuan beracara dalam UU Arbitrase 1999 yang secara tegas melarang pengajuan copy surat sebagai bukti dalam persidangan. Selanjutnya juga tidak ada satupun ketentuan dalam UU Arbitrase 1999 yang mengatur digunakan atau diberlakukannya ketentuan beracara di Pengadilan (HIR/RBG) apabila tidak ditemukan atau belum diatur dalam UU

Arbitrase 1999. Oleh sebab itu dalil Pemohon yang mempersoalkan keabsahan bukti-bukti aquo berdasarkan ketentuan KUH Perdata dan atau hukum beracara di Pengadilan (Negeri) adalah sangat keliru dan harus ditolak Majelis Hakim ;

17. Bahwa perihal dalil adanya bukti dalam bahasa asing ditolak keras oleh Termohon I. Sebab sama sekali tidak melanggar ketentuan UU Arbitrase 1999, faktanya bahwa bahasa yang digunakan dalam persidangan Arbitrase seluruhnya adalah bahasa Indonesia. Kalaupun ada sebagian bukti yang dalam bahasa asing (Inggris), namun maksud dan isi dari dokumen bukti aquo dapat diterima, dipahami dengan baik oleh para pihak, serta telah disetujui Majelis Arbiter untuk (dapat) diperiksa dalam persidangan Arbitrase ;
18. Bahwa Termohon I juga menolak dalil Pemohon perihal pertimbangan hukum dan putusan Majelis Arbiter ad hoc yang saling bertentangan, dan telah mengabulkan sesuatu yang tidak dituntut. Dalil aquo merupakan penilaian terhadap pertimbangan (hukum) Majelis Arbitrase maupun putusan Arbitrase yang (telah) bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat (vide pasal 60 UU Arbitrase 1999). Sementara itu didalam UU Arbitrase 1999 pun telah tegas dan jelas diatur bahwa "Ketua Pengadilan Negeri tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan Arbitrase" (vide pasal 62 ayat 4 UU Arbitrase 1999) ;
19. Bahwa dengan demikian terbukti dalil-dalil Pemohon aquo sama sekali tidak memenuhi syarat normatif pembatalan putusan Arbitrase yang diatur dalam ketentuan pasal 70 UU Arbitrase 1999. Konsekuensi yuridisnya adalah bahwa alasan-alasan pembatalan putusan Arbitrase yang diajukan Pemohon demi hukum harus ditolak Majelis Hakim ;
20. Bahwa selanjutnya selain mengajukan pembatalan putusan Arbitrase, Pemohon ternyata juga mengajukan gugatan/tuntutan ganti rugi karena Termohon I didalilkannya telah melakukan perbuatan wanprestasi dengan menghentikan pengerjaan proyek. Untuk itu Pemohon mengajukan tuntutan agar Pengadilan menghukum Termohon I membayar ganti rugi sebesar Rp.262.686.122.985,- (dalil posita butir ke-20) ;
21. Bahwa sengketa yang terjadi antara Pemohon dan Termohon I terjadi dalam kerangka pelaksanaan Akta Nomor 75. Dalam pasal 24 ayat (2) Akta Nomor 75 telah tegas dan jelas diperjanjikan dan diterima baik oleh kedua belah pihak.

bahwa "segala perselisihan yang timbul dari perjanjian akan diselesaikan melalui arbitrase dalam tingkat pertama dan terakhir menurut peraturan prosedur Badan Arbitrase Nasional Indonesia";

22. Bahwa mengajukan tuntutan ganti rugi berdasarkan dalil wanprestasi yang diajukan Pemohon aquo tidak berdasar, dan bahkan melanggar ketentuan hukum dan perundang undangan yang berlaku, in casu UU Arbitrase 1999 pasal 3 dan pasal 11, yang selengkapnya menegaskan sebagai berikut :

Pasal 3 : Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase ;

Pasal 11 : (1). Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hal para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjian ke Pengadilan Negeri;

- (2). Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan didalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-Undang ;

Bahwa karena telah tegas diperjanjikan dalam Akta Nomor 75, dan terutama pengajuan tuntutan ganti rugi oleh Pemohon telah melanggar ketentuan pasal 3 jo. Pasal 11 UU Arbitrase 1999 tersebut diatas, maka tuntutan Pemohon harus ditolak dan dikesampingkan Majelis Hakim :

23. Bahwa dalil tuntutan provisional yang diajukan Pemohon, secara tegas ditolak Termohon I, karena tidak berdasar dan mengada-ada. Selain melanggar pasal 3 jo. Pasal 11 UU Arbitrase 1999, bahwa apa yang dituntut Pemohon bukan sesuatu yang menjadi hak Pemohon. Sebab dana dalam Excrow Account adalah dana yang diperjanjikan dalam Akta Nomor 75 untuk membayar pekerjaan Termohon I. Pada sisi lain, bahwa sebagian tanah Sertifikat HGB Nomor 1440/Gunung Sahari juga tidak benar dan bukan kepunyaan ribuan konsumen Chrysant Tower, tetapi milik Pemohon yang dijadikan jaminan pelunasan harga proyek oleh Pemohon kepada Termohon I dimana masih belum sempat dibebani Hak Tanggungan seperti yang diperjanjikan Pemohon dan Termohon I dalam Akta Nomor 75 aquo. Oleh sebab itu, seperti halnya dalil-dalil Pemohon lainnya, maka dalil tuntutan provisional dari Pemohon juga tidak berdasar hukum untuk dikabulkan Majelis Hakim.

Berdasarkan dalil jawaban yang diuraikan Termohon I tersebut diatas, terutama karena permohonan itu sendiri tidak berdasar hukum, maka dimohon kepada Majelis Hakim yang terhormat sudi mengadili dan memutuskan dengan amar putusan :

1. Menolak tuntutan provisi untuk seluruhnya ;
2. Menolak permohonan untuk seluruhnya ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ;

Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) bilamana Majelis Hakim berpendapat lain ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon II juga telah mengajukan jawabannya tertanggal 13 Nopember 2001 yang isinya sebagai berikut :

1. Putusan Arbitrase Ad Hoc No.01/X/AD-HOC/2001 sudah betul karena tidak melanggar UU No.30 tahun 1999 ;
2. Terhadap gugatan Pemohon PT. Jaya Nur Sukses ;


Termohon II (Sdr. Mohamunad Salim, SH) :

1. Menyangkal bahwa sebelum berakhir kontrak, pekerjaan PT. Hutama Karya baru selesai 73,5448 persen ;
2. Menyangkal adanya pengurangan pekerjaan sebanyak 8 lantai ;
3. Menyangkal paket-paket secara lisan tersebut mengikat kontraktor ;
4. Menyangkal bahwa PT. Hutama Karya menghentikan pekerjaan pembangunan sejak 19 Juni 1999 ;

Tetapi penyokong ;

Tuntutan PT. Hutama Karya a s/d f :

Menimbang, bahwa kemudian Termohon IV telah pula mengajukan jawabannya tertanggal 23 Nopember 2001 yang materinya sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon butir 1 s/d 19 adalah benar adanya 

2. Bahwa untuk itu Termohon IV selaku mantan Hakim selama lebih kurang 40 tahun yang kebetulan ditunjuk oleh Pemohon selaku Arbiter Ad Hoc oleh Pemohon, tetap berpegang teguh kepada prinsip hukum yang berlaku dalam proses pemeriksaan dan putusan Arbitrase Ad Hoc dengan memperhatikan azas objektivitas dan imparial sebagaimana tersurat dalam UU No.30 tahun 1999, sehingga pada akhirnya Termohon IV terpaksa harus menyatakan sikap keberatannya atas putusan Majelis Arbiter Ad-Hoc bersama-sama dengan Termohon II dan Termohon III dengan mengajukan perbedaan pendapat Anggota Majelis/Dissenting Opinion sebagaimana ternyata dari hal 53 alinea ke 1 dari bawah putusan Arbitrase Ad-Hoc No.01/X/AD.HOC/2001 tanggal 03 Oktober 2001 yang berbunyi "Menimbang, bahwa Arbiter Soegiharto, SH telah mengajukan keberatan atas pertimbangan putusan Majelis Arbitrase Ad-Hoc karena banyak pertimbangan yang tidak berdasarkan hukum kesusaian dan ketertiban umum, karena pertimbangan tersebut tidak memutuskan/mempertimbangkan akibat cidera janji/wanprestasi yang dituntut para pihak";

3. Bahwa Dissenting Opinion tersebut terpaksa diambil karena Termohon II dan Termohon III dalam proses musyawarah Arbiter untuk menjatuhkan putusan telah menggunakan konsepnya sendiri, dengan tidak memperhatikan pertimbangan yuridis yang ada dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yakni : alat-alat bukti yang sah diajukan oleh para pihak serta ketentuan hukum perdata materiel maupun formil yang berlaku, bahkan sama sekali tidak mau memperhatikan saran dan pertimbangan yuridis yang dikemukakan Termohon IV sehingga pada akhirnya Termohon II dan Termohon III menjatuhkan putusan yang berakibat melanggar ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

3.1. Hukum Acara Perdata yang berlaku terapan

3.1.1. Surat Kuasa Khusus yang dipergunakan oleh Gani Djemat & Partners No.DU/ET.1358/SK/193 tanggal 12 Juli 1999 dari Termohon I yang dijadikan dasar pengajuan Arbitrase Ad-Hoc berikut seluruh bukti-bukti P-1 sampai P-45 dengan catatan adanya 2 bukti P-44 dengan substansi yang berbeda yang diajukan Termohon I selaku Pemohon dalam persidangan perkara Arbitrase tersebut sebagian besar adalah bermeterai Rp.2000,- dan karenanya tidak memenuhi ketentuan pasal 41 ayat 1 Undang-Undang No.13 tahun

1985 jo. Peraturan Pemerintah RI No.24 tahun 2000 yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Mei 2000.

- 3.1.2. Bahwa demikian pula sebagian besar dari bukti-bukti yang diajukan Termohon I selaku Pemohon Arbitrase Ad-Hoc adalah berupa foto copy yang tidak ada aslinya (bukti P-2 sampai P-10, dan P-14 sampai P-39 dan P-40, P-41 A serta P-42), dan juga bukti P-5, P-6, P-9, P-11, P-12, P-13, P-15, P-20, P-21, P-23, P-25 seluruhnya adalah berbahasa Inggris dan tidak disertai terjemahan resmi dalam bahasa Indonesia, karenanya adalah bertentangan dengan pasal 28 UU No.30 tahun 1999 dan pasal 1888 KUH Perdata serta yurisprudensi tetap MARI ;
- 3.1.3. Bahwa lebih lagi dalam putusan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon I (dahulu Pemohon) maupun oleh Pemohon (dahulu Termohon) tidak diuraikan mengenai substantinya, sehingga tidak mengherankan jika dalam pertimbangan putusan halaman 47 alinea 2 hanya disebutkan bukti P-1 s/d P-44, padahal kenyataannya terdapat 2 bukti P-44 dengan substansi yang berbeda serta bukti P-45 yang tidak disebutkan oleh Majelis Arbiter Ad-Hoc ;
- 3.1.4. Bahwa demikian juga halnya didalam putusan tidak diuraikannya keterangan saksi-saksi yang diajukan Termohon (sekarang Pemohon) yang terungkap di persidangan ;
- 3.1.5. Bahwa begitu pula tidak disebutkan/diuraikan hasil pemeriksaan setempat (Plaatselijke onderzoke) ke lokasi objek sengketa oleh Majelis Arbiter Ad-Hoc yang dilakukan pada tanggal 22 Agustus 2001 ;
- 3.1.6. Bahwa sehingga tidak heran jika pertimbangan hukum yang diambil adalah tidak berdasarkan kepada alat bukti yang sah menurut hukum serta bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, sehingga terjadi bukti P-45 tidak disebutkan keberadaannya dan pada akhirnya menimbulkan kekeliruan dalam amar putusan ;
- 3.1.7. Bahwa sudah seharusnya dalam mengambil suatu putusan adalah mutlak didasarkan atas pertimbangan hukum yang benar dengan

didasari oleh alat-alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 56 ayat (1) UU No.30 tahun 1999 ;

3.2. Hukum Perdata Materil yang berlaku berupa :

3.2.1. Bahwa dari putusan Majelis Arbitrase Ad-Hoc tersebut, didalam pertimbangan hukumnya halaman 48 alinea ke 2 dari bawah menyatakan "Menimbang bahwa fakta yang terjadi dan tidak disangkal oleh Pemohon Dalam Kompensi/Termohon Dalam Rekonpensi adalah bahwa ia telah terlambat menyelesaikan pembangunan proyek aquo", namun dalam amar putusan Kompensi butir 2 justru menyatakan Termohon (kini Pemohon) yang telah melakukan wanprestasi, dengan demikian terbukti antara pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Arbiter tersebut saling bertentangan dan tidak didasarkan pada hukum, demikian pula mengenai amar putusan Pemohon (Termohon) melakukan wanprestasi sama sekali tidak dipertimbangkan asal usulnya dari perbuatan apa yang menjadi dasar Majelis Arbiter memutuskan Pemohon dalam keadaan wanprestasi, untuk itu terbukti jelas putusan Arbitrase Ad-Hoc tersebut tidaklah didasarkan pada ketentuan hukum dan bertentangan dengan pasal 56 ayat 1 UU No.30 tahun 1999 ;

3.2.2. Demikian pula Amar Putusan Majelis Arbitrase Ad-Hoc dalam Kompensi butir 3 yang " menyatakan bahwa Akta Perjanjian No.75 tanggal 29 Juli 1996 telah berakhir sejak tanggal tanggal 04 Februari 1998 " adalah tidak berdasarkan pada ketentuan hukum, dimana Termohon 1 selaku Pemohon tidak pernah mengajukan petitum demikian, oleh karenanya terbukti Putusan Majelis Arbiter telah mengabulkan sesuatu yang tidak dituntut oleh pihak lawan (putusan lebih), dan karenanya bertentangan dengan pasal 56 ayat 1 jo. Pasal 58 UU no.30 Tahun 1999 :

Bahwa disamping itu pula antara amar putusan dan pertimbangan hukum Putusan Majelis Arbiter tersebut saling bertentangan, terbukti dinyatakan Akta Perjanjian No.75 tanggal 29 Juli 1996 telah berakhir sejak tanggal 04 Februari 1998, sedangkan dilain pihak dinyatakan prestasi Termohon 1 (Pemohon) per 28 Februari

1998 baru sebesar 67,3780% dengan demikian adalah aneh dan tidak berdasar hukum dan karenanya Termohon IV tidak berpendapat bahwa bagaimana mungkin perjanjian yang sudah berakhir bisa dievaluasi lebih lanjut dikemudian hari oleh Majelis Arbiter ;

3.2.3. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Arbiter Ad-Hoc dalam halaman 50 alinea 3 yang menyebutkan bahwa :

Menimbang, bahwa sejak bulan Februari 1998 telah terjadi perubahan dari ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian No.75 dimana perubahan-perubahan tersebut tidak pernah dituangkan secara tertulis dalam bentuk-bentuk perjanjian tambahan/kesepakatan tambahan/MOU/Addendum Kontrak oleh kedua belah pihak, sehingga Majelis menilai bahwa sejak pekerjaan tahap II mulai dilaksanakan antara para pihak telah terjadi kesepakatan secara diam-diam diluar perjanjian No.75 adalah tidak berdasarkan hukum karena :

Bahwa berdasarkan pasal 25 ayat 5 Akta No.75 menyebutkan, jika terjadi perubahan perjanjian maka harus dibuatkan addendum secara tertulis antara Pemohon (semula Termohon) dan Termohon I (semula Pemohon) ;

Bahwa Termohon IV berpendapat dalam hukum tidak dikenal adanya terminologi kesepakatan diam-diam ;

Bahwa sebenarnya yang terungkap dalam persidangan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

A. Bahwa terbukti Termohon I (semula Pemohon) telah melakukan wanprestasi kepada Pemohon (semula Termohon) dengan tidak menyelesaikan pembangunan proyek pada 15 Oktober 1997 sesuai jadwal pembangunan menurut Akta No.75 (vide putusan halaman 48 alinea ke 2 dari bawah), bahkan prestasi per 28 Februari 1998 baru mencapai 67,3780% ;

B. Bahwa selanjutnya Termohon I terbukti yang secara tegas menyatakan diri dalam kesulitan keuangan lalu mohon bantuan

JB2

pinjaman dana kepada Pemohon dan Pemohon terdorong atas desakan konsumen dan rasa tanggung jawab serta itikad baik bersedia memenuhi permintaan pinjaman dana tersebut walaupun sesungguhnya konsep pendanaan proyek adalah sistem turn key, sehingga merugikan Pemohon;

C. Bahwa disinilah terlihat adanya tipu muslihat yang dilakukan Termohon I dengan menyembunyikan dokumen yang bersifat menentukan yaitu mengajukan permohonan pinjaman dana kepada Pemohon yang saat itu juga sedang dilanda amok konsumen yang menuntut kepada Pemohon, sehingga tindakan Pemohon untuk memberikan pinjaman dana kepada Termohon I adalah bukan sebagai kesepakatan diam-diam untuk mengenyampingkan ketentuan Akta No.75 yang berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak (asas pacta sunt servada);

D. Bahwa hal butir C diatas terbukti dari tidak pernah dibuatnya Addendum perjanjian sebagaimana diisyaratkan pasal 25 ayat 5 Akta No.75 dan juga diakui oleh Termohon I dalam dalil permohonannya Arbitrase Ad Hoc;

3.2.4. Bahwa benar posita Pemohon butir 9 huruf H seandainya Majelis Arbiter Ad-Hoc lainnya secara cermat memeriksa seluruh bukti-bukti yang diajukan dan tidak ada yang disembunyikan disertai tipu muslihat dan keterangan saksi-saksi yang terungkap di persidangan dan hasil pemeriksaan setempat, tentulah putusan Majelis Arbiter Ad-Hoc akan menjadi lain dan dapat memenuhi rasa keadilan para pihak yang bersangkutan in casu Pemohon dan Termohon I;

3.2.5. Bahwa yang sangat fatal dan merupakan kekeliruan besar dilakukan Termohon II dan Termohon III adalah sama sekali tidak mempertimbangkan akibat dari wanprestasi Termohon I (dahulu Pemohon) terhadap diri Pemohon (dahulu Termohon) yang diajukan dalam permohonan Rekompensi untuk membayar biaya ganti rugi, denda dan bunga (Kosten, Schaden en Interessen) yang timbul sebagai konsekuensi logis dari wanprestasi Termohon I (semula Pemohon) menurut pasal 1236 dan 1243 KUH Perdata sebesar Rp.262.686.122.985,- (dua ratus enam puluh dua milyar enam ratus



delapan puluh enam juta seratus dua puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) sebagaimana perincian dilampirkan ;

Bahwa kerugian-kerugian Pemohon (semula Termohon) yang timbul dikarenakan adanya keterlambatan pembangunan proyek Chrysant Tower tersebut dapatlah dipahami akan berakibat para pembeli/customer melakukan klaim, pembatalan pembelian, tidak mau membayar angsuran pembelian sehingga terjadi pendebetan dana Escrow account oleh Bank Dagang Negara selaku pembeli KPR, kehilangan keuntungan yang seharusnya diperoleh, biaya overhead akibat proyek terbengkalai dan kerugian immateriel serta biaya-biaya lain secara terinci dilampirkan, serta penunjukan kontraktor pihak ketiga untuk melanjutkan proyek atas biaya Termohon I ;

3.2.6. Bahwa padahal menurut hemat Termohon IV hal tersebut adalah mutlak harus dipertimbangkan dan sudah dibuktikan secara sah oleh Pemohon dalam persidangan disertai lengkap dengan bukti-bukti pendukungnya ;

3.2.7. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Arbiter Ad-Hoc halaman 52 alinea ke 1 yang menyatakan adil untuk memberikan kerugian sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) kepada Pemohon (dahulu Termohon dalam Kompensi/Pemohon dalam Rekompensi) adalah pertimbangan hukum yang sangat keliru karena pengertian kerugian dan ganti kerugian secara yuridis adalah sangat berbeda, dan sangat ironis jika pihak yang terlebih dahulu melakukan wanprestasi justru dapat terbebas dari ketentuan pasal 1236 dan 1243 KUH Perdata dan bahkan memperoleh keuntungan dari padanya ;

4. Bahwa lebih keliru lagi Majelis Arbiter Ad-Hoc dalam Dictum putusannya dalam Kompensi memutuskan :

Bila sampai 30 (tiga puluh) hari sejak putusan diucapkan belum dilaksanakan pembayaran yang merupakan hak Pemohon dalam Kompensi akan dibayar melalui pencairan dana Escrow Account No.R/K 700.144.00255.2.01.8 (rekening rupiah) dan No.R/K 3081.411.000.6 (rekening US Dollar) yang berada di Bank Mandiri (d/ Bank Dagang Negara (Persero) cabang Segitiga

Senen, Jakarta Pusat dan bila dana yang tersedia tidak mencukupi, maka akan dilunasi melalui pelelangan tanah seluas 3.621 M2 yang merupakan sebagian dari tanah Hak Guna Bangunan No.14-10/Gunung Sahari Kel. Gunung Sahari Utara Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat, dan bangunan proyek Chrysant Tower Kondominium Rajawali yang didirikan diatasnya :

Bahwa diktum tersebut adalah jelas bertentangan dengan ketentuan pasal 1 ayat 1 dan ayat 3 Juncto pasal 5 ayat 1 UU No.30 Tahun 1999, karena PT. Bank Mandiri adalah bukan pihak dalam perkara a quo, dan bertentangan dengan pasal 1917 KUH Perdata yang secara tegas menyebutkan bahwa putusan hanya mengikat para pihak, disamping bahwa :

- a. Escrow Account yang dimaksud terbukti adalah merupakan dana penampungan milik ribuan konsumen Chrysant Tower Apartemen Rajawali yang dipergunakan untuk menyelesaikan proyek tersebut ;
- b. Sertifikat HGB No.1400/Gunung Sahari terbukti adalah sudah merupakan milik ribuan konsumen Chrysant Tower untuk dilakukan proses pemecahan ke Sertifikat Hak Milik atas satuan rumah susun ;

Dari uraian diatas, jelas bahwa diktum putusan tersebut adalah bertentangan dengan hukum dan karenanya Termohon IV tidak sependapat untuk itu seharusnya putusannya menjadi bersifat non executabel ;

5. Bahwa oleh karenanya putusan Arbitrase Ad-Hoc No.01/X/AD.HOC/2001 tanggal 3 Oktober 2001 tersebut terbukti adanya tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon I dengan cara berdalih seolah-olah telah terjadi kesepakatan untuk merubah sistem pendanaan dari Turn Key ke sistem paket per paket, padahal senyatanya dipersidangan tidak terbukti adanya addendum perubahan perjanjian dan dengan disembunyikannya dokumen yang dapat membuktikan dana-dana yang dikeluarkan oleh Pemohon kepada Termohon I tersebut adalah dana pinjaman serta terbukti pertimbangan hukum yang diambil Termohon II dan Termohon III selaku Majelis Arbiter adalah tidak berdasarkan ketentuan hukum keadilan dan kepatutan serta bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum adalah sudah sepatutnya menurut pasal 72 UU No. 30 tahun 1999, putusan tersebut haruslah dibatalkan, atau batal demi hukum atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum (buiten effect stellen) dan haruslah dinyatakan sengketa perjanjian No.75 tersebut sudah tidak mungkin lagi


diselesaikan melalui arbitrase serta putusan Arbitrase Ad-Hoc tersebut haruslah dibatalkan atau setidaknya dinyatakan bersilat non Executabel, karena bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketentraman umum ;


6. Bahwa pengalaman diatas untuk Termohon IV selalu Arbiter Ad Hoc adalah merupakan suatu tragedi dan sangat memprihatinkan karena tujuan lembaga Arbitrase sebagaimana diamanatkan UU No.30 tahun 1999 sebagai alternatif penyelesaian sengketa adalah menjadi irabazir, karena justru menciptakan masalah baru ;

Berdasarkan hal-hal terurai diatas, Termohon IV pada prinsipnya dapat menyetujui permohonan pembatalan putusan Arbitrase Ad-Hoc No.01/X/AD.HOC/2001 tanggal 03 Oktober 2001 dan sudah sewajarnya Pengadilan Negeri Jakarta Barat harus menyatakan dirinya berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini, dengan membatalkan putusan Arbitrase Ad-Hoc tersebut atau setidaknya dinyatakan Non Executabel ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPerdata, Pemohon untuk mengemukakan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat yang ditandai P-1 sampai dengan P-14, yaitu :

1. Putusan Arbitrase Ad Hoc No.01/X/AD-HOC/2001 tanggal 03 Oktober 2001, antara PT. Hutama Karya lawan PT. Jaya Nur Sukses, bukti P-1 ;
2. Surat kuasa dari Pemohon kepada Gani Djemat & Partners No.DU/ET.1358/SK/193 tanggal 12 Juli 1999 sebagai dasar mengajukan permohonan Arbitrase Ad Hoc berneterai Rp.2000,- bukti P-2 ;
3. Surat dari Bank Exim kepada PT. Hutama Karya Up. Bp. Ir. Robert Mulyono Santoso perihal keringanan pembayaran bunga tunai fasilitas KMK atas nama PT. Hutama Karya, bukti P-3 ;
4. Surat BANKRUPTCY ANNOUNCEMENT tertanggal 19 Maret 1999, bukti P-4 ;
5. Putusan Mahkamah Agung RI No.01/K/1999 antara PT.JAYA READYMIX, Cs melawan PT. HUTAMA KARYA, CS, tertanggal 23 Pebruari 1999, bukti P-5.

6. Putusan Mahkamah Agung R.I. No.04 PK/N/1999 antara PT. Utama Karya, Cs melawan PT. Jaya Readymix, tertanggal 6 April 1999, bukti P-6 ;
7. Surat dari Utama- BM kepada PT. Jaya Nur Sukses No.L3/BA0581/201/II/98, tertanggal 12 Februari 1998, bukti P-7 ;
8. Surat dari James Koh.L.M kepada PT. Jaya Nur Sukses No.HK-BM/1482/Div.C/146 tertanggal 29 Oktober 1997, bukti P-8;
9. Terjemahan resmi dari surat Permohonan I tertanggal 29 Oktober 1997 yang ditujukan kepada Pemohon dengan maksud untuk minta bantuan dana sebesar Rp.2.000.000.000.- bukti P-8A ;
10. Bukti Bank keluar No.1-250412 sebesar Rp.70.000.000,- tertanggal 17 Februari 1998, bukti P-9.1 ;
11. Bukti Bank keluar No.8-250413 sebesar Rp.65.000.000,- tertanggal 24 Februari 1998, bukti P-9.2 ;
12. Bukti Bank keluar No.9-258678 sebesar Rp.97.500.000,- tertanggal 3 Maret 1998, bukti P-9.3 ;
13. Bukti Bank keluar No.7-258679 sebesar Rp.71.250.000,- tertanggal 10 Maret 1998, bukti P-9.4 ;
14. Bukti Bank keluar No.207676 sebesar Rp.121.750.000,- tertanggal 17 Maret 1998, bukti P-9.5 ;
15. Bukti Bank keluar No.207677 sebesar Rp.40.000.000,- tertanggal 18 Maret 1998, bukti P-9.6 ;
16. Bukti bank keluar No.088068 sebesar Rp.152.480.000,- tertanggal 24 Maret 1998, bukti P-9.7 ;
17. Bukti Bank keluar No.207693 sebesar Rp.134.457.000,- tertanggal 1 April 1998, bukti P-9.8 ;
18. Bukti Bank keluar No.562001 sebesar Rp.122.655.000,- tertanggal 9 April 1998, bukti P-9.9 ;
19. Bukti Bank keluar No.563280 sebesar Rp.45.000.000.- tertanggal 9 September 1998, bukti P-9.10 : 

20. Bukti Bank keluar No.563413 sebesar Rp.50.000.000,- tertanggal 1 Oktober 1998, bukti P-9.11 ;
21. Bukti Bank keluar No.563289 sebesar Rp.79.000.000,- tertanggal 21 September 1998, bukti P-9.12 ;
22. Bukti Bank keluar No.562406 sebesar Rp.157.000.000,- tertanggal 12 Mei 1998, bukti P-9.13 ;
23. Bukti Bank keluar No.563412 sebesar Rp.13.000.000,- tertanggal 2 Oktober 1998, bukti P-9.14 ;
24. Bukti Bank keluar No.563411 sebesar Rp.75.000.000,- tertanggal 7 Oktober 1998, bukti P-9.15 ;
25. Bukti Bank keluar No.210364 sebesar Rp.169.132.000,- tertanggal 5 Oktober 1998, bukti P-9.16 ;
26. Bukti Bank keluar No.0131306 sebesar Rp.127.350.000,- tertanggal 19 Oktober 1998, bukti P-9.17 ;
27. Bukti Bank keluar No.1440025613 sebesar Rp.184.700.000,- tertanggal 13 Oktober 1998, bukti P-9.18 ;
28. Bukti Bank keluar No.889460 sebesar Rp.61.000.000,- tertanggal 27 Oktober 1998, bukti P-9.19 ;
29. Bukti Bank keluar No.562535 sebesar Rp.29.000.000,- tertanggal 1 Juli 1998, bukti P-9.20 ;
30. Bukti Bank keluar No.562549 sebesar Rp.21.000.000,- tertanggal 9 Juli 1998, bukti P-9.21 ;
31. Bukti Bank keluar No.562536 sebesar Rp.25.000.000,- tertanggal 30 Juni 1998, bukti P-9.22 ;
32. Bukti Bank keluar No.562774 sebesar Rp.14.750.000,- tertanggal 21 Juli 1998, bukti P-9.23 ;
33. Bukti Bank keluar No.563068 sebesar Rp.25.500.000,- tertanggal 31 Juli 1998, bukti P-9.24 ;
- 

48. Bukti Bank keluar No.562019 sebesar Rp.64.991.000,- tertanggal 17 April 1998, bukti P-9.39 ;
49. Pembuktian gugatan / tuntutan rekonsensi Pemohon yang diajukan secara rinci, bukti P-10 ;
50. Surat yang dikirim melalui faximile & pos No.2/IV/2001 tertanggal 19 April 2001, bukti P-11 ;
51. Surat keputusan No.01/VI/AD-HOC/2001 mengenai biaya persidangan dalam rekonsensi tertanggal 8 Juni 2001, bukti P-12 ;
52. Surat permohonan Arbitrase Ad Hoc dalam perkara antara PT. Hutama Karya melawan PT. Jaya Nur Sukses, tertanggal 30 April 2001, bukti P-13 ;
53. Surat Kuasa No.DU/et.1358/SK/193 dari Ir. Robert Mulyono Santoso kepada Hunphrey R. Djemat dkk tertanggal 12 Juli 1999, bukti P-14 ;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa foto copy surat tersebut diatas setelah diperiksa ternyata semuanya bermeterai cukup, namun ada yang sesuai aslinya yaitu P-1, P-7, P-8, P-8A, P-9.1 sampai dengan P-9.39, P-10, P-11 dan P-12, adapun lainnya hanya ditunjukkan foto copynya yaitu P-2 sampai dengan P-6 (reproduksi), P-13 dan P-14 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari pihak Termohon, hanya Termohon IV yang mengajukan alat bukti berupa foto copy surat yang ditandai T-IV-1 dan T-IV.2 yaitu :

1. Turunan Penetapan No.043/Pdt.P/2000/PN.JKT.BAR tanggal 7 Maret 2000 atas nama PT. JAYA NUR SUKSES, bukti T-IV-1 ;
2. Putusan Arbitrase Ad Hoc No.01/X/AD-HOC/2001 tanggal 3 Oktober 2001 antara PT. Hutama Karya (persero) lawan PT. Jaya Nur Sukses, bukti T-IV-2 ;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa foto copy surat tersebut diatas setelah diperiksa ternyata bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya sehingga berdasarkan pasal 1888 KUH Perdata dinilai mempunyai kekuatan pembuktian ;

Menimbang, bahwa kedua pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya memohon putusan ;

34. Bukti Bank keluar No.562782 sebesar Rp.42.780.000,- tertanggal 23 Juli 1998, bukti P-9.25 ;
35. Bukti Bank keluar No.363069 sebesar Rp.54.917.000,- tertanggal 7 Agustus 1998, bukti P-9.26 ;
36. Bukti Bank keluar No.1440025613 sebesar Rp.79.066.000,- tertanggal 6 Agustus 1998, bukti P-9.27 ;
37. Bukti Bank keluar No.1440025613 sebesar Rp.85.500.000,- tertanggal 14 Agustus 1998, bukti P-9.28 ;
38. Bukti Bank keluar No.888821 sebesar Rp.3.000.000,- tertanggal 10 Agustus 1998, bukti P-9.29 ;
39. Bukti kas keluar No.1327 sebesar Rp.5.000.000,- tertanggal 14 Agustus 1998, bukti P-9.30 ;
40. Bukti Bank keluar No.888847 sebesar Rp.13.000.000,- tertanggal 21 Agustus 1998, bukti P-9.31 ;
41. Bukti Bank keluar No.563173 sebesar Rp.62.295.000,- tertanggal 27 Agustus 1998, bukti P-9.32 ;
42. Bukti Bank keluar No.563184 sebesar Rp.175.000.000,- tertanggal 2 September 1998, bukti P-9.33 ;
43. Bukti Bank keluar No.563253 sebesar Rp.27.500.000,- tertanggal 10 September 1998, bukti P-9.34 ;
44. Bukti Bank keluar No.562524 sebesar Rp.104.000.000,- tertanggal 16 Juni 1998, bukti P-9.35 ;
45. Bukti Bank keluar No.562449 sebesar Rp.119.000.000,- tertanggal 5 Juni 1998, bukti P-9.36 ;
46. Bukti Bank keluar No.562012 sebesar Rp.40.000.000,- tertanggal 15 April 1998, bukti P-9.37 ;
47. Bukti Bank keluar No.562043 sebesar Rp.149.488.000,- tertanggal 30 April 1998, bukti P-9.38 ;
- 